

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
ATAS DATA TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia. Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar 2021-2026. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir aparatur, karena kinerja pemerintahan sejalan dengan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis kearah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (*Inputs Oriented Accountability*), menjadi yang berorientasi kepada manfaat (*Benefit Oriented Government*).

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Denpasar ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing Bagian. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi. Harapan kami semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kota Denpasar ini dapat memberikan informasi Laporan Kinerja sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 24 Pebruari 2026

Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680924 199303 1 010



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Isu-Isu Strategis.....	6
1.4 Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.1.1 Visi dan Misi	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	20
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan	24
2.2.3 Indikator Kinerja Utama.....	63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	71
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	71
3.2 Pengukuran Kinerja	78
3.3 Akuntabilitas Kinerja.....	145
BAB IV PENUTUP	194
4.1. Simpulan	194

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	18
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025	20
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	21
Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan 2025	24
Tabel 2.7 Laporan Evaluasi Rencana Kerja tiap Triwulan Tahun 2025	36
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025	64
Tabel 2.9 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	64
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025	72
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Denpasar Jangka Menengah (2022-2026) ...	74
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Denpasar dengan Capaian Nasional	77
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025	79
Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	95
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Kota Denpasar Tahun 2025 ..	96
Tabel 3.7 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	145
Tabel 3.8 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	163
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 .	165
Tabel 3.10 Analisis Faktor Pendorong serta Penghambat per Kegiatan Tahun 2025	174
Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	184



IKHTISAR EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 sebagai perubahan dan pengganti atas pedoman yang disusun sebelumnya, yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 ini tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, termasuk tujuan dan sasaran yang dicapai pada seluruh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan menunjukkan hasil yang baik. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebagai unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan permasalahan strategis yang dirumuskan yaitu:

A. Isu Strategis:

1. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
2. Belum optimalnya pelayanan perekonomian dan pembangunan
3. Belum optimalnya pelayanan administrasi umum

B. Tujuan:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar

C. Sasaran:

Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)

D. Indikator Tujuan/Sasaran:

Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah

E. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar tahun 2025 melalui penetapan 3 Program, 16 Kegiatan serta didukung oleh 39 Sub Kegiatan yang selaras dengan tugas dan perannya dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah dapat diukur dengan Persentase indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai dibagi Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah dikali 100%. Adapun target kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar T.A. 2025 adalah 100% dengan capaian kinerja 84,09%.

Beberapa tantangan / kendala-kendala yang dihadapi dan menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam memenuhi target kinerja dalam tahun Renstra 2021-2026 yakni:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, khususnya yang berbasis IT, sehingga mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah secara umum
2. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur (SDA), terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan. Pesatnya perkembangan TIK menuntut SDA yang memiliki KSA (Kompetensi, Skill, dan Attitude) yang memadai, sehingga pendidikan dan pelatihan secara berkala sangat diperlukan
3. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi (*poor communication and coordination*) yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sectoral
4. Jangkauan pelayanan regulasi dan penyelesaian permasalahan hukum yang sangat luas meliputi Pemerintah Kota, Pemerintah Desa dan Desa Adat

5. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya
6. Akurasi data dari Perangkat Daerah perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang pelaporan LPPD
7. Kualitas Kerjasama Daerah masih perlu dioptimalkan
8. Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat masih perlu ditingkatkan
9. Profesionalisme pengembangan SDM dalam upaya pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ
10. Kebijakan pemerintah di bidang perekonomian yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

Menindaklanjuti kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kinerja, maka upaya pemecahan yang dapat dilakukan adalah:

1. Penyediaan sarana prasarana berbasis IT, pengembangan sistem administrasi perkantoran secara elektronik yaitu tata naskah dinas elektronik guna mempercepat penyebaran informasi hingga ke wilayah kecamatan
2. Mengirimkan personil Sekretariat Daerah guna memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
3. Teknologi informasi dapat mempermudah dalam proses pelaksanaan program/kegiatan.
4. Penyediaan regulasi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan secara komprehensif, serta terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peningkatan sistem teknologi informasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terkoneksi antara Karmasimanis dengan SIPD
6. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat terkait dengan sumber data yang mendukung kualitas LPPD
7. Tercapainya tindaklanjut dari Perangkat Daerah untuk mensinergikan MOU/PKS dengan pihak luar yang mendukung kualitas Kerjasama Daerah



8. Penyiapan kebijakan di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
9. Tersedianya SDM yang memadai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dalam rangka kematangan UKPBJ
10. Peningkatan kualitas pelayanan Perumda di Kota Denpasar berbasis IT, meningkatkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro yang sehat serta UMKM yang semakin berkembang



BAB I





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan Pemerintah maka setiap akhir tahun kegiatan, penyelenggara kegiatan harus membuat pertanggungjawaban yang di buat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam LKjIP ini disajikan Visi dan Misi serta manfaat yang diperoleh, juga disajikan keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.

Untuk hal diatas maka berdasarkan Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1. merumuskan program kerja Sekretariat Daerah berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas tanggungjawab, permasalahan dan hambatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;



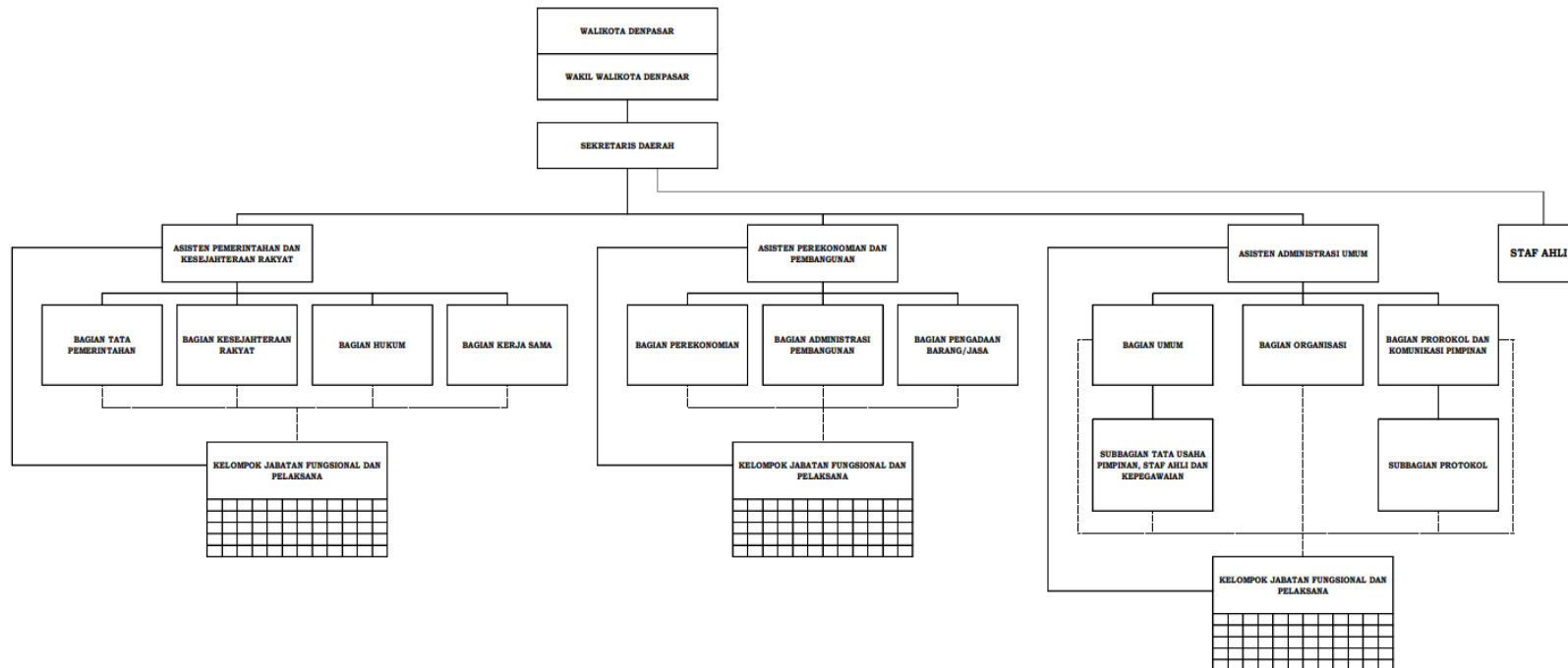
5. menyiapkan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. membina ASN dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
8. memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH





1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota No. 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
15. Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar selama rentang waktu 5 (lima) tahun seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026, masih ada kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi umum.
 - Masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat
 - Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan secara umum
 - Belum optimalnya komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait informasi pelaksanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - Masih rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda
 - Belum optimalnya tindaklanjut Perangkat Daerah dalam sinergi MOU/PKS
 - Belum optimalnya kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat
 - Masih kurangnya akurasi data dari Perangkat Daerah dalam rangka menunjang pelaporan LPPD



3. Belum optimalnya pelayanan perekonomian dan pembangunan
 - Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis IT
 - Masih kurangnya SDM sesuai kualifikasi dan kompetensi kematangan UKPBJ
 - Belum optimalnya koordinasi kebijakan perekonomian dalam rangka meningkatkan kualitas LPD, Perumda, UMKM

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Sekretariat Daerah Kota Denpasar pada tahun 2025 adalah dengan “Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang”. Untuk dapat melaksanakan strategi tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum
2. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Perekonomian Dan Pembangunan

Arah kebijakan ini ditentukan untuk menanggapi permasalahan dan isu strategis yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Selanjutnya strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan tersebut menjadi dasar dalam menentukan dan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Denpasar selama 5 tahun kedepan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*). Identifikasi terhadap

lingkungan strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Sekretariat Daerah Kota Denpasar memiliki kondisi internal yang mendorong ataupun sebaliknya menghambat pengembangan misinya. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis terhadap kondisi ataupun lingkungan internal, yang diawali dengan identifikasi atas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Adapun identifikasi kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kekuatan (*Strenght*)

- Struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas Aparatur dengan di dukung tingkat pendidikan yang cukup memadai
- Aparatur yang bekerja memiliki integritas dedikasi dan komitmen yang lebih tinggi
- Hubungan kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang aman dan kondusif
- Adanya jalinan kerjasama yang harmonis antara Pemerintah, pelaksana kegiatan dan komponen masyarakat di dalam pembangunan Kota Denpasar
- Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi untuk melakukan promosi dan publikasi
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas
- Tersedianya sistem aplikasi dalam menunjang efektivitas dan efisiensi kerja

b) Kelemahan (*Weakness*)

- Masih adanya tumpang tindih tugas-tugas antar perangkat daerah
- Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah
- Sistem informasi yang belum dimanfaatkan secara professional
- Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai terkait pengolahan data dan analisis

- Kurangnya pemahaman terkait penyusunan dokumen perencanaan maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan
- Belum semua SOP Pelaksanaan Kegiatan tersedia untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan

2. Analisis Eksternal

Dalam mengemban misinya, Sekretariat Daerah Kota Denpasar tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal atau sering juga disebut sebagai lingkungan eksternal. Karena itu, perlu dianalisis semua peluang ancaman yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang berasal dari luar sebagaimana halnya dengan lingkungan internal, juga berpotensi mendorong atau sebaliknya menghambat pengembangan misi atau mengganggu pencapaian misi. Adapun kondisi lingkungan eksternal pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebagai berikut:

a) Peluang (*Opportunities*)

- Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- Hubungan yang harmonis dengan Instansi / Perangkat Daerah lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
- Adanya jaringan informasi di media masa yang bersifat global serta kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan dalam melaksanakan tupoksi
- Adanya debirokratisasi perijinan untuk menumbuhkan keinginan pengusaha menanamkan modalnya di Denpasar
- Terbukanya kesempatan bagi aparat untuk mengikuti Diklat

b) Ancaman (*Threats*)

- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan

- Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kota Denpasar
- Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat
- Sering berubahnya kebijakan pemerintah di bidang perekonomian

1.4 Sistematika Penyajian

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat terkait apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan Rencana Kinerja, menguraikan tentang Visi, Misi dan cara mencapai sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan, Program serta Kegiatan serta diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil/ pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.



Bab IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.

Lampiran-Lampiran



BAB II



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Suatu visi merupakan gambaran yang menantang atau nalar tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu instansi/organisasi/kelompok. Visi merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan organisasi. Visi memberikan aspirasi, motivasi, dan rambu-rambu dalam menyusun strategi dan kebijakan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu agar kegiatan yang dilakukan dapat terarah dan terstruktur.

Adapun Visi Sekretariat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan Visi Kota Denpasar yaitu : **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**. Kota Kreatif bermakna Kota Denpasar menjadi kota yang hidup dengan kesadaran dinamis terhadap tiga daya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya spiritual. Berbasis budaya memiliki makna kota yang memiliki inovasi, dinamika dan kreasi untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana; Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;



3. Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana; Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.



2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Secara detail tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju	Misi III: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Denpasar	Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	2021-2026: 100%	Meningkatkan pelayanan urusan kesekretariatan (Sekretariat Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan administrasi umum - Meningkatkan pelayanan prima bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Meningkatkan pelayanan prima bidang perekonomian dan pembangunan



Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, misi yang diampu masih sama di Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, namun ada perubahan mulai Tahun 2026 pada Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target di Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Adapun tujuan dari Sekretariat Daerah Kota Denpasar dikaitkan dengan misi tersebut adalah : “Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik”. Penentuan tujuan ini memperhatikan kesesuaian terhadap RPJMD Kota Denpasar dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dalam membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, maka disusunlah sasaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang dapat terukur pencapaiannya. Adapun sasaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan

Sasaran ini diukur melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang mana penilaiannya terdiri dari berbagai aspek seperti harmonisasi kebijakan dengan instansi / peraturan yang lebih tinggi, kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review yang di dalamnya berkaitan dengan evaluasi terhadap peraturan / kebijakan yang sudah berjalan serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sasaran ini diukur pula melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang mana dalam indeks ini secara garis besar menilai 2 dimensi utama yaitu Perencanaan Kebijakan dan Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan. Adapun kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK ini adalah Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga / Badan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



2. Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel

Meningkatnya akuntabilitas kinerja diukur dengan Nilai LPPD, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan serta Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Indikator ini mencerminkan kinerja birokrasi yang akuntabel, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaiannya dilakukan oleh pihak eksternal Sekretariat Daerah yang menjamin transparansi dan objektivitas penilaiannya. Selain itu, melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata Kelola pengadaan barang / jasa di instansi pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas pengadaan barang / jasa pemerintah termasuk efisiensi, efektivitas dan transparansi.

3. Meningkatnya tata kelola pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan Nilai SKM dan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Indikator ini mencerminkan pencapaian pelayanan pada Pemerintah Kota Denpasar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (diukur dengan IP SPM) serta memperhatikan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan (diukur dengan Nilai SKM).



Untuk Tahun 2026 dengan kondisi existing dan target selama tahun 2025-2030, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH												
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik		Nilai SAKIP (Nilai)	76,92	78,35	80,01	81,21	82,43	83,67	84,92		
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,66	4,67	4,68	4,69	4,7	4,71	4,72		
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))	94,5	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	
			Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	90,61	80.00-90.99	80.00-90.99	91.00-100	91.00-100	91.00-100	91.00-100	91.00-100	
		Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD (Nilai)	3,7751	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	
			Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,68	11,69	11,7	11,71	11,72	11,73	11,74		
			Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	99,67	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	
		Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM (Nilai)	91,78	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	
			Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))	99,57	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	



Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi			
Indikator : Nilai SAKIP dan Opini BPK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Optimalisasi peran serta Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan Perangkat daerah	Meningkatkan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan
	Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	1. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan kewenangan	1. Meningkatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah bidang administrasi umum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan Pembangunan 2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelaporan Kinerja Pemerintahan
		2. Meningkatkan kualitas SDM serta optimalisasi sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap tata kelola pengadaan barang / jasa kepada pelaku pengadaan barang / jasa
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
Indikator : Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik	1. Meningkatkan peran koordinatif dalam penerapan standar pelayanan publik pada Perangkat Daerah melalui sosialisasi standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja

2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Penyusunan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 oleh para pejabat sebagai penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih efektif dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2025.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator/Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan terkait langkah-langkah prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi. Sesuai dengan arah

kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan publik untuk penguatan reformasi birokrasi sehingga dapat terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Dalam mencapai tujuan terwujudnya tata kelola Pemerintah Kota Denpasar dengan sasaran meningkatnya pelayanan urusan penunjang maka strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pelayanan urusan kesekretariatan.

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator/Kinerja	Target
2021	Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang	Persentase Pencapaian IKU Walikota	100%
2022	Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintahan	100%
2023-2025	Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%
2025-2029	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))	90-100
		Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	80.00-90.99
	Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD (Nilai)	3.41-4.20
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,7
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	90.01-99.99
	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM (Nilai)	88.31-100
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))		99.01-100	

Pada Tahun 2021 melalui sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang melalui indikator Persentase Pencapaian IKU Walikota yang diukur menggunakan 10 pengukuran dimasing-masing sasaran

Pada Tahun 2022 melalui sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang, indikator Sekretariat Daerah Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintahan yang diukur dengan persentase indikator kegiatan yang dicapai dibagi jumlah indikator dikali 100%, dengan pertimbangan bahwa telah mengukur capaian tugas dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Denpasar yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota dalam Penyusunan Kebijakan, Pengkoordinasian Administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif yang telah dibantu oleh masing-masing Asisten dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil review dan Klinik SAKIP yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar pada tanggal 7 September 2022, hal ini kembali menjadi pembahasan dengan pertimbangan bahwa IKU dengan indikator Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintahan tidak dapat memenuhi kriteria pengukuran IKU yaitu bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based). Sehingga disarankan untuk menggunakan IKU Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah untuk Tahun 2023 dan seterusnya selama Tahun Renstra 2021-2026 dengan target 100%. Terjadi perubahan indikator selaras dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang disusun untuk menyesuaikan adanya perubahan kelembagaan dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan juga telah menyesuaikan indikator sub kegiatan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



Tahun 2024, berdasarkan hasil pendampingan SAKIP Perangkat Daerah di Kota Denpasar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar bersama dengan Kementerian PAN dan RB melalui zoom meeting pada 5 Nopember Tahun 2024 menjadi pembahasan dengan pertimbangan bahwa IKU dengan indikator IKU Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah, untuk dapat diperbaharui kembali sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Tahun 2025 masih menggunakan Indikator sesuai tahun sebelumnya, untuk penyesuaian perubahan akan diusulkan di Tahun Renstra berikutnya.

Pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ada penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target di Sekretariat Daerah Kota Denpasar, penentuan tujuan ini memperhatikan kesesuaian terhadap RPJMD Kota Denpasar dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dalam membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini mulai dilaksanakan di periode Tahun 2026.



2.1.1 Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar	Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	%	139.358.695.566,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	Orang / Bulan	50.634.866.164,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	Orang / Bulan	50.634.866.164,00
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14	Dokumen	10.663.356.684,00
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14	Dokumen	10.663.356.684,00
			Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan	24	Laporan	32.664.839.500,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Laporan	32.664.839.500,00
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.912.994.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166	Unit	163.150.000,00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18	Unit	95.009.000,00
			Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan	142	Unit	1.587.040.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	Unit	2.067.795.000,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	5.840.974.218,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang / Bulan	2.752.781.618,00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang	60.000.000,00
			Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang	2	Orang /	3.028.192.600,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Bulan	
			Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	Paket	15.860.797.200,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	Paket	15.860.797.200,00
			Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik	100	%	157.208.000,00
				Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	12,87		
				Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	100	%	



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
				Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik	100	%	
				Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan	100	%	
				Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	100	%	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	43.426.000,00
			Sub Kegiatan Faslitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	25.600.000,00
			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	88.182.000,00
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100	%	19.623.659.800,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	11.310.370.800,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	7.823.444.000,00
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan	489.845.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Nilai	36.893.868.450,00
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%	
				Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100	%	
				Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100	%	
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Nilai	1.347.407.000,00
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dokumen	387.633.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	Dokumen	166.175.000,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	793.599.000,00
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%	29.805.961.050,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	Dokumen	16.735.851.000,00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	5	Dokumen	1.235.485.050,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
				Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5	Dokumen	11.834.625.000,00
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100	%	2.557.109.500,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5	Dokumen	991.086.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	Kasus	1.288.138.500,00
			Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dokumen	277.885.000,00
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100	%	3.183.390.900,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	Dokumen	23.400.000,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6	Dokumen	3.117.390.900,00
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Laporan	42.600.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100	%	606.862.900,00
				Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan	100	%	



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
				Sasaran			
				Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100	%	
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100	%	34.065.000,00
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen	4.245.000,00
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	20.800.000,00
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	9.020.000,00
			Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100	%	26.330.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	Dokumen	26.330.000,00
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100	%	65.279.900,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen	16.550.000,00
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	34.458.350,00
			Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi	3	Laporan	14.271.550,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Anggaran Perubahan)
			Uraian	Indikator			
			dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100	%	481.188.000,00
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5676	Dokumen	185.350.000,00
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44	Dokumen	147.750.000,00
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	Orang	148.088.000,00
TOTAL							176.859.426.916,00



Tabel 2.7 Laporan Evaluasi Rencana Kerja tiap Triwulan Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	393.765.553.749,30	98,35	225.407.424.159	100	139.358.695.566,00	12,60	16.199.139.470	29,05	26.496.266.187	22,42	25.237.835.014	33,15	45.508.807.381	97,22	113.442.048.052	97,22	81,40	97,55	338.849.472.211	79,82	86,05	Asisten Administrasi Umum	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	813	165.137.251.965	522	89.536.312.989	185	50.634.866.164,00	185	8.981.698.134	185	10.309.230.889	185	11.427.168.943	185	12.890.760.282,00	185	43.608.858.248	100,00	86,12	707	133.145.171.237	86,96	80,63	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	813	165.137.251.965	522	89.536.312.989	185	50.634.866.164,00	185	8.981.698.134	185	10.309.230.889	185	11.427.168.943	185	12.890.760.282,00	185	43.608.858.248	100,00	86,12	707	133.145.171.237,00	86,96	80,63	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I		II										III		IV		
			(Orang / Bulan)																							
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60	66.562.855.187	38	40.312.360.447	14	10.663.356.684,00	0	2.063.214.648	0	3.502.518.160	0	1.374.774.252	14	2.685.881.438,00	14	9.626.388.498	100,00	90,28	52	49.938.748.945	86,67	75,02	Bagian Umum Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60	66.562.855.187	38	40.312.360.447	14	10.663.356.684,00	0	2.063.214.648	0	3.502.518.160	0	1.374.774.252	14	2.685.881.438,00	14	9.626.388.498	100,00	90,28	52	49.938.748.945	86,67	75,02	Bagian Umum Setda Kota Denpasar
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralat	170	29.193.270.357	91	18.068.526.471	24	32.664.839.500	5	998.519.646	5	5.798.762.714	4	3.909.637.960	10	16.635.519.502,00	24	27.342.439.822	100,00	83,71	115	45.410.966.293	67,65	155,55	Bagian Umum Setda Kota Denpasar



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I	II	III	IV													
		Daerah	an dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																							
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	170	29.193.270.357	91	18.068.526.471	24	32.664.839.500	5	998.519.646	5	5.798.762.714	4	3.909.637.960	10	16.635.519.502,00	24	27.342.439.822	100,00	83,71	115	45.410.966.293,00	67,65	155,55	Bagian Umum Setda Kota Denpasar
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	8.372.400.000	100	2.514.429.450	100	3.912.994.000	17,50	39.743.750	29,25	261.188.719	18,25	779.710.033	35,00	1.825.116.383,00	100,00	74,26	67	5.420.188.335	67	64,74	Bagian Umum Setda Kota Denpasar		



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										I	II	III	IV													
			ntahan Daerah (Persen)																							
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	498	516.450.000	166	77.444.700	166	163.150.000	50	1.103.500	66	27.395.100	30	1.823.200	20	37.416.000,00	166	67.737.800	100,00	41,52	332	145.182.500,00	66,67	28,11	Bagian Umum Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	168	239.460.000	18	59.135.000	18	95.009.000	0	0	9	0	0	9	51.447.390,00	18	51.447.390	100,00	54,15	36	110.582.390,00	21,43	46,18	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	900	3.735.930.000	142	861.262.399	142	1.587.040.000	20	12.640.250	42	74.217.620	40	282.275.421	40	603.060.036,00	142	972.193.327	100,00	61,26	284	1.833.455.726,00	31,56	49,08	Bagian Umum Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Sarana	Jumlah Sarana	8	3.880.560.000	2	1.516.587.351	3	2.067.795.000	0	26.000.000	0	159.575.999	3	495.611	0	1.133.192.957,00	3	1.814.380.368	100,00	87,74	5	3.330.96	62,50	85,8	Bagian Umum



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I	II	III	IV													
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)									.412						7.718,80		4	Setda Kota Denpasar					
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	100	8.101.178.352	90,48	11.718.351.187	100	5.840.974.218	1,67	750.795.218	1,33	906.605.338	1,33	1.380.920.642	66,50	1.139.131.442,00	70,83	4.177.452.640	70,83	71,52	64,29	15.895.803.827	64,29	196,22	Bagian Umum Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan	Jumlah Orang	10	2.881.161.951	6	9.365.106.187	2	2.752.781.618	2	222.482.818	2	347.426.338	2	287.925.042,00	2	1.145.759.240	100,00	41,62	8	10.510,8	80,00	364,	Bagian Umum		



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I	II	III	IV													
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang / Bulan)																							
		Kegiatan Fasilitas Kerumahan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	85	34.994.788.279	51	28.257.971.593	17	15.860.797.200	4	1.559.738.543,00	6	2.718.527.877	2	2.639.894.613	5	4.650.301.700,00	17	11.568.462.733	100,00	72,94	68	39.826.434.326	80,00	113,81	Bagian Umum Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	85	34.994.788.279	51	28.257.971.593	17	15.860.797.200	4	1.559.738.543	6	2.718.527.877	2	2.639.894.613	5	4.650.301.700,00	17	11.568.462.733	100,00	72,94	68	39.826.434.326,00	80,00	113,81	Bagian Umum Setda Kota Denpasar



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					10	11		12	I	II	III			IV	10			11	12	80	80
		Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik (Persen)	100	100	100					100	100	80	80							
			Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	13	11,68	12,87					11,68	11,68	93,07	11,68	89,85						
			Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	100	944.205.608,90	363.664.399,00	157.208.000,00	5.625.000	46.504.040	27.505.012	29.671.995,00	109.306.047	69,53	80	472.970.446,00	80	50,09	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar			



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I	II	III	IV													
			Analisis Jabatan (Dokumen)																							
		Sub Kegiatan Faslitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	5	83.004.940	3	14.673.380,00	1	25.600.000	0	750.000	0	3.525.000	0	7.900.000	1	10.372.000,00	1	22.547.000	100,00	88,07	4	37.220.380,00	80,00	44,84	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	10	634.167.263	6	140.309.736,00	2	88.182.000	0	3.975.000	1	37.979.040	0	2.400.000	1	19.299.995,00	2	63.654.035	100,00	72,18	8	203.963.771,00	80,00	32,16	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	Persentase terlaksananya pelayanan	100	88.832.004.000	100	34.635.807.623	100	19.623.659.800	25	1.799.804.531	25	2.952.928.450	25	3.698.223.559	25	5.652.424.639	100,00	14.103.381.179	100,00	71,87	80,00	48.739.188.802	80,00	54,87	Bagian Protokol dan Komunikasi



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I	II	III	IV													
		asi Pimpinan	keprotokolan dan komunikasi pimpinan (Persen)																			Pimpinan Setda Kota Denpasar				
		Sub Kegiatan Fasilitasi Keptokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keptokolan (Laporan)	60	51.134.170.000	36	14.540.528.274	12	11.310.370.800,00	3	1.392.037.731	3	1.363.199.754	3	1.361.640.758	3	2.509.745.000,00	12	6.626.623.243	100,00	58,59	48	21.167.151.517,00	80,00	41,40	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	60	34.692.854.000	36	18.743.681.109	12	7.823.444.000,00	3	306.678.500	3	1.499.007.841	3	2.300.840.801	3	2.941.184.609,00	12	7.047.711.751	100,00	90,08	48	25.791.392.860,00	80,00	74,34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	20	3.004.980.000	12	1.351.598.240	4	489.845.000,00	1	101.088.300	0	90.720.855	0	35.742.000	3	201.495.030	4	429.046.185	100,00	87,59	16	1.780.644.425,00	80,00	59,26	Bagian Protokol dan Komunikasi



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										I				II													III				IV			
		Pimpinan	Pimpinan (Laporan)																							Pimpinan Setda Kota Denpasar								
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	16.752.664.400	Tinggi	3.153.875.648	Sangat Tinggi	1.347.407.000	0	227.710.000,00	0	219.064.024,00	0	208.620.631,00	89,6698337	422.741.587,00	89,67	1.078.136.242,00	89,67	80,02	89,67	4.232.011.890,00	89,67	25,26	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100	121.454.754.137	100	57.558.076.711	100	29.805.961.050	0,00	1575126000,00	0	8.408.102.290,00	0,00	6.477.795.311,00	100,00	12.462.781.491,00	100,00	28.923.805.092,00	100,00	97,04	80,00	86.481.881.803,00	80,00	71,21									
			Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan	100	9.539.925.029	100	5.456.677.849	100	2.557.109.500	2,46	63.000.000,00	46	892.500.000,00	19,77	553.542.636,00	31,29	987.176.320,00	100,00	2.496.218.956,00	100,00	97,62	82,22	7.952.896.805,00	82,22	83,36									



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										I		II											III		IV	
			HAM (Persen)																							
			Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Persen)	100	2.600.772.600	100	2.595.613.846	100	3.183.390.900	0,90	5.600.000,00	1	26.488.341,00	3,51	21.698.668,00	94,32	2.953.820.959,00	100,00	3.007.607.968,00	100,00	94,48	86,94	5.603.221.814,00	86,94	215,44	
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	16.752.664.400	Tinggi	3.153.875.648	Sangat Tinggi	1.347.407.000,00	0	227.710.000	0	219.064.024	0	208.620.631	89,67	422.741.587	89,67	1.078.136.242	89,67	80,02	89,67	4.232.011.890	89,67	25,26	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	15	2.745.247.700	9	1.439.199.178	3	387.633.000,00	-	189.275.000	0	11.595.026	0	140.940.450	3	3.725.000	3	345.535.476	100,00	89,14	12	1.784.734.654,00	80,00	59,74	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	11	1.353.471.000	6	38.261.100	4	166.175.000	-	0	0	3.750.000	0	0	4	124.746.750	4	128.496.750	100,00	77,33	10	166.757.850,00	90,91	12,32	Bagian Tata Pemerintahan Setda



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										I		II											III		IV	
		asi Kewilayahan	Administrasi Kewilayahan (Dokumen)																			Kota Denpasar				
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	12	12.653.945.700	8	1.676.415.370	4	793.599.000,00	2	38.435.000	1	203.718.998	0	67.680.181	1	294.269.837	4	604.104.016	100,00	76,12	12	2.280.519.386,00	100,00	18,02	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100	121.454.754.137	100	57.558.076.711	100	29.805.961.050,00	0	1.575.126.000	0	8.408.102.290	0	6.477.795.311	100,00	12.462.781.491	100,00	28.923.805.092	100,00	97,04	80,00	86.481.881.803	80,00	71,21	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina	20	70.104.109.709	12	37.363.760.255	4	16.735.851.000,00	0	1.574.526.000	0	3.650.752.000	0	4.527.827.311	4	6.523.644.439	4	16.276.749.750	100,00	97,26	16	53.640.510.005,00	80,00	76,52	Bagian Kesejahteraan Rakyat



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										I	II	III	IV													
			Mental Spiritual (Dokumen)																							
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan	25	9.157.072.315	15	2.706.243.256	5	1.235.485.050,00	0	600.000	0	437.900.290	0	121.093.000	5	304.439.677	5	864.032.967	100,00	69,93	20	3.570.276.223,00	80,00	38,99	Bagian Kesejahteraan Rakyat



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I	II	III	IV													
			Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)																							
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata	25	42.193.572.113	15	17.488.073.200	5	11.834.625.000,0	0	0	0	4.319.450.000	0	1.828.875.000	5	5.634.697.375	5	11.783.022.375	100,00	99,56	20	29.271.095.575,00	80,00	69,37	Bagian Kesejahteraan Rakyat



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										I	II	III	IV											
			ta, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)																					
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM (Persen)	100	9.539.925.029	100	5.456.677.849	100	2.557.109.500,00	2,46	63.000.000	46,48	892.500.000	19,77	553.542.636	31,29	987.176.320	100,00	97,62	82,22	7.952.896.805	82,22	83,36	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokum	25	4.008.670.411	15	2.195.076.914	5	991.086.000,00	2	21.000.000	1	375.000.000		201.115.666	1	385.747.310	5	99,17	20	3.177.939.890,00	80,00	79,28	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I		II										III		IV		
		Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	15	3.594.302.380	9	2.554.482.667	3	1.288.138.500,00	1	12.000.000	1	487.500.000	1	459.164.265	4	1.251.091.265	100,00	97,12	13	3.805.573.932,00	86,67	105,88	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar		
		Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	500	1.936.952.238	300	707.118.268	100	277.885.000,00	25	30.000.000	25	30.000.000	25	59.999.970	25	142.264.745	100,00	94,38	400	969.382.983,00	80,00	50,05	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar		
		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerjasama Daerah (Persen)	100	2.600.772.600	100	2.595.613.846	100	3.183.390.900	0,90	5.600.000	1,27	26.488.341	3,51	21.698.668	94,32	2.953.820.959	100,00	94,48	86,94	5.603.221.814	86,94	215,44	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar		
		Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	120	702.086.500	97	175.98	25	23.400.000	6	0	4	2.539.5	9	1.648.9	6	16.687.0	25	20.875.518	100,00	89,21	122	196.859.	101,67	28,0	Bagian Kerjas



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										I	II	III	IV													
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	n Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)			4.027					06		50		62					545,00		4	ama Setda Kota Denpasar			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (dokumen)	24	1.587.326.000	13	2.326.213.256	6	3.117.390.900	0	0	0	23.948.835	6	20.049.718	0	2.900.430.494	6	2.944.429.047	100,00	94,45	19	5.270.642.303,00	79,17	332,05	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	5	311.360.100	3	93.416.563	1	42.600.000	0	5.600.000	0	-	0	-	1	36.703.403	1	42.303.403	100,00	99,30	4	135.719.966,00	80,00	43,59	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBAHNGUNA	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang	100	5.186.739.354,00	100	839.314.592	100	60.395.000,00	8,33	2.895.000	25,00	3.100.000,00	25,00	12.999.750,00	41,67	22.096.745	100,00	41.091.495	100,00	68,04	100,00	880.406.087,00	70,00	16,97	Asisten Perekonomian dan Pembangu



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab												
										I													II				III				IV			
		N	ditindaklanjuti (Persen)																				n											
			Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran (Persen)	100	3.304.011.014,20	100	1.780.632.476	100	65.279.900,00	0,33	1.125.000,00	25,00	18.472.900,00	25,00	13.125.173,00	49,67	25.199.164,00	100,00	57.922.237,00	100,00	88,73	80,00	1.838.554.713,00	80,00	55,65									
			Persentase Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti (Persen)	100	5.869.539.658,00	100	3.062.063.750	100	481.188.000,00	25	64.025.000	25	101.440.398	25	104.463.655	25	157.728.900	100,00	427.657.953	100,00	88,88	100,00	3.489.721.703	100,00	59,45									
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	Persentase Kebijakan	100	4.160.213.199,00	100	764.708.092	100	34.065.000,00	16,67	2.895.000	25,00	2.800.000	25,00	9.399.750	33,33	11.342.625	100,00	26.437.375	100,00	77,61	80,00	791.145.467,00	80,00	19,02	Bagian Perekonomi								



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										I	II	III	IV													
		n Perekonomian	Perekonomian Yang ditindaklanjuti (Persen)																			an Setda Kota Denpasar				
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	10	2.289.880.250,00	4	197.374.992	2	4.245.000	0	0	0	0	0	2	1.567.875,00	2	1.567.875	100,00	36,93	6	198.942.867,00	60,00	8,69	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20	1.453.149.805,00	12	152.600.000	4	20.800.000	1	2.325.000	1	2.575.000	1	6.000.000	1	8.199.750,00	4	19.099.750	100,00	91,83	16	171.699.750,00	80,00	11,82	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
								I	II	III	IV															
			(Dokumen)																							
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5	417.183.144,00	3	414.733.100	1	9.020.000	0	570.000	0	225.000	0	3.399.750	1	1.575.000,00	1	5.769.750	100,00	63,97	4	420.502.850,00	80,00	100,00	Bagian Perencanaan Setda Kota Denpasar
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti (Persen)	100	1.026.526.155,00	100	74.606.500	100	26.330.000	0,00	0	25,00	300.000	25,00	3.600.000	50,00	10.754.120,00	100,00	14.654.120	100,00	55,66	60,00	89.260.620,00	60,00	8,70	Bagian Perencanaan Setda Kota Denpasar
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	5	1.026.526.155,00	2	74.606.500	1	26.330.000	0	0	0	300.000	0	3.600.000	1	10.754.120,00	1	14.654.120	100,00	55,66	3	89.260.620,00	60,00	8,70	Bagian Perencanaan Setda Kota Denpasar



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										I	II	III	IV													
		n, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)																							
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran (Persen)	100	3.304.011.014,20	60	1.780.632.476	100	65.279.900,00	5,40	1.125.000	26,89	18.472.900	22,22	13.125.173	45,49	25.199.164	100,00	57.922.237	100,00	88,73	80,00	1.838.554.713,00	80,00	55,65	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar
		Sub	Jumlah	10		6	39.254.	2		0	525.000	0		2	1.643.3	0		2	11.594.2	100,	70,0	8		80,0	Bagian	



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										I		II										III		IV	
		Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1.008.091.451,70	650		16.550.000,00				3.415.200	55		6.010.709,00		6400	6		50.848.914,00	0	5,04	Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar			
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dokumen)	5 477.062.325,00	3 105.058.150	1 34.458.350,00	0 300.000	0 10.393.350	0 11.181.818	1 11.682.166,00	1 33.557.334	100,00	97,39	4 138.615.484,00	80,00	29,06			Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar						
		Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Peman	15 1.818.857.237,50	9 1.636.319.676	3 14.271.550,00	1 300.000	0 4.664.350	0 300.000	2 7.506.289,00	3 12.770.639	100,00	89,48	12 1.649.090.315,00	80,00	90,67			Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar						



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										I	II	III	IV													
		Elektronik	Elektronik (Dokumen)																			Denpasar				
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	500	458.570.390,00	950	825.783.541	150	148.088.000,00	150	1.800.000	0	24.875.898	0	24.573.655,00	0,00	46.008.400	150	97.257.953	100,00	65,68	1100	923.041.494,00	100,00	201,29	Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kota Denpasar
Rata - rata capaian kinerja (%)																98,36	84,52			83,58	80,46					
																SANGGI	TINGGI			TINGGI	TINGGI					
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya standar Penilaian Kinerja baik internal maupun eksternal dan tujuan organisasi yang telah dirumuskan dalam perencanaan ; - Adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelaksanaan tugas ; - Perkembangan teknologi yang dapat membantu mendukung pelaksanaan tugas ; <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan realisasi keuangan yang belum sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan ; - Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan permohonan masyarakat yang bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi ; - Kurangnya pemahaman dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam menganalisa - Beberapa perangkat daerah relisasi fisik dan keuangannya tidak mencapai target <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :</p>																										



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Tahun 2022 s/d 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
							I	II	III	IV					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya *) :															
Rekomendasi Tindak Lanjut : - Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait pelaksanaan tugas (baik internal maupun eksternal) ; - Menyusun perencanaan kegiatan maupun anggaran tahun berikutnya dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya; - Pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada anggaran kas dan timeline kegiatan ; - Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait untuk menjaga agar proses pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu untuk tahun berikutnya ; - Memperhatikan anggaran kas dalam pelaksanaan kegiatan															

*Diisi Oleh Kepala Bappeda

Kelengkapan data Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulannya (Evaluasi Renja) Tahun 2025, telah terdokumentasi serta telah diadakan rapat disetiap Triwulan bersama dengan Bagian-Bagian di Sekretariat Daerah Kota Denpasar (bukti dukung berupa notulen dan dokumentasi rapat).

2.2.3 Indikator Kinerja Utama

Tugas:

Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1. merumuskan program kerja Sekretariat Daerah berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas tanggungjawab, permasalahan dan hambatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyiapkan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. membina ASN dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
8. memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

*Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah (PD) adalah Indikator Kinerja Utama yang menjadi alat ukur keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel	Indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai dibagi Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah x100%	Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah	100%

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen pengukuran oleh Kementerian Hukum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola regulasi, deregulasi, dan penguatan sistem hukum di	Indeks Reformasi Hukum diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan indikator penilaian sebagai berikut : 1. Tingkat koordinasi Kementerian	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	90-100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
		kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian ini bertujuan menciptakan regulasi yang bersih, akuntabel, dan mendukung investasi, dengan fokus pada harmonisasi, kompetensi perancang peraturan, dan pemutakhiran data hukum.	Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%); 2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) pusat yang berkualitas (bobot 25%); 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%); 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)			
	Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	Indeks Kualitas Kebijakan diperoleh dari penilaian LAN RI dengan menilai kebijakan yang disusun dalam kurun waktu 3 tahun sebelum tahun pengukuran dan telah berlaku efektif 1 tahun dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Kerangka instrumen IKK terdiri dari 2 dimensi yaitu Dimensi Perencanaan Kebijakan dan dimensi Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan. Dimensi ini kemudian terbagi atas 4 Sub dimensi, 13 indikator dan 39 pertanyaan. Adapun nilai akhir IKK terdiri dari predikat sebagai berikut : 1. 91.00 - 100 predikat Unggul 2. 80.00 - 90.00 predikat Sangat Baik 3. 65.00 - 79.99 predikat Baik 4. 50.00 - 64.99 predikat Cukup	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	(Nilai) 80.00-90.99



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
			5. < 50.00 predikat Kurang			
Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD (Nilai)	Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah skor hasil evaluasi pusat terhadap kinerja pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam satu tahun anggaran. Penilaian mencakup capaian kinerja makro (IPM, kemiskinan, pengangguran) serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Penghitungan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. dan berdasarkan skor kinerja yang diperoleh, maka disusun rangking kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota. Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan kedalam 5 (lima) klasifikasi. Nilai LPPD berdasarkan EKPPD: NO Skor Kinerja Status Kinerja 1. 1.00-1.80 Sangat Rendah 2. 1.81-2.60 Rendah 3. 2.61-3.40 Sedang 4. 3.41-4.20 Tinggi 5. 4.21-5.00 Sangat Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah	3.41-4.20
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	Komponen pelaporan kinerja dalam SAKIP mengukur transparansi dan akurasi laporan kinerja (LKjIP) untuk memastikan pertanggungjawaban serta umpan balik perbaikan. Penilaian difokuskan pada keberadaan,	Nilai Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen dari penilaian SAKIP. Bobot Maksimal dalam penilaian Pelaporan Kinerja adalah 15. Penilaian Pelaporan Kinerja dilakukan oleh Tim Evaluator Kemenpan RB	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah	11,7



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
		kualitas, dan pemanfaatan laporan, dengan bobot yang signifikan dalam evaluasi tahunan. Laporan ini harus memuat realisasi kinerja terhadap target.				
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah indikator kinerja yang ditetapkan LKPP untuk mengukur tingkat kematangan, profesionalisme, dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah. ITKP merupakan bagian penting dari evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencakup aspek SDM, kelembagaan, dan pemanfaatan sistem elektronik (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak)	Indeks Tata Kelola Pengadaan diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia dengan indikator penilaian sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang terdiri dari SiRUP, E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat), E-Purchasing, Non E-Tendering & Non E-Purchasing dan E-Kontrak (bobot 30%); 2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PB) (bobot 30%); 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (bobot 40%).	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris Daerah	90.01-99.99
Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM (Nilai)	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) adalah hasil kuantitatif dari survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan	Nilai SKM diperoleh berdasarkan hasil kompilasi dari seluruh nilai SKM Perangkat Daerah. Dimana dalam pelaksanaannya SKM mempedomani Permenpan 14 Tahun 2017 yakni	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah	88.31-100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
		tujuan sebagai tolok ukur perbaikan mutu pelayanan oleh instansi pemerintah	menilai 9 unsur dari proses penyelenggaraan layanan pada masing-masing Perangkat Daerah			
	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM) adalah nilai yang menunjukkan persentase capaian mutu layanan dasar yang berhak diterima setiap warga negara, hasil dari perkalian persentase capaian mutu dengan bobot pelayanan dasar. Indeks ini menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam urusan wajib (pendidikan, kesehatan, PU, perumahan, sosial, trantibumlinmas) sesuai Permendagri 59/2021.	IP SPM diperoleh dari Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan indikator penilaian sebagai berikut: 1. Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan Dasar (bobot 20 %); 2. Indeks pencapaian Penerima Pelayanan Dasar (bobot 80 %)	Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah	99.01-100



❖ Diagram Crosscutting

Diagram crosscutting merupakan dokumen yang menunjukkan kesinambungan antar unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja (kegiatan yang diampu lebih dari 1 bidang/ perangkat daerah). Pada Sekretariat Daerah Tahun 2025, ada 1 kegiatan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggungjawaban) Kepala Daerah yang awalnya diampu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar menjadi diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar.



BAB III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate yang diemban. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator kinerja Utama. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proposional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya. Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program yang telah dirumuskan dan penjabaran dari kebijakan, serta merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja di Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Capaian kinerja tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025*

Tahun	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2023	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola	Persentase Pencapaian	100%	87,95%	87,95%
2024	Kepemerintahan Yang Baik Di Kota Denpasar	IKU Perangkat Daerah	100%	88,10%	88,10%
2025	Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)		100%	84,09%	84,09%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025	Target Akhir Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Di Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	84,09%	100%	84,09%

Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah selaras dengan tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperoleh gambaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dalam melaksanakan ketatausahaan kesekretariatan guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama indikator tersebut digunakan sebagai tolok ukur kinerja organisasi dengan capaian 87,95%. Artinya melalui perhitungan indikator tersebut dengan perhitungan Persentase indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai dibagi Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah x100%.

Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Denpasar masih sama menggunakan indikator Pencapaian IKU Perangkat Daerah sebagai tolok ukur kinerja organisasi dengan capaian 88,10% yang mengalami peningkatan dari capaian sebelumnya. Artinya melalui perhitungan indikator tersebut dengan perhitungan Persentase indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai dibagi Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah x100%.

Tahun 2025 IKU Sekretariat Daerah yaitu Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah tidak mencapai target 100% dengan capaian 84,09%, oleh karena ada beberapa IKU Perangkat Daerah yang tidak tercapai serta nilai IKU Perangkat Daerah beberapa ada yang rilis nilainya. Alasan tidak tercapainya IKU Perangkat Daerah oleh karena masih kurangnya pengkajian dalam penentuan target indikator serta formulasi penentuan IKU yang masih belum tepat dan efektif untuk dilaksanakan dalam mendukung sasaran kerjanya serta belum optimalnya sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Denpasar Jangka Menengah (2022-2026)

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Vol	Rp	Vol	%	Rp	%
2022	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintahan	100%	Rp84.338.552.826,00	100,78%	100,78%	Rp77.796.790.621,00	92,24
2023	Persentase	100%	Rp105.981.077.418,00	87,95%	87,95%	Rp92.722.759.975,00	87,49%
2024	Pencapaian	100%	Rp158.591.956.096	88,10 %	88,10 %	129.533.129.034,80	81,68
2025	IKU Perangkat Daerah	100%	176.859.426.916,00	84,09%	84,09%	149.474.487.995,00	84,52%
2026	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))	90-100	Rp145.385.627.510,00	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	80.00-90.99					
	Nilai LPPD (Nilai)	3.41-4.20					
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,7					
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	90.01-99.99					
	Nilai SKM (Nilai)	88.31-100					
	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))	99.01-100					

Evaluasi Pelaksanaan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Jangka Menengah (Renstra) dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan dari tahun ke tahun (Jangka Menengah Tahun 2022-2026) Sekretariat Daerah Kota Denpasar serta memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah dalam tahun Renstra dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pada Tahun 2022 melalui sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang, indikator Sekretariat Daerah Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintahan yang diukur dengan persentase indikator kegiatan yang dicapai dibagi jumlah indikator dikali 100%, dengan pertimbangan bahwa telah mengukur capaian tugas dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Denpasar yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota dalam Penyusunan Kebijakan, Pengkoordinasian Administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif yang telah dibantu oleh masing-masing Asisten dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, melalui indikator tersebut tercapai sebesar 100,78% dari target yang ditetapkan 100% serta untuk realisasi keuangannya sebesar 92,24%.

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil review dan Klinik SAKIP yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar pada tanggal 7 September 2022, hal ini kembali menjadi pembahasan dengan pertimbangan bahwa IKU dengan indikator Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintahan tidak dapat memenuhi kriteria pengukuran IKU yaitu bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based). Sehingga disarankan untuk menggunakan IKU Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah untuk Tahun 2023 dan seterusnya selama Tahun Renstra 2021-2026 dengan target 100%. Terjadi perubahan indikator selaras dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang disusun untuk menyesuaikan adanya perubahan kelembagaan dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan juga telah menyesuaikan indikator sub kegiatan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, indikator tersebut tercapai sebesar 87,95% dengan realisasi anggaran 87,49%.

Tahun 2024, berdasarkan hasil pendampingan SAKIP Perangkat Daerah di Kota Denpasar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar bersama dengan Kementerian PAN dan RB melalui zoom meeting pada 5 Nopember Tahun 2024 menjadi pembahasan dengan pertimbangan bahwa IKU dengan indikator IKU Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah, untuk dapat diperbaharui kembali sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan. Sesuai dengan arahan dan masukan dari Kementerian PAN dan RB, perlu pembaharuan IKU Setda agar selaras dengan tugas kesekretariatan (internal), beberapa opsi dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar dalam penggunaan indikator seperti menggunakan Indeks Reformasi Hukum, IP SPM, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pelayanan Publik sertda Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah. Namun selama masih dalam tahun Renstra menggunakan IKU Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah tetap dijadikan acuan untuk Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh hasil dari indikator tersebut tercapai sebesar 88,10% dengan realisasi anggaran sebesar 81,68%

Tahun 2025, IKU Sekretariat Daerah yaitu Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah tidak mencapai target 100% oleh karena ada beberapa IKU Perangkat Daerah yang tidak tercapai. Dari 88 IKU, IKU OPD yang tercapai 74 IKU, tidak tercapai 14 IKU, belum dirilis nilainya 0 IKU ($74/88 \times 100\%$ diperoleh 84,09%)

Berdasarkan Renstra Sekretariat daerah Kota Denpasar tahun 2025-2029, mulai di Tahun 2026 adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan akuntabilitas kinerja. Perubahan ini bertujuan memastikan indikator tetap relevan dengan visi-misi, isu strategis, serta mendukung capaian sasaran RPJMD secara efisien dan akuntabel. Sekretariat Daerah mengampu 7 IKU di Tahun 2026.

❖ **Perbandingan dengan Capaian Nasional****Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Denpasar dengan Capaian Nasional**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	88,75% (Nilai LPPD Kota Denpasar Skor 3,7751)	Provinsi DKI Jakarta (Skor 3,6684)	Kota Surakarta (Skor 3,7916)	102,9%	99,5%

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada dasarnya merupakan Laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (desentralisasi), maupun Tugas Pembantuan, serta Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka setiap tahun Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023. Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bali mendapatkan skor 3,4584 dengan status "Tinggi". Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Kota Denpasar 3,7751 dengan status "Tinggi". Penghitungan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro dan berdasarkan skor kinerja yang diperoleh, maka disusun rangking kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota.

Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan kedalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan EKPPD:

No Skor Kinerja Status Kinerja

1. 1.00-1.80 Sangat Rendah
2. 1.81-2.60 Rendah
3. 2.61-3.40 Sedang
4. 3.41-4.20 Tinggi
5. 4.21-5.00 Sangat Tinggi

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Pengukuran Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Denpasar ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Pengumpulan Data Penyusunan LKjIP Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Denpasar menggunakan aplikasi *Google Spreadsheet* baik pengumpulan di Bagian-bagian Sekretariat Daerah maupun Data Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. *Google Spreadsheet* merupakan aplikasi *spreadsheet* online yang memungkinkan membuat dan memformat spreadsheet, serta dapat bekerja secara bersamaan.

Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Vol		Rp		Vol	%	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	%	139.358.695.566,00	100	%	100	113.442.048.052,00	81,40%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	Orang / Bulan	50.634.866.164,00	185	Orang / Bulan	100	43.608.858.248,00	86,12%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	Orang / Bulan	50.634.866.164,00	185	Orang / Bulan	100	43.608.858.248,00	86,12%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14	Dokumen	10.663.356.684,00	14	Dokumen	100	9.626.388.498,00	90,28%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14	Dokumen	10.663.356.684,00	14	Dokumen	100	9.626.388.498,00	90,28%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	24	Laporan	32.664.839.500,00	24	Laporan	100	27.342.439.822,00	83,71%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
Pemerintahan Daerah	Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Laporan	32.664.839.500,00	24	Laporan	100	27.342.439.822,00	83,71%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.912.994.000,00	100	%	100	2.905.758.885,00	74,26%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166	Unit	163.150.000,00	166	Unit	100	67.737.800,00	41,52%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18	Unit	95.009.000,00	18	Unit	100	51.447.390,00	54,15%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK			KEUANGAN	
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142	Unit	1.587.040.000,00	142	Unit	100	972.193.327,00	61,26%
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	Unit	2.067.795.000,00	3	Unit	100	1.814.380.368,00	87,74%
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	5.840.974.218,00	70,83	%	70,83	4.177.452.640,00	71,52%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang / Bulan	2.752.781.618,00	2	Orang / Bulan	100	1.145.759.240,00	41,62%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	8	Orang	60.000.000,00	1	Orang	12,5	3.893.400,00	6,49%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
Kepala Daerah	Kepala Daerah								
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang / Bulan	3.028.192.600,00	2	Orang / Bulan	100	3.027.800.000,00	99,99%
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	Paket	15.860.797.200,00	17	Paket	100	11.568.462.733,00	72,94%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	Paket	15.860.797.200,00	17	Paket	100	11.568.462.733,00	72,94%
Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik	100	%	157.208.000,00	100	%	100	109.306.047,00	69,53%
	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	12,87			12,06	nilai	93,71		
	Persentase PD yang memenuhi kepatuhan	100	%		100	%	100		



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
	Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009								
	Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik	100	%		100	%	100		
	Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan	100	%		100	%	100		
	Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	100	%		100	%	100		
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	43.426.000,00	2	Dokumen	100	23.105.012,00	53,21%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	25.600.000,00	1	Laporan	100	22.547.000,00	88,07%
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi	2	Dokumen	88.182.000,00	2	Dokumen	100	63.654.035,00	72,18%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
Birokrasi	Birokrasi								
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100	%	19.623.659.800,00	100	%	100	14.103.381.179,00	71,87%
Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	11.310.370.800,00	12	Laporan	100	6.626.623.243,00	58,59%
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	7.823.444.000,00	12	Laporan	100	7.047.711.751,00	90,08%
Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan	489.845.000,00	4	Laporan	100	429.046.185,00	87,59%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Nilai LPPD berdasarkan EKPPD: Skor Kinerja Status Kinerja 1. 1.00-1.80 Sangat Rendah	36.893.868.450,00	Tinggi	3.7751	89.67	35.505.768.258,00	96,24%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
			2. 1.81-2.60 Rendah 3. 2.61-3.40 Sedang 4. 3.41-4.20 Tinggi 5. 4.21-5.00 Sangat Tinggi						
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%		100	%	100		
	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100	%		100	%	100		
	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100	%		100	%	100		
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Nilai	1.347.407.000,00	Tinggi	Nilai	89.67	1.078.136.242,00	80,02%
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	387.633.000,00	3	Dokumen	100	345.535.476,00	89,14%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan								
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	Dokumen	166.175.000,00	4	Dokumen	100	128.496.750,00	77,33%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	793.599.000,00	4	Dokumen	100	604.104.016,00	76,12%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%	29.805.961.050,00	100	%	100	28.923.805.092,00	97,04%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	Dokumen	16.735.851.000,00	4	Dokumen	100	16.276.749.750,00	97,26%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi	5	Dokumen	1.235.485.050,00	5	Dokumen	100	864.032.967,00	69,93%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI					
		FISIK		FISIK		KEUANGAN			
		Vol	Rp	Vol	%	Rp	%		
	Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	5	Dokumen	11.834.625.000,00	5	Dokumen	100	11.783.022.375,00	99,56%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
	Kearsipan, Trantibum Linmas								
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100	%	2.557.109.500,00	100	%	100	2.496.218.956,00	97,62%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5	Dokumen	991.086.000,00	5	Dokumen	100	982.862.976,00	99,17%
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	Kasus	1.288.138.500,00	3	Kasus	100	1.251.091.265,00	97,12%
Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dokumen	277.885.000,00	100	Dokumen	100	262.264.715,00	94,38%
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100	%	3.183.390.900,00	100	%	100	3.007.607.968,00	94,48%
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam	25	Dokumen	23.400.000,00	25	Dokumen	100	20.875.518,00	89,21%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK			KEUANGAN	
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
	Negeri								
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6	Dokumen	3.117.390.900,00	6	Dokumen	100	2.944.429.047,00	94,45%
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Laporan	42.600.000,00	1	Laporan	100	42.303.403,00	99,30%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100	%	606.862.900,00	100	%	100	526.671.685,00	86,79%
	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100	%		100	%	100		
	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100	%		100	%	100		
Kegiatan Pelaksanaan	Persentase Kebijakan	100	%	34.065.000,00	100	%	100	26.437.375,00	77,61%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
Kebijakan Perekonomian	Perekonomian Yang ditindak lanjuti								
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen	4.245.000,00	2	Dokumen	100	1.567.875,00	36,93%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	20.800.000,00	4	Laporan	100	19.099.750,00	91,83%
Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	9.020.000,00	1	Dokumen	100	5.769.750,00	63,97%
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100	%	26.330.000,00	100	%	100	14.654.120,00	55,66%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	1	Dokumen	26.330.000,00	1	Dokumen	100	14.654.120,00	55,66%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja								
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100	%	65.279.900,00	100	%	100	57.922.237,00	88,73%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen	16.550.000,00	2	Dokumen	100	11.594.264,00	70,06%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	34.458.350,00	1	Laporan	100	33.557.334,00	97,39%
Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	3	Laporan	14.271.550,00	3	Laporan	100	12.770.639,00	89,48%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		Vol		Rp	Vol	%	Rp	%	
dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100	%	481.188.000,00	100	%	100	427.657.953,00	88,88%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5676	Dokumen	185.350.000,00	5.676	Dokumen	100	182.650.000,00	98,54%
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44	Dokumen	147.750.000,00	44	Dokumen	100	147.750.000,00	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	Orang	148.088.000,00	150	Orang	100	97.257.953,00	65,68%

Dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu, Efisiensi artinya menggunakan sumber daya yang minimal menghasilkan output yang maksimal yang merupakan perbandingan antara input dan output. Pada tabel diatas, menjabarkan capaian fisik yang sudah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil dari yang dianggarkan (efisien).

Dari tabel di atas menjabarkan bahwa,

- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui indikator Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target 100% terealisasi 70,83% (rerata persentase dari 3 sub kegiatan pengampu) belum terealisasi sesuai target oleh karena menunjang Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target 8 orang terealisasi 1 orang sehingga persentasenya 12,5%.

Tahun 2025 jumlah orang yang melakukan medical check up adalah 1 orang dimana target yang direncanakan adalah 8 orang, sehingga hasil pencapaian target kinerja pada indikator dimaksud adalah 12,5%. Untuk tahun sebelumnya di Tahun 2024 menargetkan 7 orang yang terealisasi 1 orang, Tahun 2025 membuat target 8 orang oleh karena dalam menyusun perencanaan target, timeline bertepatan dengan pemilu sehingga direncanakan walikota dan wakil walikota diperuntukan masing-masing 2 anak sehingga Menyusun target sebanyak 8 orang. Bagian Umum untuk tahun 2026 telah memetakan target sebanyak 7 orang.

- Kegiatan Penataan Organisasi melalui salah satu indikator Nilai Capaian Pelaporan Kinerja dengan target 12,87 untuk Tahun 2025 hasil telah keluar dari Kemenpan RB, sebesar 12,06 dengan konversi persentase 93,71%. Nilai Tahun sebelumnya 11,68 dari target 12,55 (capaian 93%). Penentuan target yang meningkat dari tahun 2024 12,55 ke Tahun 2025 12,87 oleh karena menyesuaikan dengan Data Renstra Tahun 2021-2026.

Nilai Capaian Pelaporan Kinerja tercapai 93,71% oleh karena menargetkan target yang terlalu tinggi namun realisasi dari tahun sebelumnya meningkat capaiannya (Nilai meningkat dari 11,63 menjadi 11,68 dan 12,06 namun belum mencapai target yang ditetapkan 12,87).

Bagian Organisasi telah memetakan penyesuaian target target untuk tahun Renstra 2025-2029 yaitu 11,70.

- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan melalui indikator Nilai LPPD dengan target Sangat Tinggi terealisasi Tinggi, belum mencapai target oleh karena nilai belum rilis.

Data masih menggunakan capaian tahun lalu yaitu 3.7751 dengan konversi persentase 89,67%. Target yang digunakan masih menggunakan tahun Renstra 2021-2026, serta adanya perubahan interval penilaian oleh Pusat sehingga belum tercapai targetnya.

Capaian nilai LPPD Tahun 2023 adalah 3,4439 dengan status “Tinggi” sehingga realisasinya baru 81,8%, adanya perubahan interval penilaian berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020, dimana dari 4 interval menjadi 5 interval. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi LPPD untuk capaian nilai dari 3,00-4,00 termasuk “Sangat Tinggi”. Permendagri 18 Tahun 2018 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan untuk capaian nilai 3,41-4,21 dengan status “Tinggi” dan dari 4,21-5,00 termasuk “Sangat Tinggi”. Belum ada kota di Indonesia yang capaiannya sangat tinggi dan hanya 3 kota yang sudah mencapai tinggi

Untuk di Tahun 2026 dengan acuan data Renstra 2025-2029 Bagian Tata Pemerintahan telah memetakan perencanaan untuk target menggunakan telah menggunakan interval yaitu 3.41-4.20

*Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025*

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Fisik			Anggaran			Tingkat efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar / Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%	84,09%	84,09%	176.859.426.916,00	149.474.487.995,00	84,52%	15,48%

Tahun 2023 persentase serapan anggaran sebesar 87,49% dalam memenuhi sasaran strategis Sekretariat daerah Kota Denpasar dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar / Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah) melalui IKUnya yang telah tercapai yaitu 87,95%. Rincian dari analisis efisiensi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebesar Rp 13.258.317.443,00 rincian tercantum pada Akuntabilitas Kinerja (Analisis Sisa Anggaran).

Tahun 2024 adanya peningkatan kinerja serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut sesuai dengan data diatas yang menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar / Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah) untuk Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 158.591.956.096,00 dan terealisasi sebesar Rp 129.533.129.034,80, meliputi



Belanja Operasi sebesar Rp146.759.843.096 dengan realisasi Rp 125.695.549.034,80 atau 85,65%; Belanja Modal sebesar Rp11.832.113.000, dengan realisasi Rp 3.837.580.000,00 atau 32,43%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 129.533.129.034,80.

Tahun 2025 adanya peningkatan kinerja serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut sesuai dengan data diatas yang menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar / Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah) untuk Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp 176.859.426.916,00 dan terealisasi sebesar Rp 149.474.487.995,00, meliputi Belanja Operasi sebesar Rp 160.187.126.916,00 dengan realisasi Rp 134.736.177.362,00 atau 84,11%; Belanja Modal sebesar Rp 16.672.300.000,00, dengan realisasi Rp 14.738.310.633,00 atau 88,40%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 27.384.938.921,00.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Kota Denpasar Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%	84,09%	84,09%

NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,78	11,64	TT
			2. Angka Harapan Lama Sekolah	14,13	14,14	T



NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
		2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	100%	100%	T
		3. Meningkatnya prestasi olahraga	1. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Event Olahraga	240 Medali	367 Medali	T
2	DINAS KESEHATAN	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	75,84 tahun	76,16	T
	RSUD WANGAYA	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Survey Kepuasan Masyarakat	89,16	89,16	T
		2. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	2. Lulus Akreditasi	Paripurna	paripurna	T
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	1. Persentase capaian kualitas infrastruktur	64,96%	83,65%	T
		2. Meningkatkan kualitas penataan ruang	2. Prosentase ketaatan terhadap RTRW	97,00%	97,91%	T
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang didukung PSU yang memadai	1. Persentase rumah tidak layak huni yang terbangun	94,53%	94,51%	TT
			2. Persentase penurunan luasan permukiman kumuh	0,02%	0,04%	T
			3. Persentase PSU Perumahan yang terfasilitasi	100%	95,02%	TT
		2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1. Persentase tanah fasos fasum yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Denpasar	85%	83,01%	TT
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	1. Indeks resiko bencana (IRBI)	90,1	103,31	TT
6	DINAS PEMADAM	2. Meningkatnya pelayanan	2. Tingkat Waktu tanggap (Respon	12 menit	8,66 Menit	T



NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	penanggulangan kebakaran	Time Rate)			
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar Meningkatkan	1. Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	96,98%	97.37%	T
8	DINAS SOSIAL	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase (%) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terlayani	100%	100%	T
9	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	1. Mengurangi Angka Pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10%	1,41%	T
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak	1. Predikat Kota, Kecamatan, Desa/Lurah Layak Anak	Utama	Utama	T
		2. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,39	97,39	T
			2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,22	67,4	T
		3. Meningkatnya keluarga berkualitas	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,95	68,63	T
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,04	69,33	T
		2. Optimalisasi pengelolaan sampah	2. Persentase volume sampah yang masuk ke TPST/PDU	5,01%	1,45%	TT
12	DINAS	1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen	1. Cakupan Kepemilikan Dokumen	99,79%	99,78%	TT



NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	A		T
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	0,98		0
			1. Indeks Desa	90	92,8	T
			2. Profil Desa	0,77		T
14	DINAS PERHUBUNGAN	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Indeks Pelayanan Kinerja jalan (Vc Rasio)	69,8	71,43	T
		2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	2. Indeks Kepuasan masyarakat	83	75	TT
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	1. Nilai Indeks Kebijakan SPBE	3,8	4,8	T
		2. Meningkatnya kematangan kematangan tata kelola SPBE	2. Nilai Indeks tata kelola SPBE	3,9	4,7	T
		3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	3. Nilai Indeks manajemen SPBE	3,00	3,82	T
		4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE	4. Nilai Indeks layanan SPBE	3,95	4,76	T
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	1. Persentase Koperasi sehat	38,48%	41,68%	T
		2. Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	2. Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	2%	2%	T
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	1. Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi Di Kota Denpasar	1. Persentase Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi Di Kota	Peningkatan 2 %	Peningkatan 48,38 %	T



NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Denpasar			
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Indek Pelayanan Publik	Nilai 4,92	Nilai 4,92	T
18	DINAS KEBUDAYAAN	1. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat melalui Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya	1. Persentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	3%	27%	T
		2. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	2. Persentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	8%	8%	T
		3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Seni dan Budaya	3. Persentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	10%	15%	T
		4. Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	4. Persentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	6%	6%	T
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1. Meningkatnya Minat / Budaya Baca Masyarakat	1. Tingkat Kegemaran Membaca	55	59,43	T
		2. Meningkatnya Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar	2. Nilai Rata - rata Evaluasi Pengelolaan Kearsipan	85,75	85,54	TT
20	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan	Skor Pola pangan harapan (PPH) 1. Konsumsi	93,6	94,05	T
			Skor Pola pangan harapan (PPH) 2. Ketersediaan	96,2	96,23	T
		2. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	2.255	2263	T
21	DINAS PARIWISATA	1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1. Jumlah kunjungan wisatawan	1.990.000 (Asing 450.000, Domestik 1.540.000)	2.051.927 (Asing 558.521, Domestik 1.493.406)	TT
		2. Meningkatnya rata-rata lama tinggal	2. Rata-rata lama tinggal wisatawan	Asing (5,14	Asing (5,14	T



NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
		wisatawan		hari), Domestik (4,24 hari)	hari), Domestik (4,24 hari)	
		3. Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan	3. Rata-rata pengeluaran wisatawan	(Asing Rp 2.289.219/ hari, Domestik Rp1.422.026/ hari)	(Asing Rp 2.303.713/hari, Domestik Rp1.428.221/hari)	T
		4. Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif	4. Jumlah pengembangan pelaku ekonomi kreatif	100	504	T
22	DINAS PERTANIAN	1. Meningkatnya pendapatan petani	1. Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya tani padi	1,808	1,811	T
		2. Meningkatnya pendapatan peternak	2. Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,375	1,376	T
			3. Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	91,20%	92,61%	T
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah	1. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	21%	21,62%	T
		2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	2. Persentase pertumbuhan pelaku usaha sektor perdagangan	5,57%	6,73% %	T
		3. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	3. Presentase Realisasi P3DN	95,00%	95%	T
24	SEKRETARIAT DAERAH	1. Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	1. Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%	84,09%	TT
25	SEKRETARIAT DPRD	1. Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan	1. Persentase Fasilitasi	100%	100,00%	T



NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
		Kegiatan DPRD	Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan			
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar	100%	100%	T
			2. Persentase Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar	100%	100%	T
			3. Nilai SAKIP pada Area Perencanaan	24,6	24,28	T
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	59,60%	62,31%	T
			2. Jumlah Penerimaan PAD	2.018.795.135.284	2.220.122.658.663,55	T
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	94,79%	94,90%	T
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	97,05%	98,33%	T
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Denpasar yang berdasarkan sistem merit	1. Indeks Sistem Merit	0,95 (Sangat Baik)	0,95	T
			2. Indeks Profesionalisme ASN	80,99	86,95	T
30	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang	1. Persentase hasil kelitbang yang menjadi rekomendasi kebijakan oleh Kepala Daerah	91%	93,18%	T
		2. Meningkatnya Fasilitasi Inovasi Daerah	1. Persentase inovasi Daerah yang diimplementasikan	100%	100%	T



NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
31	INSPEKTORAT	1. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Predikat SAKIP	BB (78,35)	BB (76,98)	T
			2. Opini BPK	WTP	WTP	T
			3. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	TT
			4. Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	T
			5. Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan	80%	100%	T
32	KECAMATAN DENPASAR BARAT	1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	97,16%	97,18%	T
		2. Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	2. Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	T
		3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3. Jumlah Desa yang di Bina	100%	100%	T
33	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Indek Kepuasan Masyarakat	91,79%	92,56%	T
		2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	2. Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	T
		3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	3. Jumlah desa yang dibina	4 Desa	4 Desa	T
34	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,88%	93,96%	T
		2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	2. Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	T
		3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	3. Jumlah desa yang dibina	7 Desa	7 Desa	T
35	KECAMATAN DENPASAR UTARA	1. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,16	93,34	T



NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	KET
		2. Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	2. Persentase koordinasi yang terlaksana	100%	100%	T
		3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3. Jumlah desa yang dibina	8	8	T
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Meningkatnya pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban Masyarakat Kota Denpasar	1. Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial	5% dari tahun sebelumnya (12 Kasus)	100%	T

Dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar yaitu Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah) melalui Indikator Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah, melalui Persentase indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai dibagi Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah x100% adalah sebesar 84,09%. Data tersebut diperoleh dari 36 Perangkat Daerah melalui 88 IKU, dengan kategori:

TT (Dibawah Target)	: 14 IKU
T (Sesuai / Melampaui Target)	: 74 IKU
BT (Nilai Belum Terbit)	: 0 IKU

Formulasi Indikator Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah= $74/88 \times 100\%$ diperoleh 84,09%

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target (11 PD dengan 14 IKU) serta upaya perbaikan untuk meningkatkan hasil nilai IKU dari masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran yang diampu Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat melalui pengukuran indikator salah satunya Angka Rata-Rata Lama Sekolah menargetkan 11,78 terealisasi 11,64.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS Kota Denpasar tahun 2025 yaitu 11,64 dapat diartikan penduduk Kota Denpasar yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata pernah menjalani pendidikan selama 11 tahun atau sampai dengan Pendidikan Menengah Atas (SMA). Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,11 dari tahun 2024. Capaian RLS Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 1,89 dibandingkan RLS Provinsi Bali dan merupakan yang paling tertinggi di provinsi Bali. Jika dilihat dari kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang berwenang pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, maka kinerjanya sudah terpenuhi karena rata-rata penduduk Kota Denpasar selesai bersekolah di jenjang Pendidikan Menengah Atas yang sudah menjadi kewenangan Provinsi. Capaian tahun 2025 tidak mencapai target karena kenaikan dari 3 tahun terakhir tidak signifikan, sedangkan saat

penentuan target kami menggunakan trend capaian tahun 2020 ke bawah dimana peningkatannya cukup signifikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat migrasi penduduk (jenjang pendidikan rendah) yang cukup tinggi ke Denpasar. Dimana mereka juga digunakan sebagai sampel dalam perhitungan rata-rata lama sekolah.

Adapun Inovasi yang ampu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga:

- Komunitas Sapulidi
- SI SEKAT (Sistem Informasi Sekolah Sehat)
- MESADU (Melaporkan Efektif Secara Aman dan Menyeluruh)
- SILAMIS (Sistem Informasi LABU MANIS (Lenyapkan Aksi Bullying Mari Harminis))
- MEKEBER BERSAMA TRIPOD (Menumbuhkembangkan Keberanian Bersama Spentri Podcast)
- Aplikasi Halo Guru
- Jaya Gupta
- Si Master Rindu (Sistem Informasi Terpadu Penerimaan Murid Baru)
- SUASTIASTU (Sistem Anak Spesial, Terintegrasi Sigap Terpadu)

2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Sasaran Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang didukung PSU yang memadai melalui pengukuran salah satunya Persentase rumah tidak layak huni yang terbangun belum mencapai target 94,53% terealisasi 94,51% oleh karena 1 proposal batal dilaksanakan
2. Sasaran Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang didukung PSU yang memadai melalui pengukuran Persentase PSU Perumahan yang terfasilitasi dengan target 100% terealisasi 95,02% belum sesuai target oleh karena 25 proposal hibah uang batal dilaksanakan (Alasan pembatalannya berupa Sudah pernah mendapat bantuan hibah di tahun sebelum-sebelumnya; Dana tidak mencukupi; Adanya sengketa lahan; Telah dikerjakan dengan swadaya)
3. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi pertanahan melalui pengukuran indikator Persentase tanah fasos fasum yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Denpasar dengan menargetkan 85% terealisasi 83,01%

oleh karena adanya perubahan pemenuhan persyaratan administrasi (Terkendala pada pemenuhan persyaratan BPN Kota Denpasar dikarenakan sertifikat tidak dapat diterbitkan karena sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dengan adanya Berita Acara serah terima dari pengembang, namun pengembang yang dimaksud yang sudah tidak ada atau aktif lagi)

3) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Sasaran Optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator Persentase volume sampah yang masuk ke TPST/PDU menargetkan 5,01% terealisasi 1,45%. Belum tercapainya target pengolahan sampah pada TPST/ PDU di Kota Denpasar disebabkan oleh belum optimalnya operasional pengolahan sampah pada TPST di Kota Denpasar. Dari 2 (dua) TPST yang direncanakan beroperasi tahun ini, baru TPST Kesiman Kertalangu yang beroperasi pada bulan Oktober 2025 sehingga belum optimal dalam mengolah sampah, sedangkan TPST Tahura belum beroperasi. Sementara itu, PDU Padangsembian Kaja terus diupayakan optimalisasi dan saat ini telah mampu mengolah sampah hingga 35 ton per hari.

4) Dinas Perhubungan

Sasaran Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat menargetkan 83% terealisasi 75%, Secara umum, diakibatkan oleh masih rendahnya kualitas pada aspek sarana dan prasarana, Selain itu adapun yang perlu mendapatkan perhatian turunya nilai IKM dipelabuhan baik di Sanur dan Pelabuhan Serangan adalah pada kecepatan waktu pelayanan, kewajaran tarif layanan, kesesuaian produk dengan standar pelayanan, dan kemudahan prosedur layanan

5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar melalui pengukuran indikator Nilai Rata - rata Evaluasi Pengelolaan Kearsipan dengan target 85,75 terealisasi 85,54. Terjadi perubahan acuan penciptaan Arsip mengacu pada Perwali Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas baru yang mencabut Perwali Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas lama, sehingga menyebabkan naskah arsip yang dinilai tidak sesuai dengan standar penilaian; Aspek penilaian SDM yang

mengharuskan seluruh OPD memiliki arsiparis, dari 36 OPD hanya terdapat 18 OPD yang memiliki arsiparis; Terdapat 1 OPD dengan nilai yang dikategorikan B namun mempengaruhi nilai rata - rata keseluruhan OPD yang sudah berkategori BB hingga AA.

Adapun inovasi yang digunakan dalam meningkatkan capaian IKU seperti Mendorong penggunaan Aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi pengelola Naskah Dinas baik Naskah Dinas yang masuk maupun keluar; Mendorong recruitment Arsiparis baik secara perpindahan jabatan maupun recruitment ASN baru

6) Dinas Pariwisata

Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan pengukuran indikator Jumlah kunjungan wisatawan menargetkan 1.990.000 (Asing 450.000, Domestik 1.540.000) terealisasi 2.051.927 (Asing 558.521, Domestik 1.493.406). Faktor yg mempengaruhi penurunan angka kunjungan wisatawan domestik di tahun 2025 yg tidak mencapai target meliputi Faktor harga tiket pesawat ke Bali yang relatif mahal; Isu-isu negatif seperti sampah, banjir, kemacetan, cuaca buruk, overtourism dan pelayanan diskriminatif; Persaingan destinasi yang semakin kompetitif yang mempengaruhi preferensi wisatawan

7) Sekretariat Daerah

Sasaran strategisnya Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah) melalui indikator Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah tercapai dibawah target, target 100% dengan realisasi 84,09% oleh karena capaian 14 IKU Perangkat Daerah yang tidak tercapai serta 0 IKU yang belum rilis nilainya. Dalam formulasi perhitungan IKU Sekretariat Daerah ada perbedaan cara perhitungan antara Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya (Tahun 2025 untuk IKU Perangkat Daerah yang belum rilis nilainya tidak masuk dalam pembagi formulasi, sedangkan Tahun sebelumnya IKU Perangkat Daerah yang nilainya belum rilis masuk ke dalam formulasi IKU Setda. Hal tersebut sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi Renja Triwulan III Sekretariat Daerah oleh Bappeda Kota Denpasar pada 22 Oktober Tahun 2025.

Solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian IKU adalah dalam penyusunan kebijakan lebih meningkatkan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Melalui sasaran Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan indikator Indeks resiko bencana (IRBI) merencanakan target 90,10% terealisasi 103,31. Tidak tercapainya karena Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024

9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dalam meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP pada Area Perencanaan dengan target 24.6 Hasil dari evaluasi SAKIP Final Pemerintah Daerah Kota Denpasar dari Kemenpan RB Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,28 (tidak mencapai target). Adapun catatan yang diberikan meliputi:

- Pemerintah Kota Denpasar telah mengunggah dokumen perencanaan secara tepat waktu, namun beberapa PD belum mengunggah dokumen perencanaan terbaru. Contoh pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan PD lain yang masih mengunggah perjanjian kinerja tahun 2024 dan rencana aksi tahun 2024
- Belum mengunggah RPJMD 2025-2029 (terbaru) pada ESR. Selain itu, Kota Denpasar belum mengunggah dokumen turunan terbaru (minimal draf Renstra 2025-2029) tingkat perangkat daerah
- Perangkat daerah telah menyusun rencana aksi, namun masih ada perangkat daerah yang belum menyusun rencana aksi berbasis Perjanjian Kinerja disertai dengan penjabaran kegiatan atau aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama. Contoh pada Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan



- Penjenjangan kinerja pemerintah pada sebagian PD belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja
- Masih terdapat Indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, and time bound (SMART) serta cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja baik di level pusat maupun unit kerja. Contoh pada sasaran Dinas Pertanian “Meningkatnya pendapatan petani” dengan indikator utama Benefic Cost (B/C) yang hanya mengukur padi dan sasaran Dinas Pariwisata “Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif” dengan indikator “Jumlah pengembangan pelaku ekonomi kreatif”

Adapun Rekomendasi yang diberikan KemanpanRB:

- Seluruh perangkat daerah melakukan update dokumen perencanaan terbaru sesuai tahun berjalan/tahun evaluasi (untuk evaluasi tahun 2026 agar dapat mengunggah perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2026)
- Menyampaikan dokumen perencanaan terbaru pada evaluasi tahun 2026 (RPJMD 2025-2029 beserta dokumen turunannya)
- Melakukan penyeragaman format rencana aksi berbasis PK pada setiap PD dan memberikan bimbingan teknis penyusunan rencana aksi kepada seluruh PD
- Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup;
- Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran

10) Inspektorat

1. Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi melalui indikator kinerja Predikat SAKIP menargetkan BB (78,35), Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor LHE : B/438/AA.05/2025 tanggal 30 Desember 2025 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 76,98 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja utama ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Adapun catatan dari KemenpanRB meliputi:

- *Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (Tahun lalu 24,47. Tahun ini 24,28)*

Catatan :

- a. Pemerintah Kota Denpasar telah mengunggah dokumen perencanaan secara tepat waktu, namun beberapa PD belum mengunggah dokumen perencanaan terbaru. Contoh pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan PD lain yang masih mengunggah perjanjian kinerja tahun 2024 dan rencana aksi tahun 2024.
- b. Belum mengunggah RPJMD 2025-2029 (terbaru) pada ESR. Selain itu, Kota Denpasar belum mengunggah dokumen turunan terbaru (minimal draf Renstra 2025-2029) tingkat perangkat daerah.
- c. Perangkat daerah telah menyusun rencana aksi, namun masih ada perangkat daerah yang belum menyusun rencana aksi berbasis

Perjanjian Kinerja disertai dengan penjabaran kegiatan atau aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama. Contoh pada Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan.

- d. Penjenjangan kinerja pemerintah pada sebagian PD belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja
- e. Masih terdapat Indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, and time bound (SMART) serta cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja baik di level pusat maupun unit kerja. Contoh pada sasaran Dinas Pertanian “Meningkatnya pendapatan petani” dengan indikator utama Benefic Cost (B/C) yang hanya mengukur padi dan sasaran Dinas Pariwisata “Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif” dengan indikator “Jumlah pengembangan pelaku ekonomi kreatif”

Rekomendasi :

- a. Seluruh perangkat daerah melakukan update dokumen perencanaan terbaru sesuai tahun berjalan/tahun evaluasi (untuk evaluasi tahun 2026 agar dapat mengunggah perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2026)
- b. Menyampaikan dokumen perencanaan terbaru pada evaluasi tahun 2026 (RPJMD 2025-2029 beserta dokumen turunannya)
- c. Melakukan penyeragaman format rencana aksi berbasis PK pada setiap PD dan memberikan bimbingan teknis penyusunan rencana aksi kepada seluruh PD.
- d. Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup;
- e. Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk

memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran

- *Nilai Komponen Pengukuran Kinerja (Tahun lalu 22,52. Tahun ini 22,52)*

Catatan :

- a. Sebagian PD belum menyampaikan laporan monev atas rencana aksi tahun 2025 sehingga belum diketahui kualitas capaian kerjanya. Selain itu, beberapa PD tidak melakukan pelaporan monev secara periodik (tidak disampaikan pada ESR), contoh pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum melengkapi format IKU dengan definisi operasional, formulasi, dan sumber data
- c. Belum menyampaikan matriks tindak lanjut atas rekomendasi pengukuran evaluasi tahun sebelumnya, sehingga belum diketahui progress penggunaan aplikasi SIMAK DIHATI

Rekomendasi :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik (minimal triwulanan), yang disertai analisis capaian serta saran perbaikan untuk ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya. Selain itu, laporan monev triwulanan wajib diunggah melalui ESR.
 - b. Melakukan penyempurnaan dokumen IKU dengan format Sasaran Kinerja-Indikator Kinerja-Definisi Operasional-Formulasi-Sumber Data-Penanggung Jawab-Target Kinerja
 - c. Menyampaikan matriks tindak lanjut atas rekomendasi pengukuran evaluasi, termasuk didalamnya progress penyempurnaan aplikasi SIMAK DIHATI dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja
- *Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Tahun lalu 11,68. Tahun ini 12,06)*
 - a. Informasi kinerja yang dituangkan di laporan kinerja sebagian PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung perbaikan pencapaian kinerja ke depan. Contoh pada PD yang menetapkan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target

kinerja tahun sebelumnya, seperti pada Dinas PUPR dan Dinas Damkar dan Penyelamatan

- b. Laporan kinerja pada level PD sudah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, namun analisis yang disajikan sebagian PD belum mengarah ke pencapaian kinerja program/kegiatan melainkan hanya identifikasi nomenklatur program/kegiatan dan besaran anggaran sehingga tidak didapatkan informasi yang jelas terkait sejauh mana program/kegiatan tersebut menunjang kinerja strategis

Rekomendasi :

- a. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP OPD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya
 - b. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada level pemerintah daerah dan PD dengan cara memastikan penyajian analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja untuk dapat menggambarkan dampak sejauh mana pencapaian kinerja program/kegiatan tersebut menunjang kinerja strategis yang ingin diwujudkan
- *Nilai Komponen Evaluasi Internal (Tahun lalu 18,25. Tahun ini 18,12)*
- a. Pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan hasil evaluasi SAKIP yang dirilis tahun 2025 (dilampirkan pada matriks tindak lanjut), namun sebagian PD belum menyampaikan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP internal tahun 2025 pada ESR
 - b. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal yang disampaikan belum dilakukan secara berkala dan periodik, sehingga belum terjadi perbaikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada unit kerja

- c. Laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP

Rekomendasi :

- a. Memastikan seluruh PD menyampaikan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP internal melalui ESR agar progres perbaikan dapat dimonitor secara sistematis.
- b. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi evaluasi internal secara berkala dan periodik untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja pada tingkat unit kerja.
- c. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD.

2. Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP yang dinilai dari BPKP menargetkan Level 3, namun terealisasi Level 2. Berdasarkan Berdasarkan LHE Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor PE.09.03/LHP-53/PW22/6/2026 tanggal 10 Februari 2026 r hasil evaluasi menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Denpasar berada pada "Level 2,00" dengan skor "2,41". Hal ini menunjukkan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah Terstruktur.

Dalam hal ini Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Kapabilitas APIP tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjadi Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada



Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan aktivitas pengawasan.

Bahwa untuk penerapan penilaian kapabilitas APIP dengan Model Penilaian Baru/New Generation sesuai surat BPKP nomor PE.07.02/S-359/D4/04/2025 hal Undangan Workshop Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Model Penilaian Baru terdapat 98 Kabupaten/Kota yang dijadikan sample termasuk Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali. Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP tahun 2025 akan dilaksanakan secara bertahap. Pada triwulan IV Tahun 2025, evaluasi dilaksanakan atas 43 APIP Kementerian/ Lembaga dan 98 APIP Daerah, termasuk 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Sementara dari 3 Kabupaten/Kota yang menjadi sample di Provinsi Bali hanya 2 Kabupaten/Kota yang diajukan untuk mengikuti Evaluasi Panel ke BPKP Pusat, dan Kota Denpasar memperoleh nilai 2,41 sementara Kabupaten Badung memperoleh nilai 2,40. Dari 98 Kabupaten/Kota yang dijadikan pilot project / sampel penerapan penilaian kapabilitas APIP Model Penilaian Baru tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memperoleh Level 3.

11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui indikator kinerja utama Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menargetkan 99,79%, terealisasi 99,78% (tidak mencapai target).

Capaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Denpasar mencapai 99,79% yang ditinjau dari rata-rata persentase kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan KTP elektronik, penerbitan akta kematian, kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, dan penerbitan akta perkawinan. Bila capaian sebesar 99,78% dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,79%, maka sasaran indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2025 belum tercapai. Belum optimalnya capaian target

tersebut disebabkan banyaknya penduduk wajib KTP-El yang sudah melaksanakan perekaman KTP namun belum mengajukan permohonan pencetakan fisik KTP-El nya. Berdasarkan DKB semester 2 tahun 2025, terdapat 1300 penduduk dengan status PRR (siap cetak) belum mengajukan permohonan pencetakan. Belum diajukannya permohonan pencetakan KTP salah satunya disebabkan penduduk dapat menggunakan Identitas Kependudukan Digital sebagai identitas kependudukan.

Belum optimalnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk mengajukan pendaftaran permohonan berkas kependudukan melalui web taringdukcapil.denpasarkota.go.id. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan. Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data.

Adapun perbaikan atau Langkah ke depan yang akan dilakukan adalah dengan Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan melaksanakan sosialisasi baik melalui media elektronik dan non elektronik maupun dengan pendekatan pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara jemput bola ke desa/kelurahan, jemput bola KTP untuk warga sakit, jemput bola perekaman KTP ke sekolah-sekolah, layanan akta perkawinan langsung jadi, jemput bola Identitas Kependudukan Digital. Memberikan informasi tata cara pengajuan permohonan berkas kependudukan, menyediakan loket konsultasi dan pengaduan, serta menyediakan saluran telepon dan whatsapp untuk membantu masyarakat yang belum menguasai penggunaan teknologi untuk mengajukan berkas permohonan pada web taringdukcapil.denpasarkota.go.id. Tersedianya mesin ADM di 6 titik lokasi untuk membantu memudahkan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri oleh masyarakat. Menjaga dan meningkatkan sinergitas antar bidang untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi.

Sekretariat Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2025 telah melaksanakan beberapa program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai indikator masing-masing kegiatan tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

➤ **Nilai LPPD**

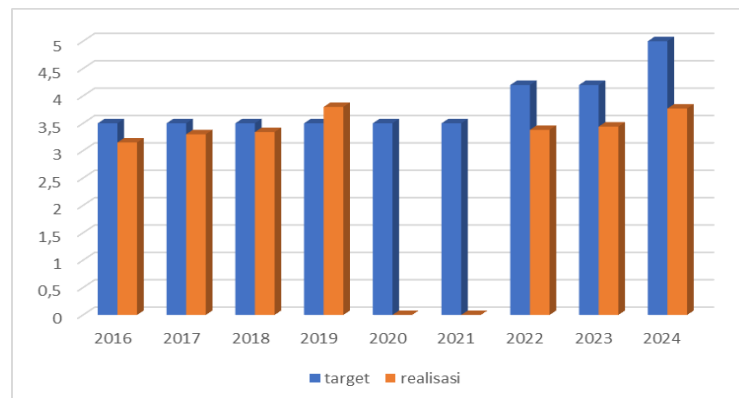
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 2 dan pasal 25 ayat 2 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kota Denpasar Tahun 2025 memuat tentang capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian pelaksanaan tugas pembantuan dan laporan standar pelayanan minimal (SPM) selama 1 (satu) Tahun anggaran. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai IKK dalam LPPD oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Hasil EKPPD digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah, pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang sangat tinggi. Hasil EKPPD bagi Pemerintahan Daerah Kota Denpasar dapat dijadikan sebagai bahan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Denpasar di masa yang akan datang.

CAPAIAN IKU BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	TAHUN	PERINGKAT	SKOR	PRESTASI	KETERANGAN
1	2015	29	3,0879	Sangat Tinggi	Dari 91 daerah kota secara Nasional
2	2016	38	3,1530	Sangat Tinggi	Dari 93 daerah kota secara Nasional
3	2017	Peringkat ke -10 di tingkat Nasional	3,3021	Sangat Tinggi	Dari 93 daerah Kota secara Nasional
4	2018	Peringkat ke-3 di tingkat provinsi	3,3445	Sangat Tinggi	Dari 9 Kabupaten /Kota di Bali
		Peringkat ke -9 di tingkat Nasional	3,4413	Sangat Tinggi	Dari 93 daerah Kota secara Nasional
5	2019	Peringkat ke1 di tingkat provinsi	3,8028	Tinggi	Dari 9 Kabupaten/Kota di Bali
6	2020				Untuk peringkat di tingkat Provinsi dan Nasional belum di publikasikan
7	2021				Untuk peringkat di tingkat Provinsi dan Nasional belum di publikasikan



Nilai LPPD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 penilaian tidak di publish oleh karena adanya pandemic Covid-19. Adapun capaian Tahun 2022 sebesar 3,38 dengan status “Sedang”, untuk capaian Tahun 2023 sebesar 3,4439 dengan status “Tinggi”. Adanya perubahan interval penilaian berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020, dimana dari 4 interval menjadi 5 interval. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi LPPD untuk capaian nilai dari 3,00-4,00 termasuk “Sangat Tinggi”. Permendagri 18 Tahun 2018 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan untuk capaian nilai 3,41-4,21 dengan status “Tinggi” dan dari 4,21-5,00 termasuk “Sangat Tinggi”. Belum ada kota di Indonesia yang capaiannya sangat tinggi dan hanya 3 kota yang sudah mencapai tinggi.

Indikator Kinerja Kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan adalah Nilai LPPD, untuk mencapai indikator tersebut Bagian Tata Pemerintahan menjalankan kebijakan daerah dengan memberikan layanan Sistem Informasi Penginputan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIMPUL) yang bermanfaat bagi Perangkat

Daerah dalam mempermudah menyampaikan data yang akan dituangkan kedalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tingkat capaian indikator Nilai LPPD pada tahun 2024 3,7751 (Tinggi) atau 89.76%. Untuk Tahun 2025 nilai belum dirilis.

Dokumentasi:

Rapat Persiapan HUT Kota Denpasar



Bimtek LPPD



Monitoring SPM



APEKSI



Penghargaan yang telah diperoleh:

Pada 29 April 2023 di Kota Makasar Pemerintah Kota Denpasar memperoleh peringkat ke- 5 Nasional dari 92 Kota dengan skor 3,38 prestasi status kinerja tinggi



Pada 25 April 2024, di Kota Surabaya Pemerintah Kota Denpasar memperoleh peringkat ke- 10 Nasional dari 93 Kota dengan skor 3,4439 prestasi status kinerja tinggi



Pada 25 April 2025, di Kota Balikpapan Pemerintah Kota Denpasar memperoleh peringkat ke- 2 Nasional dari 90 Kota dengan skor 3,7751 prestasi status kinerja tinggi



Pada 1 Desember 2025 di Jakarta Pemerintah Kota Denpasar memperoleh kota kinerja pemerintah daerah terbaik tahun 2025 yang diberikan oleh Kemendagri dan Tempo

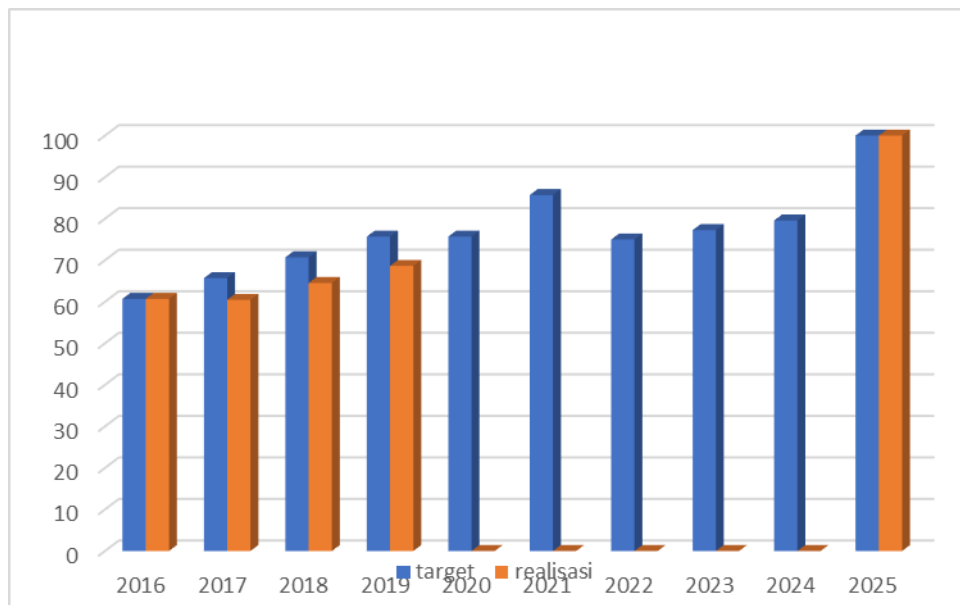


➤ **Kegiatan Penataan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah diharapkan menjadi semakin baik dan terintegrasi.

Adapun tujuan dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Kegiatan Penataan Organisasi bertujuan untuk memfasilitasi Perangkat Daerah terkait peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta penataan kelembagaan sehingga Penataan Organisasi setiap perangkat daerah bisa menjadi baik dan maksimal.



Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator Persentase Dokumen PMPRB PD dengan persentase capaian kinerja diatas 75% tidak terdapat penilaian dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 oleh karena Perubahan Penilaian PMPRB menjadi RB Tematik dan RB General (Tidak Terdapat penilaian PMPRB, dikarenakan terdapat kebijakan baru.

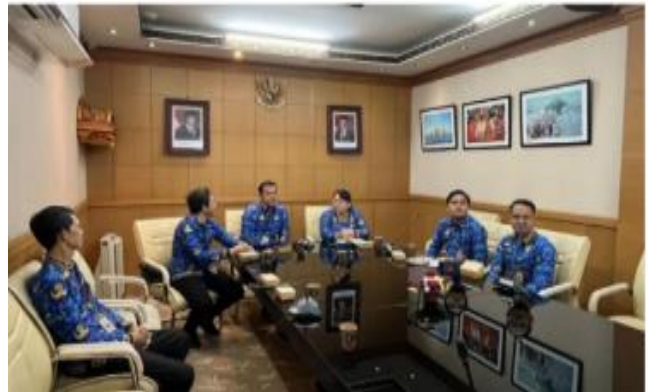
Sesuai Permenpan RB No 3 Tahun 2023 tentang perubahan roadmap RB, penilaian RB untuk tahun ini menilai RB General dan RB Tematik. Tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik mencapai target yaitu 100%.

Dokumentasi:

Sosialisasi Pengawasan Pelayanan Publik:
Pencegahan Maladministrasi Menuju Pelayanan
Publik Berkualitas dari Ombudsman RI



Rapat koordinasi dengan Tim dari Biro Ortala Provinsi
Bali terkait Penguatan Budaya Kerja dalam rangka
Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN
BerAhlak



Rapat Penentuan Akhir Indeks Pelayanan Publik (IPP)
oleh Tim Evaluator PEKPPP Mandiri



Rapat pembahasan SE KEMENPANRB No.6 tahun
2025 tentang Evaluasi RB Tahun 2025



Penghargaan yang diperoleh:

Pada 14 Nopember 2024, Pemerintah Kota Denpasar berhasil memperoleh Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 97, 93 kategori Kualitas tertinggi (A) pada Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia

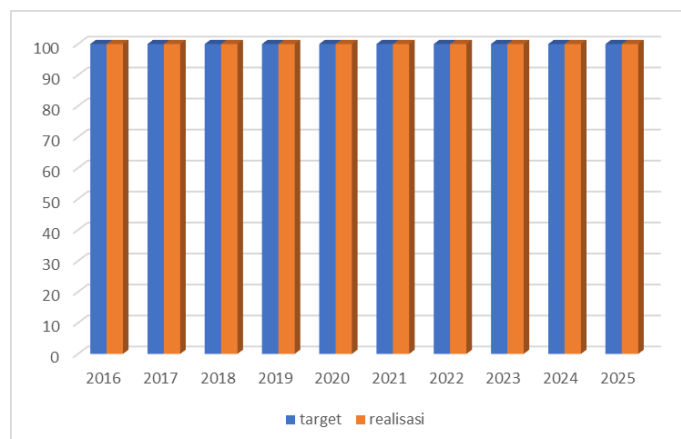


Pada tanggal 9 Januari 2026, Pemerintah Kota Denpasar berhasil memperoleh Nilai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Indeks 4,80 dan menjadi Peringkat 3 Nasional untuk Kategori Kota dan menjadi Nilai Tertinggi di Provinsi Bali Tahun 2025



➤ Persentase Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang dapat Ditindak Lanjuti

Indikator Kinerja Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dapat ditindaklanjuti. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan tupoksi utama dari Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar yaitu melakukan proses pemilihan penyedia barang/ jasa pemerintah yang diajukan oleh Perangkat Daerah. Formulasi indikator tersebut adalah dengan membandingkan antara jumlah paket yang dapat diproses pemilihannya dengan jumlah paket yang masuk dari Perangkat Daerah dikali 100%.





Dokumentasi:

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa



Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa



Penghargaan yang diperoleh:

Pada 21 Februari 2024, Penghargaan Juara II Debat Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh DPD IAPI Provinsi Bali



Pada 11 Juni 2024, Piagam Penghargaan Pemenang Pemerintah Kota Dengan Jumlah Transaksi PDN Terbanyak



Pada 10 Oktober 2024 Penghargaan UKBP Proaktif dan Nilai ITKP Tertinggi Kategori Pemerintah Kota Tahun 2024



➤ **Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM**

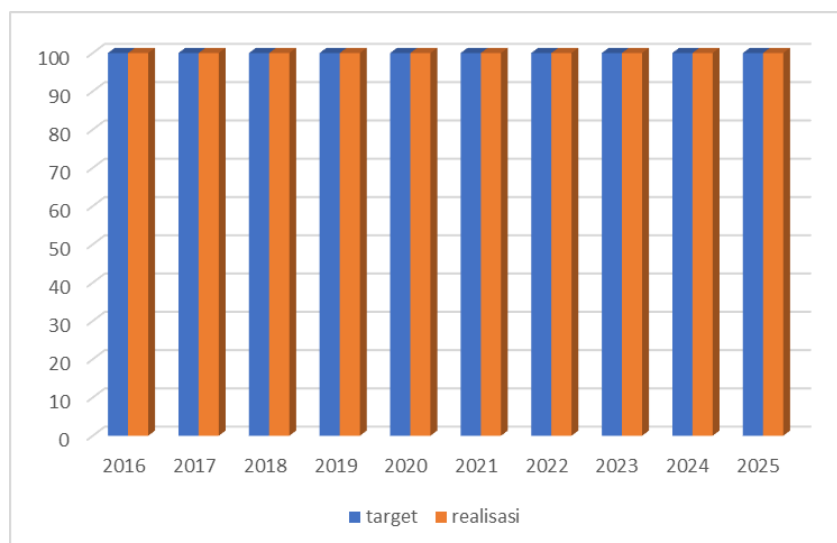
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum yang harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM. Urusan yang ditangani Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Persentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM menjadi indikator kinerja kegiatan Bagian Hukum Setda Kota Denpasar, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana permasalahannya ialah bagaimana mengatasi terjadinya pertentangan - pertentangan, Batasan – Batasan perbedaan diantaranya ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai sub sistem atau sistem hukum dalam satu kesatuan hukum nasional, sehingga tidak terhalang oleh perbedaan – perbedaan dan tidak terjadi tumpang tindih/ duplikasi.

Peningkatan Pelayanan Public Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum Law Enforcement) dengan menciptakan Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM sehingga menghasilkan regulasi yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta memfasilitasi bantuan hukum terkait penyelesaian permasalahan hukum yang sangat luas meliputi Pemerintahan Kota, Pemerintahan Desa dan Desa Adat.

Untuk persentase capaian Produk Hukum yang harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM Tahun 2024 adalah 9 Peraturan Daerah dan 60 Peraturan Walikota sehingga capaian Harmonisasi Produk Hukum Daerah tahun 2024 adalah 100%.

Tahun 2025 Persentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM tercapai 100%



Dokumentasi:

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah



Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum



Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum





Penghargaan yang diperoleh:

Pada 14 Agustus 2024, Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Terbaik I oleh Kemenkum HAM RI



Pada 11 Nopember 2024, Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Denpasar adalah 98.90 dengan kategori AA (ISTIMEWA) oleh Kementerian Hukum RI



Nomor : PPH-07.03.03-412
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Walikota Denpasar
di tempat

- Rujukan
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19/OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04/OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Revitalisasi Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02/LT.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
 - Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
 - Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar tahun 2024 adalah **98.90** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Perkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	25

Pada 11 Desember 2024, Juara I kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 (Penyuluhan Hukum bagi Lansia, Disabilitas, dan Masyarakat secara Online)



Pada 10 Desember 2024, Mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Menteri HAM RI



Pada 13 Oktober 2025, Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 hasil Indeks Reformasi Hukum adalah 100.00 dengan kategori AA (ISTIMEWA) oleh Kemenhum RI

Pada 20 Nopember 2025, Pemerintah Kota Denpasar memperoleh Kategori Unggul Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 oleh LAN RI

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
 Telepon: (021) 2925015 - Faksimil: (021) 2926438
 Laman: www.bsk.kemeriuh.go.id

Nomor : PPH-07.03.01-468 13 Oktober 2025
 Sifat : Biasa
 Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
 di tempat

1. Rujukan
 a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian/Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 c. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 822);
 f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 212);
 g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.07.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Penlelepasan Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penilaian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

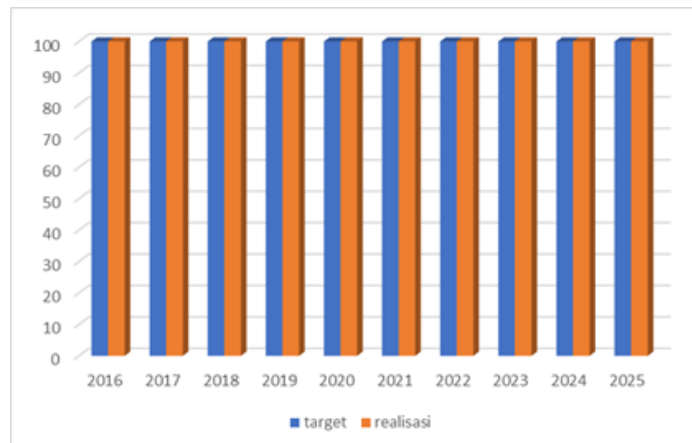
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
 b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
 c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah diumumkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar tahun 2025 adalah **100,00** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan indikator	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Mempertuak koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	25



➤ **Persentase Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu, Mutu, dan Sasaran**

Pelaksanaan penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, bersifat pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan fisik yang dilaksanakan pada kurun waktu dari bulan Januari-Desember tahun berjalan, dimana kegiatan ini mempunyai tujuan menuntaskan pelaksanaan pembangunan secara administrasi agar tercipta tepat waktu, mutu, dan sasaran. Target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan dari Tahun 2016 sampai dengan 2025 tercapai 100%.



Dokumentasi:

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan



Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

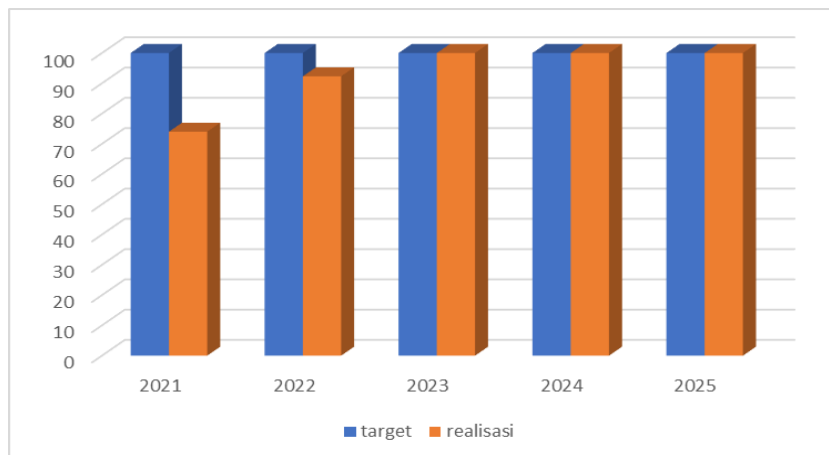


➤ **Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**

Indikator Kinerja Kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, beberapa tujuan dari kegiatan ini yaitu terwujudnya kinerja pelayanan yang baik terhadap setiap kunjungan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta kunjungan tamu ke Pemerintah Kota Denpasar; terselenggaranya acara pertemuan/rapat pimpinan daerah dengan tertib dan lancar; terpublikasinya dan terdokumentasinya setiap kegiatan pimpinan daerah.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan program teknis, administrasi, dan sumber daya urusan tata usaha pimpinan, pelayanan tamu, penyelenggaraan acara dan juru bicara serta mempublikasikan seluruh kegiatan pimpinan baik di media massa cetak maupun elektronik.



Dalam melaksanakan fungsi dimaksud Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar menyelenggarakan untuk menunjang kegiatan keprotokolan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pelayanan terhadap kunjungan tamu pemerintah dan penyelenggaraan acara sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 tentang Keprotokolan.

Dokumentasi:

Kegiatan Pendampingan Walikota dalam penyerahan Bantuan ke Masyarakat



Kegiatan Persiapan penyebaran media internal pada Acara Seremonial tertentu

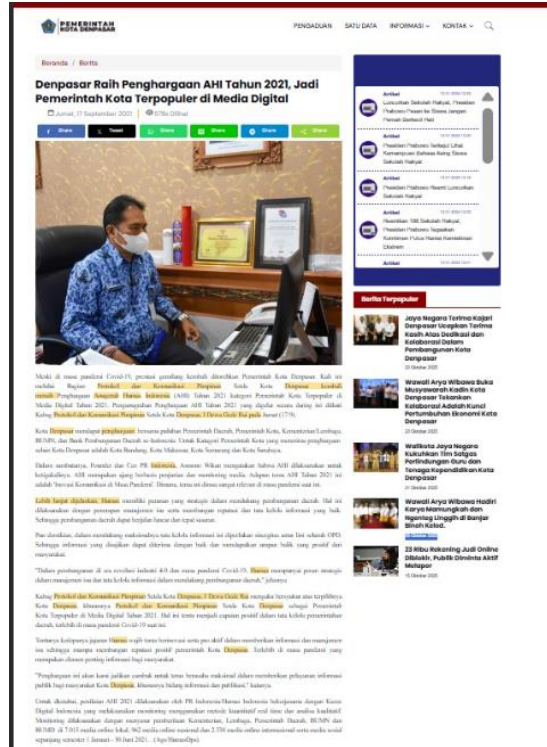


Berbagai produk cetak (Majalah, Card Duduk, Card Tempel, Kartu Undangan) dan Video Pembangunan dan Album Foto



Penghargaan yang diperoleh:

Pada September 2021, Pemerintah Kota Denpasar meraih Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021 kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media Digital yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia (PR Indonesia Group) bekerja sama dengan KAZEE Digital Indonesia



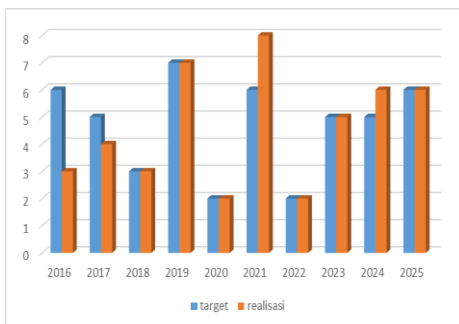
➤ **Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama pembangunan, baik dengan pihak ketiga, maupun kerja sama daerah. Dalam pasal 363 (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.” Bahkan pasal 363 (3) lebih tegas lagi berisi “Perintah” untuk membuat kerja sama antar daerah, dengan menyatakan: “Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat”. PP No 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah merupakan hasil tindaklanjut atas kebijakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. tersebut menyebutkan Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau

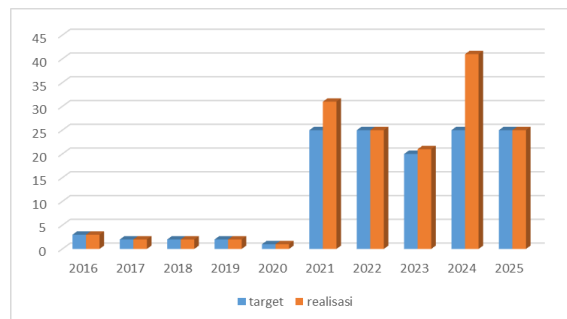
antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Esensi dari penyelenggaraan kerja sama daerah selain untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan publik adalah untuk lebih memantapkan hubungan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dan berfungsi dalam menunjang keserasian pembangunan daerah sehingga kesenjangan antar daerah dapat diminimalisir.

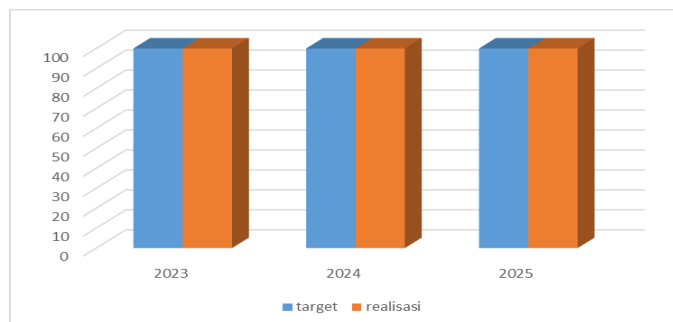
Kerjasama Luar Negeri



Kerjasama Dalam Negeri



Fasilitas Kerjasama



Dokumentasi:

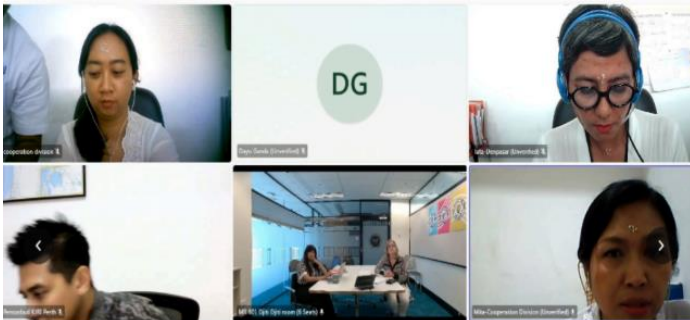
Pemberian Piagam Penghargaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Responsibility)



Acara Denpasar tuan Rumah Excom Meeting



Rapat dengan Kota Perth, Pembahasan Perpanjangan Mou Sister City dengan Kota Perth



Rapat dengan Kota Darwin



➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekretariat dan Pimpinan Daerah dengan kegiatan meliputi: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sekretariat dan Pimpinan Daerah sebagai penunjang pelaksanaan pemerintahan.

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator penerimaan gaji dan tunjangan ASN adalah perbandingan jumlah orang yang sudah menerima gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah orang yang direncanakan dalam menerima gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah orang yang direncanakan dalam menerima gaji dan tunjangan ASN dikalikan 100%. Tingkat capaian indikator kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada Tahun 2025 sudah memenuhi target yaitu 185 orang. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian adalah perbandingan jumlah dokumen yang mampu diselesaikan dengan jumlah dokumen yang direncanakan dikalikan 100%. Tingkat capaian indikator kinerja jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian pada Tahun 2025 memenuhi target. pada Tahun 2025 jumlah dokumen yang berhasil diselesaikan sebanyak 14 dokumen, sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%.

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan adalah perbandingan jumlah laporan yang mampu diselesaikan dengan jumlah laporan yang direncanakan dikalikan 100%. Tingkat capaian indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada Tahun 2025 memenuhi target. Pada Tahun 2025 jumlah laporan yang berhasil diselesaikan sebanyak 24 laporan, sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%.

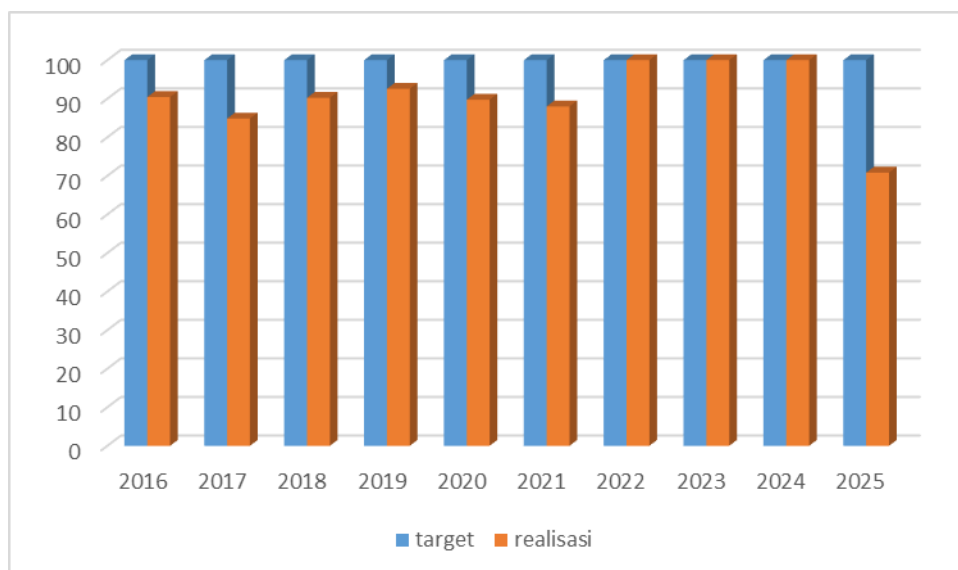
4) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan jumlah orang yang mengikuti medical check up adalah perbandingan jumlah orang yang menerima dengan jumlah orang yang direncanakan dikalikan 100%. Tingkat capaian indikator kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

pada Tahun 2025 memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 2 orang, sesuai dengan yang direncanakan. Lalu pada Tahun 2025 jumlah orang melakukan medical check up adalah 1 orang dimana target yang direncanakan 8 orang. Sehingga hasil pencapaian target kinerja pada indikator dimaksud adalah 70,83%.

- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator jumlah unit yang dipelihara adalah perbandingan jumlah unit yang mampu diselesaikan dengan jumlah unit yang direncanakan dikalikan 100%. Tingkat capaian indikator kinerja jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah pada Tahun 2025 memenuhi target kinerja 100%.

- 6) Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah
Indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah perbandingan antara jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekeretariat daerah yang disediakan dengan jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang direncanakan dikalikan 100%. Tingkat capaian indikator kinerja jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan pada Tahun 2025 memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025 jumlah paket yang berhasil disediakan sebanyak 17 paket. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%.



Dokumentasi:

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor



Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau



Bangunan
Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya



Sub Kegiatan Penyediaan
Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah



Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

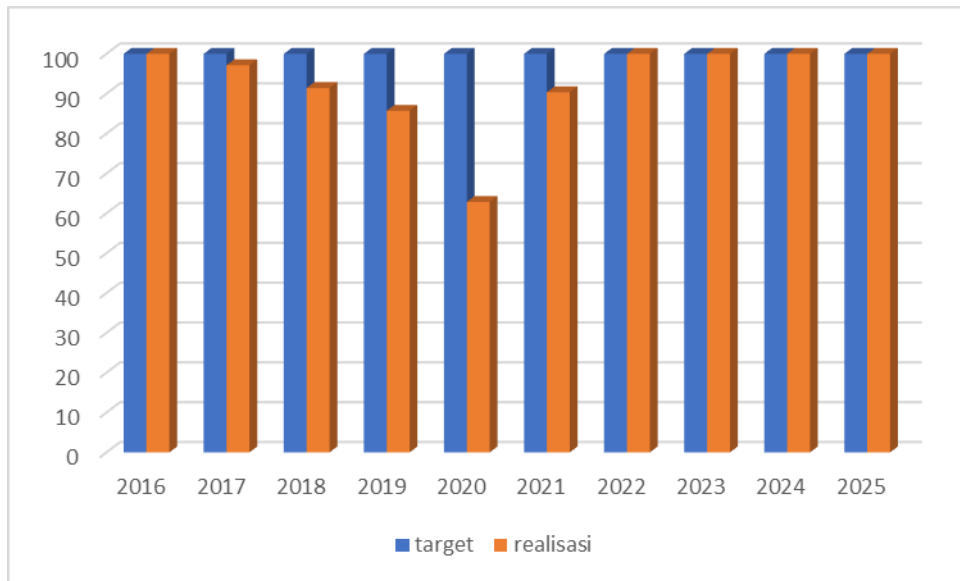


➤ **Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindak Lanjuti**

Indikator Kinerja Kegiatan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti, dalam Meningkatkan fasilitasi pengembangan perekonomian melalui bina ekonomi daerah, usaha daerah, potensi dan sumber daya daerah. Memiliki tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi di bidang usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral serta fungsi penunjang keuangan serta fungsi Mengoordinasikan perumusan Kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama pembangunan, baik dengan pihak ketiga, maupun kerja sama antar daerah. Dalam pasal 363 (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. ”Bahkan pasal 363 (3) lebih tegas lagi berisi “Perintah” untuk membuat kerja sama antar daerah, dengan menyatakan: “Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat”



Dokumentasi:

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD



Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian



Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil



Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan



Penghargaan yang diperoleh:

Pada 24 Agustus 2024, Pemerintah Kota Denpasar menerima Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu terpilih sebagai Juara 1 Kategori Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota. Pencapaian ini diraih melalui kolaborasi dalam program Kejarku Pandai (Satu Rekening Satu Pelajar, Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Denpasar



➤ Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

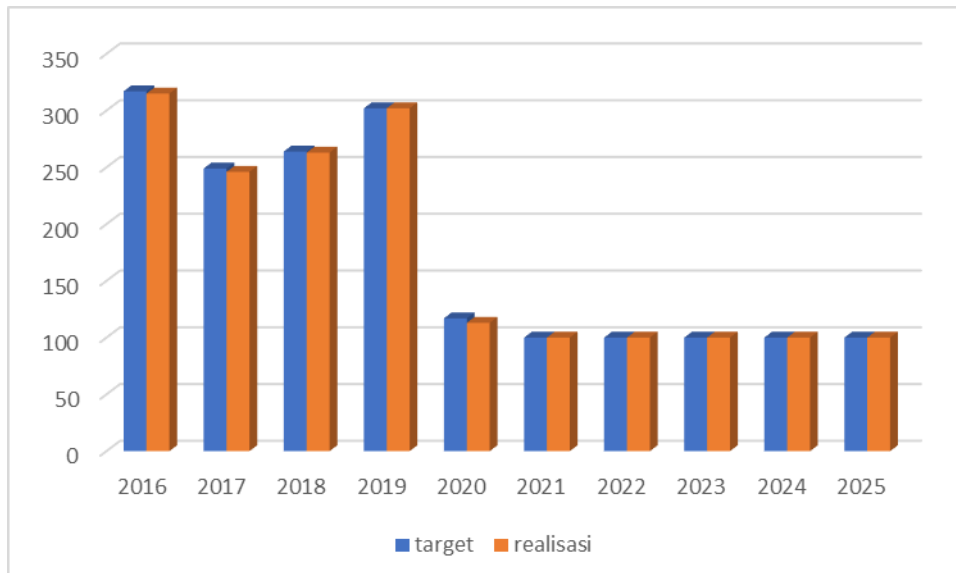
Bagian Kesejahteraan Rakyat mengampu Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. 3 Sub Kegiatan yang diampu yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (target 4 dokumen); Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (target 5

dokumen); Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (target 5 dokumen)

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, outcomenya Terlaksananya Kegiatan Piodalan Keagamaan, Kegiatan Penganyaran, Kegiatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, outcomenya Terlaksananya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar dan Ziarah Peringatan Hari-Hari Bersejarah, Peringatan Kebangkitan Nasional, Peringatan Kesaktian Pancasila, Peringatan Puputan Margarana, dan Pemberian Penghargaan Uang kepada Ahli Waris Veteran Republik Indonesia

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, outcomenya Terlaksananya Pengusulan Proposal Hibah Uang dan Hibah Barang Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan, Pencairan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Kegiatan Monitoring Penerima Hibah, Pertanggungjawaban dari Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Uang, dan Kegiatan Sosialisasi Hibah Online E-Monalisa



Dokumentasi:

Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual



Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat



Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial





3.3 Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.7 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Rp139.358.695.566,00	113.442.048.052,00	25.916.647.514,00	Sisa anggaran merupakan akumulasi dari kegiatan dibawah Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Organisasi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp50.634.866.164,00	43.608.858.248,00	7.026.007.916,00	Alasan adanya sisa anggaran antara lain karena tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN belum dapat direalisasikan akibat belum adanya regulasi yang mendukung. Selain itu, belanja iuran simpanan peserta TAPERA juga belum direalisasikan karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN dianggarkan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kekurangan dana dalam



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
					pembayaran pajak pada periode akhir.
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp50.634.866.164,00	43.608.858.248,00	7.026.007.916,00	Alasan adanya sisa anggaran antara lain karena tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN belum dapat direalisasikan akibat belum adanya regulasi yang mendukung. Selain itu, belanja iuran simpanan peserta TAPERA juga belum direalisasikan karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN dianggarkan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kekurangan dana dalam pembayaran pajak pada periode akhir.
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp10.663.356.684,00	9.626.388.498,00	1.036.968.186,00	Adanya negosiasi harga
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	Rp10.663.356.684,00	9.626.388.498,00	1.036.968.186,00	Adanya negosiasi harga



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp32.664.839.500,00	27.342.439.822,00	5.322.399.678,00	Kebutuhan belanja alat tulis kantor, bahan cetak, bahan komputer, belanja alat listrik dan sewa tidak sepenuhnya terealisasi karena menyesuaikan kebutuhan bagian-bagian dan pimpinan, Belanja modal sudah terealisasi namun harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp32.664.839.500,00	27.342.439.822,00	5.322.399.678,00	Kebutuhan belanja alat tulis kantor, bahan cetak, bahan komputer, belanja alat listrik dan sewa tidak sepenuhnya terealisasi karena menyesuaikan kebutuhan bagian-bagian dan pimpinan, Belanja modal sudah terealisasi namun harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran.
Kegiatan Pemeliharaan	Persentase	Rp3.912.994.000,00	2.905.758.885,00	1.007.235.115,00	Terealisasi namun nilai yang



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				harus dibayarkan lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp163.150.000,00	67.737.800,00	95.412.200,00	Terealisasi namun nilai yang harus dibayarkan lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan.
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Rp95.009.000,00	51.447.390,00	43.561.610,00	Terealisasi namun nilai yang harus dibayarkan lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan.
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp1.587.040.000,00	972.193.327,00	614.846.673,00	Terealisasi namun nilai yang harus dibayarkan lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan.
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Rp2.067.795.000,00	1.814.380.368,00	253.414.632,00	Terealisasi namun nilai yang harus dibayarkan lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan.



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp5.840.974.218,00	4.177.452.640,00	1.663.521.578,00	Terdapat sisa anggaran yang disebabkan oleh belanja insentif KDH dan WKDH yang hanya dapat direalisasikan pada salah satu rekening belanja, serta pelaksanaannya disesuaikan dengan rekening belanja yang memenuhi target dan Terjadi sisa anggaran karena hanya satu orang yang melaksanakan medical check up, sehingga sebagian anggaran tidak terealisasi.
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp2.752.781.618,00	1.145.759.240,00	1.607.022.378,00	Terdapat sisa anggaran yang disebabkan oleh belanja insentif KDH dan WKDH yang hanya dapat direalisasikan pada salah satu rekening belanja, serta pelaksanaannya disesuaikan dengan rekening belanja yang memenuhi target.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Rp60.000.000,00	3.893.400,00	56.106.600,00	Terjadi sisa anggaran karena hanya satu orang yang melaksanakan medical check up, sehingga sebagian



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
Kepala Daerah	Kepala Daerah				anggaran tidak terealisasi.
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp3.028.192.600,00	3.027.800.000,00	392.600,00	Sudah Terealisasi
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Rp15.860.797.200,00	11.568.462.733,00	4.292.334.467,00	Belanja Kebutuhan rumah tangga tidak sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan awal karena adanya penyesuaian kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan dan Belanja makanan dan minuman tidak sepenuhnya terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan dan masyarakat.
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Rp15.860.797.200,00	11.568.462.733,00	4.292.334.467,00	Belanja Kebutuhan rumah tangga tidak sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan awal karena adanya penyesuaian kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan dan Belanja makanan dan minuman tidak sepenuhnya



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
					teralisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan dan masyarakat.
Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik	Rp157.208.000,00	109.306.047,00	47.901.953,00	Tidak terealisasi perjalanan dinas narsum, dikarenakan sosialisasi melalui media zoom meeting
	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja				
	Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009				
	Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik				
	Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan				
	Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya				
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp43.426.000,00	23.105.012,00	20.320.988,00	Tidak realisasi perjalanan dinas narsum, dikarenakan sosialisasi melalui media zoom meeting
Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil	Rp25.600.000,00	22.547.000,00	3.053.000,00	Terdapat negoisasi dan



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				efisiensi harga
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp88.182.000,00	63.654.035,00	24.527.965,00	Tidak terealisasi dan tidak terlaksana sosialisasi yang mengundang narasumber dari Kemenpan RB, dikarenakan tim tidak berkenan karena masih dalam tahap penilaian
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Rp19.623.659.800,00	14.103.381.179,00	5.520.278.621,00	Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan bergantung pada kegiatan pimpinan yang sifatnya on call
Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Rp11.310.370.800,00	6.626.623.243,00	4.683.747.557,00	Kegiatan pelaksanaan keprotokolan bergantung pada agenda pimpinan yang jumlah dan kegiatannya tidak menentu
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp7.823.444.000,00	7.047.711.751,00	775.732.249,00	Kegiatan pelaksanaan komunikasi pimpinan bergantung pada agenda pimpinan yang jumlah dan kegiatannya tidak menentu
Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp489.845.000,00	429.046.185,00	60.798.815,00	Terdapat efisiensi harga dan penawaran harga yang dibawah nilai pagu anggaran
PROGRAM	Nilai LPPD	Rp36.893.868.450,00	35.505.768.258,00	1.388.100.192,00	Adanya efisiensi anggaran



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				pada rekening belanja yg belum mencapai 100%
	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM				Efisiensi Anggaran
	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				- Efisiensi Anggaran - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak seluruhnya direalisasikan. - Honorarium Kasus untuk masyarakat Miskin tidak seluruhnya direalisasi
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Rp1.347.407.000,00	1.078.136.242,00	269.270.758,00	Efisiensi Belanja serta Kegiatan yang tidak terealisasi yang sifatnya diluar perencanaan (risiko tak terkendali (uncontrollable risk) kejadian atau faktor eksternal yang dampaknya tidak bisa dihindari atau dimitigasi sepenuhnya
					Adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja yg



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
					belum mencapai 100%
Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp387.633.000,00	345.535.476,00	42.097.524,00	Adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja yg belum mencapai 100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp166.175.000,00	128.496.750,00	37.678.250,00	Adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja yg belum mencapai 100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp793.599.000,00	604.104.016,00	189.494.984,00	1. Rekening perdin biasa: masih ada yg belum realisasi terutama untuk anggaran evaluasi triwulan dikarenakan yg semula direncanakan dari kementerian pelaksanaannya melalui offline namun karena sesuatu hal pelaksanaan kegiatan melalui online 2. Untuk belanja pemeliharaan aset tidak berwujud tidak bisa terealisasi dikarenakan pedoman yang mengacu pada Permendagri No 19 tahun 2024 yang direncanakan dipublis di tahun 2025, karena sesuatu hal tidak dipublis sampai bulan



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
					Desember 2025 oleh Kemendagri 3. Adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja yg belum mencapai 100%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp29.805.961.050,00	28.923.805.092,00	882.155.958,00	Efisiensi Anggaran
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp16.735.851.000,00	16.276.749.750,00	459.101.250,00	- Adanya efisiensi belanja yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan (Hari Tumpek Wariga bertepatan dengan Hari Raya Nyepi) - Adanya kegiatan yang disesuaikan dengan permohonan dari pihak masyarakat
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	Rp1.235.485.050,00	864.032.967,00	371.452.083,00	- Terkait dengan belanja penghargaan suatu prestasi (santunan kematian veteran) sifatnya situasional karena dilaksanakan sesuai dengan permohonan usulan dari pihak masyarakat - Efisiensi anggaran dikarenakan adanya efisiensi



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
	Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				kegiatan Peringatan Hari Puputan Margarana yang bertepatan dengan Hari Raya Galungan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Rp11.834.625.000,00	11.783.022.375,00	51.602.625,00	- Terdapat 1 hibah yang tidak direalisasikan dikarenakan adanya perubahan/ pembatalan usulan dari pihak masyarakat dan sudah dilengkapi dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan/pemohon hibah
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	Rp2.557.109.500,00	2.496.218.956,00	60.890.544,00	- Efisiensi Anggaran - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
					seluruhnya direalisasikan. - Honorarium Kasus untuk masyarakat Miskin tidak seluruhnya direalisasi
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Rp991.086.000,00	982.862.976,00	8.223.024,00	Adanya Pengurangan bahan cetak, dan efisiensi biaya penginapan
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp1.288.138.500,00	1.251.091.265,00	37.047.235,00	Adanya Pengurangan bahan cetak, efisiensi biaya penginapan dan kasus untuk masyarakat miskin tidak realisasi karena tidak adanya permohonan dari masyarakat.
Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Rp277.885.000,00	262.264.715,00	15.620.285,00	Adanya Pengurangan bahan cetak, dan efisiensi biaya penginapan
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Rp3.183.390.900,00	3.007.607.968,00	175.782.932,00	Efisiensi Belanja serta Kegiatan yang tidak terealisasi yang sifatnya diluar perencanaan (risiko tak terkendali (uncontrollable risk) kejadian atau faktor eksternal yang dampaknya tidak bisa dihindari atau dimitigasi sepenuhnya



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp23.400.000,00	20.875.518,00	2.524.482,00	silpa anggaran terjadi dikarenakan ada efisiensi pada beberapa rekening
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp3.117.390.900,00	2.944.429.047,00	172.961.853,00	silpa anggaran terjadi karena terjadi bencana alam/ banjir, sehingga pimpinan tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp42.600.000,00	42.303.403,00	296.597,00	silpa terjadi karena kuantitas/ volume barang
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	Rp606.862.900,00	526.671.685,00	80.191.215,00	Terjadi pengurangan jadwal rapat dan adanya pembatalan Rapat Koordinasi dari Kemendagri
	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran				Efisiensi Anggaran
	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti				- Efisiensi Anggaran - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak seluruhnya direalisasikan.



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
					- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak seluruhnya direalisasikan.
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	Rp34.065.000,00	26.437.375,00	7.627.625,00	Terjadi pengurangan jadwal rapat dan adanya pembatalan Rapat Koordinasi dari Kemendagri
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp4.245.000,00	1.567.875,00	2.677.125,00	Terjadi pengurangan jadwal rapat
Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp20.800.000,00	19.099.750,00	1.700.250,00	Adanya pembatalan Rapat Koordinasi dari Kemendagri
Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp9.020.000,00	5.769.750,00	3.250.250,00	Terjadi pengurangan jadwal rapat



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	Rp26.330.000,00	14.654.120,00	11.675.880,00	Terjadi pengurangan jadwal rapat
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Rp26.330.000,00	14.654.120,00	11.675.880,00	Terjadi pengurangan jadwal rapat
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	Rp65.279.900,00	57.922.237,00	7.357.663,00	Efisiensi Anggaran
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Rp16.550.000,00	11.594.264,00	4.955.736,00	Sisa anggaran pada belanja makmin rapat (efisiensi) serta sisa belanja cetak (ada penyesuaian coretax pada sistem inaproc katalog elektronik versi 6)
Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp34.458.350,00	33.557.334,00	901.016,00	Sisa anggaran pada belanja makmin rapat (efisiensi) serta sisa belanja cetak (ada penyesuaian coretax pada



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
					sistem inaproc katalog elektronik versi 6)
Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp14.271.550,00	12.770.639,00	1.500.911,00	Sisa anggaran pada belanja makmin rapat (efisiensi) serta sisa belanja cetak (ada penyesuaian coretax pada sistem inaproc katalog elektronik versi 6)
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	Rp481.188.000,00	427.657.953,00	53.530.047,00	- Efisiensi Anggaran - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak seluruhnya direalisasikan. - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak seluruhnya direalisasikan.
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp185.350.000,00	182.650.000,00	2.700.000,00	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak tidak seluruhnya



Uraian	Indikator Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Analisis Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)		
Jasa					direalisasikan.
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp147.750.000,00	147.750.000,00	0,00	-
Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp148.088.000,00	97.257.953,00	50.830.047,00	- Efisiensi Anggaran - Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak seluruhnya direalisasikan. - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak seluruhnya direalisasikan.

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Denpasar bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran Tahun 2025, pada APBD Induk sebesar Rp 151.532.860.636, kemudian adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp Rp 25.326.566.280 menjadi Rp 176.859.426.916 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).



Program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Denpasar didukung dengan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Rp 176.859.426.916 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 149.474.487.995,00. Realisasi fisik 84,09% dari target 100%

Tabel 3.8 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Analisis Kegagalan/Keberhasilan	Solusi Yang Dilakukan
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar / Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	87,95%	88,10%	84,09%	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa Perangkat Daerah perlu mengkaji kembali dalam memformulasikan maupun dalam penentuan target IKU oleh karena masih memerlukan perbaikan ke depan oleh karena capaian saat ini yang belum memenuhi target - Berkaitan dengan kecermatan dalam penganggaran yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, diharapkan Perangkat Daerah dapat jeli dan lebih cermat dalam penganggaran - Mengkaji kembali terkait penentuan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun Renstra berikutnya memastikan bahwa Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran sudah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative - Meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. - Melakukan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar - Berkoordinasi secara intens dan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko di masing-masing Perangkat Daerah. Konsisten secara berkelanjutan tetap mengelola rencana kegiatan pengendalian



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Analisis Kegagalan/Keberhasilan	Solusi Yang Dilakukan
							baik melalui media/ bentuk sarana pengkomunikasian yang diperlukan. Masing-masing Perangkat Daerah juga tetap mengoptimalkan standar pelayanan dan prosedur operasi yang ramah, cepat dan akuntabel

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 84,09% yang diperoleh dari Persentase indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai dibagi Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah x100%, Adapun factor pendukung keberhasilan dalam pencapaian peningkatan tersebut adalah upaya peningkatan pelayanan yang terus dioptimalkan melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap koordinasi yang baik antara stakeholders, maupun antar Perangkat Daerah di Kota Denpasar; dukungan anggaran dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kegiatan juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar



Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	70,83	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,5	Menunjang



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100	Menunjang
			Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik	100	Menunjang
				Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	93	Menunjang
				Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	100	Menunjang
				Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik	100	Menunjang
				Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan	100	Menunjang
				Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	100	Menunjang



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	Menunjang
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	89.67	Menunjang
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Menunjang



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100	Menunjang
				Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	89.67	Menunjang
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	100	Menunjang



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	100	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100	Menunjang
			Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Menunjang



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100	Menunjang
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100	Menunjang
				Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100	Menunjang
				Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100	Menunjang



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100	Menunjang
			Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	100	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	Menunjang
			Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	100	Menunjang



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
			Pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan		
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	Menunjang

Program kegiatan yang menunjang merupakan program dan kegiatan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sekretariat Daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar dengan Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah) yang diukur melalui Pencapaian IKU Perangkat Daerah didukung melalui 3 Program, 16 Kegiatan serta didukung oleh 39 Sub Kegiatan



Tabel 3.10 Analisis Faktor Pendorong serta Penghambat per Kegiatan Tahun 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindakanlanjutan yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sudah tercapai target	-	Alasan adanya sisa anggaran antara lain karena tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN belum dapat direalisasikan akibat belum adanya regulasi yang mendukung. Selain itu, belanja iuran simpanan peserta TAPERA juga belum direalisasikan karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN dianggarkan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kekurangan dana dalam pembayaran pajak pada periode akhir.	Pencermatan dalam perencanaan dan koordinasi yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Belum maksimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait kegiatan yang akan diproses	Proses perencanaan yang lebih cermat dan peningkatan koordinasi serta evaluasi kegiatan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan	Sudah tercapai target	-	Adanya negosiasi harga	Pencermatan dalam perencanaan dan	Terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Belum maksimalnya koordinasi dengan	Proses perencanaan yang lebih cermat dan peningkatan



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
Perangkat Daerah	Pengolahan Administrasi Kepegawaian				koordinasi yang lebih baik		pihak-pihak terkait kegiatan yang akan diproses	koordinasi serta evaluasi kegiatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sudah tercapai target	-	Kebutuhan belanja alat tulis kantor, bahan cetak, bahan komputer, belanja alat listrik dan sewa tidak sepenuhnya terealisasi karena menyesuaikan kebutuhan bagian-bagian dan pimpinan, Belanja modal sudah terealisasi namun harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran.	Pencermatan dalam perencanaan dan koordinasi yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Belum maksimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait kegiatan yang akan diproses	Proses perencanaan yang lebih cermat dan peningkatan koordinasi serta evaluasi kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sudah tercapai target	-	Terealisasi namun nilai yang harus dibayarkan lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan.	Pencermatan dalam perencanaan dan koordinasi yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Belum maksimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait kegiatan yang akan diproses	Proses perencanaan yang lebih cermat dan peningkatan koordinasi serta evaluasi kegiatan
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi	Belum tercapai sesuai target	-	Terdapat sisa anggaran yang disebabkan oleh belanja insentif KDH dan WKDH yang hanya	Pencermatan dalam perencanaan dan koordinasi yang	Terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Belum maksimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Proses perencanaan yang lebih cermat dan peningkatan koordinasi serta



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			dapat direalisasikan pada salah satu rekening belanja, serta pelaksanaannya disesuaikan dengan rekening belanja yang memenuhi target dan Terjadi sisa anggaran karena hanya satu orang yang melaksanakan medical check up, sehingga sebagian anggaran tidak terealisasi.	lebih baik		kegiatan yang akan diproses	evaluasi kegiatan
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Sudah tercapai target	-	Belanja Kebutuhan rumah tangga tidak sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan awal karena adanya penyesuaian kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan dan Belanja makanan dan minuman tidak sepenuhnya terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan dan masyarakat.	Pencermatan dalam perencanaan dan koordinasi yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Belum maksimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait kegiatan yang akan diproses	Proses perencanaan yang lebih cermat dan peningkatan koordinasi serta evaluasi kegiatan
Kegiatan Penataan	Persentase	Sudah	-	- Efisiensi Anggaran	Akan membuat	-Koordinasi dengan Pusat	Kemampuan	- Melaksanakan



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
Organisasi	pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik	tercapai sesuai target.		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantr Bahan Cetak tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak seluruhnya direalisasikan. - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawewa Acara, dan Panitia tidak seluruhnya direalisasikan.	perencanaan yang baik.	maupun seluruh Perangkat Daerah yang baik -Tenaga SDM yang memadai -Aplikasi/sistem yang baik	kapasitas SDM yang belum memadai.	koordinasi dengan baik dengan tim evaluator pusat - Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah - Mengikuti pelatihan untuk ASN untuk meningkatkan kapasitas SDM
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Sudah tercapai sesuai target.	-	- Efisiensi Anggaran - Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang bergantung pada jadwal kegiatan pimpinan yang volumenya tidak menentu	Akan membuat perencanaan yang lebih cermat dan baik	- Koordinasi dengan pihak terkait baik dari intern pemkot maupun luar yang baik - Tenaga SDM yang memadai	- Ketidakpastian agenda pimpinan yang dipengaruhi aturan maupun kondisi politik daerah maupun nasional - Kapasitas SDM yang belum memadai dan bisa ditingkatkan lagi	- Melaksanakan koordinasi lebih baik lagi dengan intern maupun luar OPD - Menambah kemampuan SDM - Membuat perencanaan yang lebih cermat
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Belum tercapai sesuai target	Lebih intens berkoordinasi dengan Tim, Provinsi dan Pusat. Meningkatkan	1. Rekening perdin biasa: masih ada yg belum realisasi	Lebih cermat dalam merencanakan	Lebih intens berkoordinasi dengan Tim, Provinsi dan Pusat. Meningkatkan kapasitas	Seringnya ada perubahan regulasi dari pusat; tim	Melaksanakan koordinasi lebih intens dengan tim,



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
			kapasitas Aparatur dengan mengikuti Sosialisasi/Bimtek/Pendidikan dan Pelatihan	terutama untuk anggaran evaluasi triwulan dikarenakan yg semula direncanakan dari kementerian pelaksanaannya melalui offline namun karena sesuatu hal pelaksanaan kegiatan melalui online 2. Untuk belanja pemeliharaan aset tidak berwujud tidak bisa terealisasi dikarenakan pedoman yang mengacu pada Permendagri No 19 tahun 2024 yang direncanakan dipublis di tahun 2025, karena sesuatu hal tidak dipublis sampai bulan Desember 2025 oleh Kemendagri 3. Adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja yg belum mencapai 100%	kegiatan	Aparatur dengan mengikuti Sosialisasi/Bimtek/Pendidikan dan Pelatihan	teknis pada perangkat daerah sering berganti; kurangnya koordinasi dengan pusat terkait perubahan pedoman kebijakan	provinsi dan pusat; memfasilitasi pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Pendidikan dan Latihan kepada Tim Teknis
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Sudah tercapai sesuai target.	-	- Adanya efisiensi belanja yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi	Lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	- Koordinasi dan komunikasi yang baik di seluruh stakeholders dalam menjalankan tugas kerja	- Surat Permohonan Bantuan Aci-Aci dan Belanja Penghargaan Atas	- Lebih cermat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
Rakyat	Rakyat			<p>dilapangan (Hari Tumpek Wariga bertepatan dengan Hari Raya Nyepi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kegiatan yang disesuaikan dengan permohonan dari pihak masyarakat - Terkait dengan belanja penghargaan suatu prestasi (santunan kematian veteran) sifatnya situasional karena dilaksanakan sesuai dengan permohonan usulan dari pihak masyarakat - Efisiensi anggaran dikarenakan adanya efisiensi kegiatan Peringatan Hari Puputan Margarana yang bertepatan dengan Hari Raya Galungan - Terdapat 1 hibah yang tidak direalisasikan dikarenakan adanya perubahan/ pembatalan usulan dari pihak masyarakat dan sudah 		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kompetensi, keterampilan, motivasi kerja, dan disiplin aparatur sipil negara (ASN) - Ketersediaan anggaran yang memadai dan dialokasikan sesuai kebutuhan, serta sarana dan prasarana pendukung 	<p>Suatu Prestasi (Santunan Kematian Veteran) bersifat situasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan kapasitas SDM yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas ASN



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
				dilengkapi dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan/pemohon hibah				
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	Sudah tercapai sesuai target.	-	- Efisiensi Anggaran - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantr Bahan Cetak tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak seluruhnya direalisasikan. - Honorarium Kasus untuk masyarakat Miskin tidak seluruhnya direalisasi	Akan membuat perencanaan yang baik.	Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas	Kemampuan kapasitas SDM yang belum memadai.	Menyusun anggaran kas lebih cermat sesuai dengan timeline kegiatan yang akan dilakukan
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sudah tercapai sesuai target.	-	Silpa terjadi karena adanya efisiensi harga pada belanja sewa hosting, pimpinan tidak berangkat karena bencana alam / banjir, efisiensi volume belanja cetak	Melakukan kooedinasi dengan pusat dan instansi terkait	Adanya komitmen yang sama dalam menyelesaikan dokumen kerjasama dari perangkat daerah	Komunikasi tidak efektif, perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi, menyelaraskan tujuan bersama, membangun kepercayaan dan komitmen, mengoptimalkan sumber daya.
Kegiatan Pelaksanaan	Persentase Kebijakan	Sudah tercapai	-	- Terjadi pengurangan jadwal rapat pada Sub	Pencermatan dalam	Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup	Kemampuan kapasitas SDM	Menyusun anggaran kas lebih



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
Kebijakan Perekonomian	Perekonomian Yang ditindak lanjuti	sesuai target		Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Adanya pembatalan Rapat Koordinasi dari Kemendagri pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	perencanaan penganggaran kas	memadai untuk melaksanakan tugas	yang belum memadai.	cermat sesuai dengan timeline kegiatan yang akan dilakukan
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	Sudah tercapai sesuai target	-	Terjadi pengurangan jadwal rapat pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Pencermatan dalam perencanaan penganggaran kas	Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas	Kemampuan kapasitas SDM yang belum memadai.	Menyusun anggaran kas lebih cermat sesuai dengan timeline kegiatan yang akan dilakukan
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	Sudah tercapai sesuai target	-	SILPA anggaran belanja makmin rapat dan belanja cetak (efisiensi)	- Mengevaluasi penyerapan anggaran yang belum tercapai serta mempetakan perencanaan anggaran secara	- Adanya komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk mencapai tujuan strategis organisasi - Adanya sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi yang membantu dalam perencanaan,	Keterbatasan kapasitas SDM (kompetensi, motivasi, keterampilan), sistem dan prosedur yang tidak efektif, kebijakan yang	Memetalan dengan baik terkait langkah-langkah konkret termasuk alokasi sumber daya, tugas, dan jadwal, identifikasi risiko, dan tetapkan



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
					efektif, efisien dan bermanfaat mendukung tujuan strategis - Tetap memonitor dan mengevaluasi kinerja anggaran secara berkala - Mendiskusikan hasil evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi perbaikan	penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja - Koordinasi dan komunikasi yang baik di seluruh stakeholders dalam menjalankan tugas kerja - Meningkatnya kompetensi, keterampilan, motivasi kerja, dan disiplin aparatur sipil negara (ASN) - Ketersediaan anggaran yang memadai dan dialokasikan sesuai kebutuhan, serta sarana dan prasarana pendukung	tidak mendukung, serta masalah manajemen kinerja seperti ketidakjelasan target, penilaian yang bias, dan kurangnya reward/punishment yang sesuai	mekanisme monitoring serta evaluasi berkala untuk penyesuaian, memastikan semua proses terdokumentasi dengan jelas
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	Sudah tercapai sesuai target.	-	- Efisiensi Anggaran - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantr Bahan Cetak tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak seluruhnya direalisasikan. - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	Akan membuat perencanaan yang baik.	Sistem aplikasi yang terintegrasi.	Kemampuan kapasitas SDM yang belum memadai.	- Peningkatan kapasitas SDM pelaku Pengadaan Barang/Jasa. - Menyusun anggaran kas lebih cermat sesuai dengan timeline kegiatan yang akan dilakukan. - Menyusun perencanaan kegiatan secara



Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alasan realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Fisik yang belum tercapai sesuai target	Alasan realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Solusi kedepan terkait kendala realisasi Keuangan yang belum tercapai sesuai target	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindaklanjut yang Diperlukan untuk Rencana Kinerja Tahun Depan
				Pembawewa Acara, dan Panitia tidak seluruhnya direalisasikan. - Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak seluruhnya direalisasikan.				lebih cermat.



Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	139.358.695.566,00	113.442.048.052,00	81,40%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50.634.866.164,00	43.608.858.248,00	86,12%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50.634.866.164,00	43.608.858.248,00	86,12%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.663.356.684,00	9.626.388.498,00	90,28%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.663.356.684,00	9.626.388.498,00	90,28%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32.664.839.500,00	27.342.439.822,00	83,71%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32.664.839.500,00	27.342.439.822,00	83,71%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.912.994.000,00	2.905.758.885,00	74,26%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas		67.737.800,00	41,52%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	163.150.000,00		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	95.009.000,00	51.447.390,00	54,15%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.587.040.000,00	972.193.327,00	61,26%
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2.067.795.000,00	1.814.380.368,00	87,74%
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.840.974.218,00	4.177.452.640,00	71,52%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.752.781.618,00	1.145.759.240,00	41,62%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	3.893.400,00	6,49%
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.028.192.600,00	3.027.800.000,00	99,99%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15.860.797.200,00	11.568.462.733,00	72,94%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15.860.797.200,00	11.568.462.733,00	72,94%
Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik	157.208.000,00	109.306.047,00	69,53%
	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja			
	Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009			
	Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik			
	Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan			
	Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	43.426.000,00	23.105.012,00	53,21%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25.600.000,00	22.547.000,00	88,07%
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	88.182.000,00	63.654.035,00	72,18%
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	19.623.659.800,00	14.103.381.179,00	71,87%
Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	11.310.370.800,00	6.626.623.243,00	58,59%
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	7.823.444.000,00	7.047.711.751,00	90,08%
Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	489.845.000,00	429.046.185,00	87,59%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	36.893.868.450,00	35.505.768.258,00	96,24%
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM			
	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah			



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	1.347.407.000,00	1.078.136.242,00	80,02%
Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	387.633.000,00	345.535.476,00	89,14%
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	166.175.000,00	128.496.750,00	77,33%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	793.599.000,00	604.104.016,00	76,12%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29.805.961.050,00	28.923.805.092,00	97,04%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.735.851.000,00	16.276.749.750,00	97,26%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	1.235.485.050,00	864.032.967,00	69,93%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
	Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	11.834.625.000,00	11.783.022.375,00	99,56%
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	2.557.109.500,00	2.496.218.956,00	97,62%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	991.086.000,00	982.862.976,00	99,17%
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1.288.138.500,00	1.251.091.265,00	97,12%
Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	277.885.000,00	262.264.715,00	94,38%
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	3.183.390.900,00	3.007.607.968,00	94,48%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	23.400.000,00	20.875.518,00	89,21%
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	3.117.390.900,00	2.944.429.047,00	94,45%
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	42.600.000,00	42.303.403,00	99,30%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	606.862.900,00	526.671.685,00	86,79%
	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran			
	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti			
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	34.065.000,00	26.437.375,00	77,61%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.245.000,00	1.567.875,00	36,93%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi	20.800.000,00	19.099.750,00	91,83%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
	Perekonomian			
Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	9.020.000,00	5.769.750,00	63,97%
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	26.330.000,00	14.654.120,00	55,66%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	26.330.000,00	14.654.120,00	55,66%
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	65.279.900,00	57.922.237,00	88,73%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	16.550.000,00	11.594.264,00	70,06%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	34.458.350,00	33.557.334,00	97,39%
Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	14.271.550,00	12.770.639,00	89,48%



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	481.188.000,00	427.657.953,00	88,88%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	185.350.000,00	182.650.000,00	98,54%
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	147.750.000,00	147.750.000,00	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	148.088.000,00	97.257.953,00	65,68%

Dalam mencapai target kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar / Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah) untuk Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp 176.859.426.916 dan terealisasi sebesar Rp 149.474.487.995, meliputi Belanja Operasi sebesar Rp 160.187.126.916,00 dengan realisasi Rp 134.736.177.362,00 atau 84,11%; Belanja Modal sebesar Rp 16.672.300.000,00, dengan realisasi Rp 14.738.310.633,00 atau 88,40%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 27.384.938.921,00. Analisis sisa anggaran perprogram/kegiatan/sub kegiatan tertuang dalam Tabel. 3.7 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.



BAB IV



BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban dan sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar selama tahun 2025 melalui 3 Program, 16 Kegiatan serta didukung oleh 39 Sub Kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 telah menyajikan berbagai capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar, pencapaian sasaran diukur dari Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah melalui Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah. Secara garis besar dari hasil analisis LKjIP Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat disimpulkan:

1. Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar yaitu Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah) dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah melalui Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah belum tercapai dari target sebesar 84,09%.
2. Anggaran yang berhasil diefisiensi sebesar Rp 27.384.938.921,00 atau 15,48%
3. Faktor penghambat belum tercapainya target indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah capaian IKU Perangkat Daerah yang tidak tercapai dari target yang ditentukan. Oleh karena kurang pengkajian dalam penentuan target indikator serta formulasi penentuan IKU yang masih belum tepat dan efektif untuk dilaksanakan dalam mendukung sasaran kerjanya serta belum optimalnya sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Faktor pendorong kinerja baik program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah adalah bahwa Sekretariat Daerah telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dalam merumuskan kebijakan baik dalam melakukan pemantauan maupun evaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

Sekretariat Daerah Kota Denpasar di Tahun 2025 berhasil memperoleh penghargaan yaitu:

- 1) Bagian Tata Pemerintahan
 - Pada Tanggal 25 April 2023 di Kota Makasar, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar memperoleh peringkat ke- 5 Nasional dari 92 Kota dengan skor 3,38 prestasi status kinerja tinggi
 - Pada 25 April 2024, di Kota Surabaya Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7 – 6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar memperoleh peringkat ke- 10 Nasional dari 93 Kota dengan skor 3,4439 prestasi status kinerja tinggi. Dan sekaligus Bapak Walikota Denpasar memperoleh tanda jasa kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Nugraha dari Presiden RI.
 - Pada 25 April 2025, di Kota Balikpapan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7 – 2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024, Pemerintah Kota Denpasar memperoleh peringkat ke- 2 Nasional dari 90 Kota dengan skor 3,7751 prestasi status kinerja tinggi.
 - Pada tanggal 1 Desember 2025 di Jakarta Pemerintah Kota Denpasar memperoleh kota kinerja pemerintah daerah terbaik tahun 2025 yang diberikan oleh Kemendagri dan Tempo.
- 2) Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
 - Pada 21 Pebruari 2024, Penghargaan Juara II Debat Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh DPD IAPI Provinsi Bali
 - Pada 11 Juni 2024,

Piagam Penghargaan Pemenang Pemerintah Kota Dengan Jumlah Transaksi PDN Terbanyak

- Pada 10 Oktober 2024
Penghargaan UKBP Proakfit dan Nilai ITKP Tertinggi Kategori Pemerintah Kota Tahun 2024

3) Bagian Hukum

- Pada 14 Agustus 2024
Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Terbaik I oleh Kemenkum HAM RI
- Pada 11 Nopember 2024
Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Denpasar adalah 98.90 dengan kategori AA (ISTIMEWA) oleh Kementerian Hukum RI
- Pada 10 Desember 2024
Mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Menteri HAM RI
- Pada 11 Desember 2024
Juara I kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 (Penyuluhan Hukum bagi Lansia, Disabilitas, dan Masyarakat secara Online)
- 20 Nopember 2025
Pemerintah Kota Denpasar memperoleh Kategori Unggul Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 oleh LAN RI
- 13 Oktober 2025
Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 hasil Indeks Reformasi Hukum adalah 100 dengan kategori AA (ISTIMEWA) oleh Kemenhum RI

4) Bagian Organisasi

- Pada 14 Nopember 2024,
Pemerintah Kota Denpasar berhasil memperoleh Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 97, 93 kategori Kualitas tertinggi (A) pada Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia

- Pada tanggal 9 Januari 2026,
Pemerintah Kota Denpasar berhasil memperoleh Nilai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Indeks 4,80 dan menjadi Peringkat 3 Nasional untuk Kategori Kota dan menjadi Nilai Tertinggi di Provinsi Bali Tahun 2025.
- 5) Bagian Perekonomian
Pada 24 Agustus 2024,
Pemerintah Kota Denpasar menerima Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu terpilih sebagai Juara 1 Kategori Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota. Pencapaian ini diraih melalui kolaborasi dalam program Kejarku Pandai (Satu Rekening Satu Pelajar, Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Denpasar
- 6) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pada September 2021,
Pemerintah Kota Denpasar meraih Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021 kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media Digital yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia (PR Indonesia Group) bekerja sama dengan KAZEE Digital Indonesia.
5. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan ke depan untuk meningkatkan sasaran kinerja Sekretariat Daerah adalah:
- 1) Meningkatkan fasilitasi pengkoordinasian kebijakan daerah baik di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama, perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa, kebijakan umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan
 - 2) Meningkatkan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
 - 3) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - 4) Meningkatkan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah



- 5) Peningkatan pemberian bimbingan teknis bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman, kinerja pelayanan dan peningkatan disiplin kerja
- 6) Mengoptimalkan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan fisik dan keuangan sesuai program yang telah ditetapkan
- 7) Sistem kerja yang terintegrasi menuntut kesesuaian antara perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang lebih akurat dan konsisten

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025, dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Instansi dan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan di tahun berikutnya.

Denpasar, 24 Pebruari 2026

Sekretaris Daerah Kota Denpasar




Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si 
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680924 199303 1 010



LAMPIRAN





පරිපාලන අංශය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ කාර්යාලය
SEKRETARIAT DAERAH

රජයේ සේවයේ පරිපාලන අංශයේ පරිපාලන අංශයේ (පළාත්) ප්‍රධාන සේවකයා (පළාත්) ප්‍රධාන සේවකයා
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

Jabatan : Walikota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

Denpasar, 3 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,


Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

NIP. 19680924 199303 1 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	1 Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100 %



PIHAK KEDUA,

Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.



Denpasar, 3 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010



ပိဗ်းၵိၵ်ႉ ၵူၼ်း ၵူၼ်း
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ၵူၼ်း
SEKRETARIAT DAERAH

တၢ်ပိၵ်ႉတၢ်ပူၼ်ႉတၢ်ပူၼ်ႉတၢ်ပူၼ်ႉတၢ်ပူၼ်ႉတၢ်ပူၼ်ႉတၢ်ပူၼ်ႉတၢ်ပူၼ်ႉတၢ်ပူၼ်ႉ
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT

Jabatan : Asisten Administrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ida Bgs Alit Wiradana, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 1 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



Ida Bgs Alit Wiradana, S.Sos, M.Si
NIP. 19651110 198602 1 012

PIHAK PERTAMA,



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
NIP. 19671007 199703 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan pelayanan administrasi umum	1	Capaian Perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan	100%
PROGRAM DAN KEGIATAN				ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				-
Kegiatan Penataan Organisasi				-
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				-
TOTAL				

Denpasar, 1 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



Ida Egs Alit Wiradana, S.Sos, M.Si
NIP. 19651110 198602 1 012

PIHAK PERTAMA,



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
NIP. 19671007 199703 1 004



පිටිහිඳු ආරාම ආකෘතිය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
රාජ්‍ය පාලන බැංකු
SEKRETARIAT DAERAH

රාජ්‍ය පාලන බැංකු ආරාම ආකෘතිය (පළාත්) ප්‍රධාන කාර්යාල (පළාත්) ප්‍රධාන කාර්යාල
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ida Bgs Alit Wiradana, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,



Ida Bgs Alit Wiradana, S.Sos, M.Si
NIP. 19651110 198602 1 012

Denpasar, 1 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si
NIP. 19780128 199612 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan pelayanan prima bidang perekonomian dan pembangunan	1 Capaian Perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam	100%
PROGRAM DAN KEGIATAN			ANGGARAN
Program Perekonomian dan Pembangunan			-
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			-
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam			-
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			-
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			-
TOTAL			-

Denpasar, 1 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos, M.Si
NIP. 19651110 198602 1 012



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si
NIP. 19780128 199612 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan pelayanan prima bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1	Capaian Perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerja Sama	100%
	PROGRAM DAN KEGIATAN			ANGGARAN
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			-
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			-
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			-
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			-
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			-
	TOTAL			-

Denpasar, 3 Desember 2025



PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010



PIHAK PERTAMA,

Komang Lestari Kusuma Dewi, SH., MH
NIP. 19750917 199903 2 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
STAF AHLI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA DENPASAR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA	TARGET
1.	Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan pengoordinasian dan pelayanan administratif bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	1. Tersedianya kajian / telaahan terkait dengan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia	2 Laporan
		2. Terlaksananya Rapat Kerja Staf Ahli se- Bali	10 Kali
		3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Staf Ahli se-Bali	2 Kali

Denpasar, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA,

Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

PIHAK PERTAMA,

Luh Made Kusuma Dewi, SS, M.Hum
 NIP. 19730303 199803 2 010



පිටිසිසු ආකාශ ආකාසම
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ආණ්ඩුපාලන අංශය
SEKRETARIAT DAERAH

රජයේ සේවයේ පාලන කාර්යාලය
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM KOTA DENPASAR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si

Jabatan : Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA,

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

PIHAK PERTAMA,

Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si
NIP. 19691128 200701 1 021

PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA

STAF BIDANG AHLI PEMERINTAHAN DAN HUKUM KOTA DENPASAR


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA	TARGET
1.	Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan pengoordinasian dan pelayanan administratif bidang Pemerintahan dan Hukum terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	1. Tersedianya kajian / telaahan terkait dengan bidang Pemerintahan dan Hukum	2 Laporan
		2. Terlaksananya Rapat Kerja Staf Ahli se-Bali	10 Kali
		3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Staf Ahli se-Bali	2 Kali

Denpasar, 2 Desember 2025



PIHAK KEDUA,


Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.



PIHAK PERTAMA,


Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si
NIP. 19691128 200701 1 021



පිටිහිසුරු ආකර්ම ආකර්මය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ආසන්නාහුණි කලාප
SEKRETARIAT DAERAH

කලාපීය පාලන ආයතන ආකර්ම ආකර්මය (පළාත්) පාලන ආයතන පාලන ආයතන
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

Jabatan : Walikota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Pebruari 2026

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

NIP. 19680924 199303 1 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	1.	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))	90-100
		2.	Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	80.00-90.99
2.	Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	1.	Nilai LPPD (Nilai)	3.41-4.20
		2.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,7
		3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	90.01-99.99
3.	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	1.	Nilai SKM (Nilai)	88.31-100
		2.	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))	99.01-100

PIHAK KEDUA,

Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

Denpasar, 2 Pebruari 2026

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

NIP. 19680924 199303 1 010



පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

රාජ්‍ය සේවා කොට්ඨාසය
SEKRETARIAT DAERAH

පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව (පළාත්) කොට්ඨාසය (පළාත්) කොට්ඨාසය
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534

Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komang Lestari Kusuma Dewi, SH., MH.

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Januari 2026



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH., MH
NIP. 19750917 199903 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100
	PROGRAM DAN KEGIATAN			ANGGARAN
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			-
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			-
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			-
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			-
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah			-
	TOTAL			-

Denpasar, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010

PIHAK PERTAMA,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH., MH
NIP. 19750917 199903 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	1. Persentase terlaksananya kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan (%)	100
	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Perekonomian dan Pembangunan		-
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		-
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		-
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		-
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		-
	TOTAL		-

Denpasar, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010



Dr. Ida Bagus Ari Adhi Merta, SSTP, M.Si
NIP. 19780128 199612 1 003



පිටිහිලුතු ආකාශ ආකෘතිය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ආණ්ඩුපාලන අංශය
SEKRETARIAT DAERAH

පළාත් පාලන ආයතන පිටිහිලුතු ආකෘතිය (පිටිහිලුතු) උපදෙස් පත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් (පිටිහිලුතු) උපදෙස් පත්‍රයකි.
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT

Jabatan : Asisten Administrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010


I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
NIP. 19671007 199703 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKDA KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA		TARGET
1.	Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan dan Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum	1.	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100
		2.	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum (%)	100
PROGRAM DAN KEGIATAN				ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				-
Kegiatan Penataan Organisasi				-
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				-
TOTAL				

Denpasar, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010



I. Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
NIP. 19671007 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ꦥꦼꦩꦶꦂꦠꦏꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦱꦫꦺꦴ
ꦱꦼꦏꦼꦠꦂꦶꦢꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦱꦫꦺꦴ
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM KOTA DENPASAR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si

Jabatan : Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA,



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

PIHAK PERTAMA,



Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si
NIP. 196901128 200701 1 021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
STAF BIDANG AHLI PEMERINTAHAN DAN HUKUM KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA	TARGET
1.	Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan pengoordinasian dan pelayanan administratif bidang Pemerintahan dan Hukum terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	1. Tersedianya kajian / telaahan terkait dengan bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan

Denpasar, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

PIHAK PERTAMA,

Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si
NIP. 19691128 200701 1 021



පිටිහිලු ආකර්ෂ ආකර්ෂ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ආසන්නාහුහි නරහ
SEKRETARIAT DAERAH

රජයේ පරිපාලන ආකර්ෂ ආකර්ෂ ආකර්ෂ ආකර්ෂ (පුරුදු) පුරුදු පුරුදු පුරුදු (පුරුදු) පුරුදු පුරුදු
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
STAF AHLI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luh Made Kusuma Dewi, SS, M.Hum

Jabatan : Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.



Luh Made Kusuma Dewi, SS, M.Hum
NIP. 19730303 199803 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
STAF AHLI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/KINERJA	TARGET
1.	Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan pengoordinasian dan pelayanan administratif bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	1. Tersedianya kajian / telaahan terkait dengan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia	10 Laporan

Denpasar, 2 Januari 2026



PIHAK KEDUA,

Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.



PIHAK PERTAMA,

Luh Made Kusuma Dewi, SS, M.Hum
NIP. 19730303 199803 2 010

Formulasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah (PD) adalah Indikator Kinerja Utama yang menjadi alat ukur keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel	Indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai dibagi Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah x100%	Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah	100%

Denpasar, 3 Januari 2025

Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Ida Bgs Alit Wiradana, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651110 198602 1 012

Formulasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen pengukuran oleh Kementerian Hukum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola regulasi, deregulasi, dan penguatan sistem hukum di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian ini bertujuan menciptakan regulasi yang bersih, akuntabel, dan mendukung investasi, dengan fokus pada harmonisasi, kompetensi perancang peraturan, dan pemutakhiran data hukum.	Indeks Reformasi Hukum diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan indikator penilaian sebagai berikut : 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%); 2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) pusat yang berkualitas (bobot 25%); 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35%); 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	90-100
	Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	Indeks Kualitas Kebijakan diperoleh dari penilaian LAN RI dengan menilai kebijakan yang disusun dalam kurun waktu 3 tahun sebelum tahun pengukuran dan telah berlaku efektif 1 tahun dalam	Kerangka instrumen IKK terdiri dari 2 dimensi yaitu Dimensi Perencanaan Kebijakan dan dimensi Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan. Dimensi ini kemudian terbagi atas 4 Sub dimensi, 13 indikator dan 39 pertanyaan.	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	(Nilai) 80.00-90.99

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
		bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Adapun nilai akhir IKK terdiri dari predikat sebagai berikut : 1. 91.00 - 100 predikat Unggul 2. 80.00 - 90.00 predikat Sangat Baik 3. 65.00 - 79.99 predikat Baik 4. 50.00 - 64.99 predikat Cukup 5. < 50.00 predikat Kurang			
Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD (Nilai)	Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah skor hasil evaluasi pusat terhadap kinerja pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam satu tahun anggaran. Penilaian mencakup capaian kinerja makro (IPM, kemiskinan, pengangguran) serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Penghitungan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. dan berdasarkan skor kinerja yang diperoleh, maka disusun rangking kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota. Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan kedalam 5 (lima) klasifikasi. Nilai LPPD berdasarkan EKPPD: NO Skor Kinerja Status Kinerja 1. 1.00-1.80 Sangat Rendah 2. 1.81-2.60 Rendah 3. 2.61-3.40 Sedang 4. 3.41-4.20 Tinggi 5. 4.21-5.00 Sangat Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah	3.41-4.20
	Nilai SAKIP Komponen	Komponen pelaporan kinerja dalam SAKIP mengukur transparansi dan	Nilai Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen dari penilaian	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah	11,7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
	Pelaporan Kinerja (Nilai)	akurasi laporan kinerja (LKjIP) untuk memastikan pertanggungjawaban serta umpan balik perbaikan. Penilaian difokuskan pada keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan laporan, dengan bobot yang signifikan dalam evaluasi tahunan. Laporan ini harus memuat realisasi kinerja terhadap target.	SAKIP. Bobot Maksimal dalam penilaian Pelaporan Kinerja adalah 15. Penilaian Pelaporan Kinerja dilakukan oleh Tim Evaluator Kemenpan RB			
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah indikator kinerja yang ditetapkan LKPP untuk mengukur tingkat kematangan, profesionalisme, dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah. ITKP merupakan bagian penting dari evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencakup aspek SDM, kelembagaan, dan pemanfaatan sistem elektronik (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak)	Indeks Tata Kelola Pengadaan yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia dengan indikator penilaian sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang terdiri dari SiRUP, E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat), E-Purchasing, Non E- Tendering & Non E-Purchasing dan E-Kontrak (bobot 30%) ; 2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) (bobot 30%); 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (bobot 40%).	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris Daerah	90.01-99.99

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM (Nilai)	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) adalah hasil kuantitatif dari survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan tujuan sebagai tolok ukur perbaikan mutu pelayanan oleh instansi pemerintah	Nilai SKM diperoleh berdasarkan hasil kompilasi dari seluruh nilai SKM Perangkat Daerah. Dimana dalam pelaksanaannya SKM mempedomani Permenpan 14 Tahun 2017 yakni menilai 9 unsur dari proses penyelenggaraan layanan pada masing-masing Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah	88.31-100
	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM) adalah nilai yang menunjukkan persentase capaian mutu layanan dasar yang berhak diterima setiap warga negara, hasil dari perkalian persentase capaian mutu dengan bobot pelayanan dasar. Indeks ini menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam urusan wajib (pendidikan, kesehatan, PU, perumahan, sosial, trantibumlinmas) sesuai Permendagri 59/2021.	IP SPM diperoleh dari Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan indikator penilaian sebagai berikut: 1. Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan Dasar (bobot 20 %); 2. Indeks pencapaian Penerima Pelayanan Dasar (bobot 80 %)	Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah	99.01-100



Denpasar, 2 Januari 2026
 Pt. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680924 199303 1 010

Rencana Aksi Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator				
									TW I		TW II		TW III		TW IV							
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%	Kuantitas		
Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	%	139.358.695.566,00	Menyesuaikan dengan Bagian pengampu oleh karena anggaran program ada pada masing-masing pengampu kegiatan														Terkait	Sekretaris Daerah	Asisten Administrasi Umum
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	Orang / Bulan	50.634.866.164,00	Menyusun daftar gaji dan tunjangan ASN, Penginputan data gaji dan tunjangan, pelaporan realisasi gaji dan tunjangan	185	Orang/bulan	25	0	50	0	75	0	100	185	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	Orang / Bulan	50.634.866.164,00	Menyusun daftar gaji dan tunjangan ASN, Penginputan data gaji dan tunjangan, pelaporan realisasi gaji dan tunjangan	185	Orang/bulan	25	0	50	0	75	0	100	185	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum			

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14	Dokumen	10.663.356.684,00	Mengumpulkan data administrasi kepegawaian, Pemutakhiran data ASN akibat perubahan status (kenaikan pangkat, mutasi, pensiun dan lain-lain), penginputan dan pengolahan data kepegawaian, penyusunan dan pengarsipan dokumen kepegawaian, rekonsiliasi data kepegawaian dengan BKPSDM, penyusunan laporan administrasi kepegawaian	14 Dokumen	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25	0	50	0	75	0	100	14	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14	Dokumen	10.663.356.684,00	Mengumpulkan data administrasi kepegawaian, Pemutakhiran data ASN akibat perubahan status (kenaikan pangkat, mutasi, pensiun dan lain-lain), penginputan dan	14 Dokumen	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25	0	50	0	75	0	100	14	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
						pengolahan data kepegawaian, penyusunan dan pengarsipan dokumen kepegawaian, rekonsiliasi data kepegawaian dengan BKPSDM, penyusunan laporan administrasi kepegawaian													
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Laporan	32.664.839.500,00	Melakukan inventarisasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, pelaksanaan pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, melakukan distribusi peralatan dan perlengkapan kepada unit kerja, penginputan ke sistem inventaris.	24 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	5	50	10	75	14	100	24	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	24	Laporan	32.664.839.500,00	Melakukan inventarisasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, pelaksanaan pengadaan jasa	24 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap	25	5	50	10	75	14	100	24	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				peralatan dan perlengkapan kantor, melakukan distribusi peralatan dan perlengkapan kepada unit kerja, penginputan ke sistem inventaris.		an Kantor yang Disediakan											
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.912.994.000,00	Inventarisasi kondisi BMD, Penyusunan kebutuhan pemeliharaan, Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, melakukan monitoring dan evaluasi.	100	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166	Unit	163.150.000,00	Melakukan pendataan dan inventarisasi kendaraan dinas operasional, menyusun rencana kebutuhan pajak dan perizinan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan (STNK, KIR dan lain-lain)	166	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	40	50	80	75	120	100	166	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
	n Dinas Operasional atau Lapangan																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18	Unit	95.009.000,00	Melakukan inventarisasi dan pendataan kondisi mebel kantor, melakukan identifikasi kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan mebel dan melakukan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mebel.	18 Unit	Mebel yang Dipelihara	25	4	50	8	75	12	100	18	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142	Unit	1.587.040.000,00	Melakukan inventarisasi dan pendataan peralatan dan mesin lainnya beserta kondisi fisik, identifikasi kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan peralatann dan mesin	142 Unit	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	30	50	60	75	90	100	142	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	Unit	2.067.795.000,00	Melakukan inventarisasi dan penilaian kondisi sarana dan prasarana gedung/bangunan, melakukan identifikasi kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi dan melakukan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	3 Unit	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25	0	50	0	75	0	100	3	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	5.840.974.218,00	Melakukan perencanaan kebutuhan operasional, pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.	100	Persentase	20,83	1	33,33	0	50	0	70,83	70,83	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas		Koordinator	Pelaksana
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang / Bulan	2.752.781.618,00	Menyusun daftar gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penginputan data ke sistem penggajian, pelaporan realisasi pembayaran.	2 Orang/Bulan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang	60.000.000,00	Menyusun rencana pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelaksanaan medical check up, pengarsipan dokumen dan pelaporan kegiatan	8 Orang	Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,5	1	0	0	0	0	12,5	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional	2	Orang / Bulan	3.028.192.600,00	Menyusun rencana kebutuhan dana penunjang operasional, penyusunan dan verifikasi dokumen	2 Orang/bulan	Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas		Koordinator	Pelaksana
	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				administrasi keuangan dan penyaluran dana penunjang operasional		1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
	Kegiatan Fasilitasi Kerumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	Paket	15.860.797.200,00	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan rumah tangga sekretariat, penyusunan perencanaan kebutuhan, distribusi kebutuhan rumah tangga ke unit kerja terkait, pengelolaan dan penggunaan kebutuhan rumah tangga.	17 Paket	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	25	4	50	8	75	12	100	17	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	Paket	15.860.797.200,00	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan rumah tangga sekretariat, penyusunan perencanaan kebutuhan, distribusi	17 paket	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	25	4	50	8	75	12	100	17	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
	Sekretariat Daerah					kebutuhan rumah tangga ke unit kerja terkait, pengelolaan dan penggunaan kebutuhan rumah tangga.													
	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik	100	%	157.208.000,00	Melaksanakan pembinaan dan permintaan data renaksi RB General dan Tematik ke OPD pengampu	1 Dokumen	Laporan Renaksi RB	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi
Nilai Capaian Pelaporan Kinerja		12,87	Nilai	Melakukan pembinaan ke semua PD untuk menyusun LKJIP sesuai dengan sistematika Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014		1 Dokumen	Laporan Pembinaan penyusunan LKJIP	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi	
Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009		100	%	Melakukan pembinaan ke semua OPD terkait pelaksanaan Pelayanan Publik		1 Laporan	Laporan pelaksanaan Yanlik	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi	

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
		Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik	100	%		Melakukan pembinaan ke semua OPD terkait pelaksanaan survei SKM	1 Laporan	Laporan pelaksanaan SKM	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi
		Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan	100	%		Melaksanakan analisis dan perubahan terhadap Anjab	1 Dokumen	Dokumen Anjab ABK	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi
		Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	100	%		Melaksanakan analisis sesuai adanya permintaan perubahan SOTK	1 Dokumen	Dokumen fasilitasi perubahan SOTK	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	43.426.000,00	Melaksanakan analisis sesuai adanya permintaan perubahan SOTK dan Anjab ABK	2 Dokumen	Dokumen fasilitasi perubahan SOTK dan Anjab ABK	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	25.600.000,00	Melakukan pembinaan ke semua OPD terkait pelaksanaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Laporan pelaksanaan Yanlik dan Talak	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	88.182.000,00	Melakukan pembinaan ke semua OPD terkait pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Laporan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100	%	19.623.659.800,00	Mengatur pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, pendampingan kegiatan pimpinan dan Penyusunan materi komunikasi, dokumentasi, rilis, dan publikasi kegiatan pimpinan	100%	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	11.310.370.800,00	Menyusun laporan hasil fasilitasi keprotokolan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	12 Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	25	3	50	6	75	9	100	12	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	7.823.444.000,00	Menyusun laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	12 Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	25	3	50	6	75	9	100	12	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan	489.845.000,00	Menyusun laporan pendokumentasian tugas pimpinan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	4 Laporan	Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	25	1	35	1	50	1	100	4	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Nilai LPPD berdasarkan EKPPD : Skor Kinerja Status Kinerja 1. 1.00-1.80 Sangat Rendah 2. 1.81-2.60	36.893.868.450,00	Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan diantaranya capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian Akuntabilitas	Sangat Tinggi	Nilai LPPD	36	0	64,3	0	87,6	0	89,67	Tinggi	Terkait	Sekretaris Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
				Rendah 3. 2.61-3.40 Sedang 4. 3.41-4.20 Tinggi 5. 4.21-5.00 Sangat Tinggi		kinerja Pemda , capaian kinerja prlaksanaan tugas pembantuan													
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%		Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100 Persen	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
		Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100	%		Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum dan pengelolaan informasi hukum	100 %	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi	25	25	50	50	75	75	100	100	Terka it	Sekreta ris Daerah	
		Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100	%		Melakukan koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan Perangkat Daerah dan pihak ketiga/lembaga	100 %	Dokumen hasil fasilitasi	0.90	0.90	2.17	2.17	2.24	2.24	100	100	Terka it	Sekreta ris Daerah	
	Kegiatan Administ rasi Tata Pemerint ahan	Nilai LPPD	San gat Tin ggi	Nilai	1.347.407.00 0,00	Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan diantaranya capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian	San gat Tin ggi	Nilai LPPD	36	0	64,3	0	87 .6	0	89,67	Tinggi	Terka it	Sekreta ris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerint ahan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
						Akuntabilitas kinerja Pemda , capaian kinerja prlaksanaan tugas pembantuan													
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dokumen	387.633.000,00	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan Apeksi, HUT Kota, HUT Otda, HUT Provinsi, HUT RI dan Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	48	0	68	0	98	0	100	3	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	Dokumen	166.175.000,00	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait Pembinaan Kelurahan, PATEN, Tapal Batas Wilayah dan Rupa Bumi.	4 Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10	0	50	0	75	0	100	4	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	793.599.000,00	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait Peningkatan capaian Penerapan SPM Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan	4 Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	50	2	75	3	90	0	100	4	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas		Koordinator	Pelaksana
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%	29.805.961.050,00	Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	Dokumen	16.735.851.000,00	Menyusun Dokumen Kegiatan Upakara Piodalan, Dokumen Kegiatan Ngaturang Penganyar, Dokumen Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	4	Dokumen	25	0	50	0	75	0	100	4	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas		Koordinator	Pelaksana
							Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)												
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	5	Dokumen	1.235.485.050,00	Menyusun Dokumen Kegiatan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar dan Ziarah Peringatan Hari-Hari Bersejarah, Dokumen Kegiatan Peringatan Kebangkitan Nasional, Dokumen Kegiatan Peringatan Kesaktian Pancasila, Dokumen Kegiatan Peringatan Puputan Margarana, dan Dokumen Kegiatan Pemberian Penghargaan Uang kepada Ahli Waris Veteran Republik Indonesia	5 Dokumen	Dokumen Kegiatan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar dan Ziarah Peringatan Hari-Hari Bersejarah, Dokumen Kegiatan Peringatan Kebangkitan Nasional, Dokumen Kegiatan Peringatan Kesaktian Pancasila, Dokumen Kegiatan Peringatan Puputan Margarana, dan Dokumen Kegiatan Pemberian Penghargaan Uang kepada Ahli Waris Veteran Republik Indonesia	25	0	50	0	75	0	100	5	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
						Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV		Koordinator		Pelaksana	
									%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas				
		Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						Margarana, dan Dokumen Kegiatan Pemberian Penghargaan Uang kepada Ahli Waris Veteran Republik Indonesia												
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	5	Dokumen	11.834.625.000,00	Menyusun Dokumen Pelaksanaan Pengusulan Proposal Hibah Uang dan Hibah Barang Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pencairan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Dokumen Kegiatan Monitoring	5 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pengusulan Proposal Hibah Uang dan Hibah Barang Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pencairan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan	25	0	50	0	75	0	100	5	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas		Koordinator	Pelaksana
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100	%	2.557.109.500,00	Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum dan pengelolaan informasi hukum	100 %	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5	Dokumen	991.086.000,00	Menyusun Produk Hukum Daerah yang berkualitas	5 Dokumen	Produk Hukum Daerah yang disusun	20	0	60	0	80	0	100	5	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	Kasus	1.288.138.500,00	Menyelenggarakan fasilitasi bantuan hukum dan penanganan permasalahan hukum yang efektif, efisien, tepat sasaran, sehingga terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan	5 Kasus	Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	0	60	0	80	0	100	5	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas		Koordinator	Pelaksana
	Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dokumen	277.885.000,00	Mengelola jaringan dokumentasi informasi hukum melalui pendokumentasian dan penginformasian produk- produk hukum daerah dan dokumen hukum lainnya melalui Jaringan Dokumentasi Hukum	100 Dokumen	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	20	0	60	0	80	0	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100	%	3.183.390.900,00	Melakukan koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan Perangkat Daerah dan pihak ketiga/lembaga	100 %	Dokumen hasil fasilitasi	0.90	0.90	2.17	2.17	2.24	2.24	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	Dokumen	23.400.000,00	Melakukan koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga (dokumen	25 dokumen	Dokumen kesepakatan bersama	24	6	40	10	76	19	100	25	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
						kesepakatan bersama)													
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	6	Dokumen	3.117.390.900,00	Melakukan koordinasi dan Fasilitas pelaksanaan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di Luar Negeri dan kerja sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	6 dokumen	Dokumen hasil fasilitas kerjasama dengan Luar Negeri	20	0	40	0	100	6	100	6	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Laporan	42.600.000,00	Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan perangkat daerah dan pihak ketiga	1 laporan	Laporan pelaksanaan kerja sama	0	0	0	0	0	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindaklanjuti	100	%	606.862.900,00	Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pangan,	100 Persen	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
						analisis makro ekonomi, percepatan akses keuangan daerah, kredit usaha rakyat, inflasi daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (mendukung 3 sub kegiatan yang diampu)													
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100	%		Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program pembangunan (mendukung 3 sub kegiatan yang diampu)	100 Persen	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	
		Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100	%		Melaksanakan koordinasi dengan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	100 Persen	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas		Koordinator	Pelaksana
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100	%	34.065.000,00	Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pangan, analisis makro ekonomi, percepatan akses keuangan daerah, kredit usaha rakyat, inflasi daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (mendukung 3 sub kegiatan yang diampu)	100 Persen	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	2	Dokumen	4.245.000,00	Menyusun resume keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan BUMD Kota Denpasar; Menyusun Buku Evaluasi Kinerja BUMD Kota Denpasar;	2 Dokumen	Dokumen BUMD Kota Denpasar; Dokumen BLUD Kota Denpasar	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas		Koordinator	Pelaksana
	Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	BUMD dan BLUD				Menyusun resume keuangan bulanan BLUD; Menyusun Buku Evaluasi Kinerja BLUD												Denpasar	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	20.800.000,00	Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah); Melaksanakan Monitoring TPID; Menyusun Laporan Triwulanan TPID	4 Laporan	Laporan TPID Triwulan I; Laporan TPID Triwulan II; Laporan TPID Triwulan III; Laporan TPID Triwulan IV	25	0	50	0	75	0	100	4	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	9.020.000,00	Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Monev KUR (Kredit Usaha Rakyat); Melaksanakan Monitoring KUR; Melaksanakan Rapat Koordinasi TPAKD (Tim Percepatan Akses	1 Dokumen	Dokumen Laporan KUR dan TPAKD	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
						Keuangan Daerah); Melaksanakan Rapat Pleno TPAKD; Menyusun Laporan KUR Semester I dan Semester II; Menyusun Laporan Triwulanan TPAKD													
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam	100	%	26.330.000,00	Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan (mendukung 1 sub kegiatan yang diampu)	100 Persen	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan	1	Dokumen	26.330.000,00	Melaksanakan Sarasehan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kota Denpasar; Melaksanakan Rembug KTNA Kota Denpasar; Melaksanakan Expo Nasional KTNA ke Kalimantan Timur	1 Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi terkait Kegiatan KTNA Kota Denpasar	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	n, Kelautan dan Perikanan	dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja																	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100	%	65.279.900,00	Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program pembangunan (mendukung 3 sub kegiatan yang diampu)	100 Persen	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen	16.550.000,00	Menyusun dokumen Renja Induk 2026; Menyusun dokumen Renja Perubahan 2025; Menyusun dokumen Renstra 2025-2029; Melaksanakan Rapat persiapan penyusunan Renstra 2025-2029;	2 Dokumen	Dokumen Renja Perubahan Th 2025 serta Dokumen Renja Induk Th 2026	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
						Melaksanakan FPD Penyusunan Renja induk 2026; Melaksanakan Monev Evaluasi Renja Triwulan Tahun berjalan													
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	34.458.350,00	Menyusun Laporan Monev Pembangunan Kota Denpasar; Melaksanakan Monev Pembangunan Fisik ke lapangan	1 Laporan	Dokumen Laporan Monev Pembangunan (Laporan Monev Pembangunan Fisik ke lapangan)	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3	Laporan	14.271.550,00	Menyusun Laporan LKjIP Kota Denpasar; Laporan Rapat Evaluasi Pembangunan Kota Denpasar, Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan Kota Denpasar; Melaksanakan Monev melalui koordinasi dan rapat	3 Laporan	Dokumen Laporan LKjIP; Laporan Evaluasi Pembangunan Triwulanan; Laporan Evaluasi Pembangunan Tahunan (Monev	25	0	50	0	75	0	100	3	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
								IKU dan Serapan Anggaran)											
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100	%	481.188.000,00	Melaksanakan koordinasi dengan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	100 Persen	Persentase	25	25	50	50	75	75	100	100	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5676	Dokumen	185.350.000,00	Menyusun Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	5.676 Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25	1.419	50	2.838	75	4.257	100	5.676	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44	Dokumen	147.750.000,00	Menyusun Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	25	11	50	22	75	33	100	44	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
									TW I		TW II		TW III		TW IV				
									Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	Orang	148.088.000,00	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	25	150	50	150	75	150	100	150	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Denpasar, 1 September 2025

Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Ida Bgs Alit Wiradana, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 198602 1 012

Rencana Kinerja Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik		Nilai SAKIP (Nilai)				
		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				
	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))			90-100	Rp145.385.627.510,00
		Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)			80.00-90.99	
	Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD (Nilai)			3.41-4.20	
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)			11,7	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))			90.01-99.99	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM (Nilai)			88.31-100	
		Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))			99.01-100	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	Rp111.273.961.360,00
				Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum	100%	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	Rp59.032.177.632,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	Rp59.032.177.632,00
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Rp15.122.679.614,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Rp5.668.844.150,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Rp9.453.835.464,00
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	Rp3.565.849.000,00
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
				Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	1.507.749.00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit	Rp45.239.000,00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit	Rp868.815.000,00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp1.144.046.000,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Rp7.373.587.114,00
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Rp4.193.112.914,00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang	Rp105.000.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Rp3.075.474.200,00
			Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	Rp12.553.146.000,00
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	12 Paket	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
				Sekretariat Daerah yang Disediakan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	Rp3.419.417.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	Rp2.819.409.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	Rp6.314.320.000,00
			Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Rp112.460.000,00
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	
				Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
			Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Rp51.810.000,00
			Sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Rp53.946.000,00
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Rp13.514.062.000,00
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Rp7.689.260.000,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Rp5.358.072.000,00
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	Rp466.730.000,00
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Rp32.843.851.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp4.173.121.000,00
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp3.809.228.000,00
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Rp8.015.000,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Rp355.878.000,00
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	Rp24.655.493.500,00
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	5 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
				Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	Rp12.982.489.500,00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	5 Dokumen	Rp931.489.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
			Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	Rp10.741.515.000,00
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	Rp2.568.473.000,00
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3000 Dokumen	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	Rp969.899.000,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	Rp1.158.832.000,00
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3000 Dokumen	Rp439.742.000,00
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 dokumen	1.446.763.500,00
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 dokumen	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 dokumen	24.142.500

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
			Sub Kegiatan Falisitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 dokumen	1.351.254.000
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	71.367.000
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Rp1.267.815.150,00
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Rp20.945.000,00
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Rp1.250.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp13.500.000,00
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Rp6.195.000,00
			Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Rp181.411.000,00
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Rp181.411.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Rp605.048.150,00
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Rp13.026.000,00
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Rp2.372.000,00
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Rp589.650.150,00
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	Rp460.411.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Pagu
			Uraian	Indikator		
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	Rp160.110.000,00
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	Rp192.220.000,00
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	Rp108.081.000,00



Denpasar, 29 Desember 2025
 Pj Sekretaris Daerah Kota Denpasar

[Handwritten Signature]
 Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680924 199303 1 010

Rencana Aksi Tahun 2026 atas Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV				
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))		90-100	Rp145.385.627.510,00	Melakukan koordinasi terkait penguatan IRH ke Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum terkait penyusunan Indeks Reformasi Hukum	1 Laporan	Laporan Kordinasi Indikator Indeks Reformasi Hukum	50	0	70	0	80	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum
	Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)		80.00-90.99		Melaksanakan koordinasi pengukuran indeks kualitas kebijakan yang melibatkan lintas sektor/perangkat daerah terkait.	1 Laporan	Laporan koordinasi pengukuran indeks kualitas kebijakan ke Lembaga Administrasi Negara	50	0	70	0	80	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum
Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD (Nilai)		3.41-4.20		Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan tim, daerah lain, Provinsi, dan Pusat; melaksanakan desk data LPPD; melaksanakan penyusunan laporan, dan ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis terkait Penyusunan LPPD; melaksanakan evaluasi data capaian; dan melaksanakan rapat secara berkala	1 Laporan	Laporan pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50	0	70	0	80	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan		Rp11,70		Melaksanakan pembinaan, koordinasi Ke Seluruh OPD terkait penyusunan LKJIP sesuai dengan sistematika Permenpan 53 Tahun 2014	1 Laporan	Laporan Hasil Koordinasi dan pembinaan	25	0	50	0	100	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output	Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator		
							TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana	
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%				Kuantitas
	Kinerja (Nilai)																	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))		90.01-99.99		Terpenuhinya Kebutuhan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa . Sesuai dengan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2324/M.SM.01.00/2025 Tanggal 25 Mei 2025 tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Orang	Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	0	100	0	100	0	100	1			Bagian Pengadaan Barang Jasa
Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM (Nilai)		88.31-100		Melaksanakan pembinaan, sosialisasi terkait pengisian dan pelaksanaan SKM kepada Seluruh OPD	1 Laporan	Laporan Hasil Koordinasi dan pembinaan	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi
	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))		99.01-100		Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan tim, daerah lain, Provinsi, dan Pusat; melaksanakan rapat secara berkala; melaksanakan penyusunan laporan penerapan SPM; mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis terkait asistensi dan supervisi penerapan SPM; melaksanakan monitoring evaluasi penerapan SPM ke	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Tata Pemerintahan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
					perangkat daerah pengampu SPM setiap triwulan; mengikuti rapat evaluasi dari kementerian setiap triwulan													
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	Rp111.273.961.360,00	Menyesuaikan dengan Bagian pengampu oleh karena anggaran program ada pada masing-masing pengampu kegiatan								Terakit	Sekretaris Daerah	Asisten Administrasi Umum			
		Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum	100%															
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	Rp59.032.177.632,00	Menyusun daftar gaji dan tunjangan ASN, Penginputan data gaji dan tunjangan, pelaporan realisasi gaji dan tunjangan	402 Orang /Bulan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	0	50	0	75	0	100	402	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	Rp59.032.177.632,00	Menyusun daftar gaji dan tunjangan ASN, Penginputan data gaji dan tunjangan, pelaporan realisasi gaji dan tunjangan	402 Orang /Bulan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	0	50	0	75	0	100	402	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Rp15.122.679.614,00	Mengidentifikasi kebutuhan jasa penunjang, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penyediaan jasa, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.	18 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	4	50	8	75	12	100	18	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator		
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana	
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		Mengidentifikasi kebutuhan jasa penunjang, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penyediaan jasa, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.	11 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	0	50	0	75	0	10	11	0	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Rp5.668.844.150,00	Melakukan inventarisasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, pelaksanaan pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, melakukan distribusi peralatan dan perlengkapan kepada unit kerja, penginputan ke sistem inventaris.	18 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	4	50	8	75	12	10	18	0	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Rp9.453.835.464,00	Mengumpulkan data administrasi kepegawaian, Pemutakhiran data ASN akibat perubahan status (kenaikan pangkat, mutasi, pensiun dan lain-lain), penginputan dan pengolahan data kepegawaian, penyusunan dan pengarsipan dokumen kepegawaian, rekonsiliasi data kepegawaian dengan BKPSDM, penyusunan laporan administrasi kepegawaian	11 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	0	50	0	75	0	10	11	0	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Kegiatan Pemeliharaan Barang	Jumlah Kendaraan Dinas	166 Unit	Rp3.565.849.000,00	Melakukan Inventarisasi dan pengecekan BMD, Penyusunan kebutuhan	166 Unit	Kendaraan Dinas Operasional	25	40	50	80	75	120	10	166	0	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV				
								Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%		Kuantitas	%
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, monitoring dan evaluasi		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit		Melakukan Inventarisasi dan pengecekan BMD, Penyusunan kebutuhan pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, monitoring dan evaluasi	132 Unit	Mebel yang Dipelihara	25	30	50	60	75	90	100	132	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Umum
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit		Melakukan Inventarisasi dan pengecekan BMD, Penyusunan kebutuhan pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, monitoring dan evaluasi	616 Unit	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	154	50	308	75	426	100	616	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Umum
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit		Melakukan Inventarisasi dan pengecekan BMD, Penyusunan kebutuhan pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, monitoring dan evaluasi	3 Unit	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	25	0	50	0	75	0	100	3	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	166 Unit	1.507.749.00	Melakukan pendataan dan inventarisasi kendaraan dinas operasional, menyusun rencana kebutuhan pajak dan perizinan kendaraan,	166 Unit	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	25	40	50	80	75	120	100	166	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			pengurusan perizinan kendaraan (STNK, KIR dan lain-lain)		dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit	Rp45.239.000,00	Melakukan inventarisasi dan pendataan kondisi mebel kantor, melakukan identifikasi kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan mebel dan melakukan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mebel.	132 Unit	Mebel yang Dipelihara	25	30	50	60	75	90	100	132	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit	Rp868.815.000,00	Melakukan inventarisasi dan pendataan peralatan dan mesin lainnya beserta kondisi fisik, identifikasi kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan peralatann dan mesin	616 Unit	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	154	50	308	75	426	100	616	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3 Unit	Rp1.144.046.000,00	Melakukan inventarisasi dan penilaian kondisi sarana dan prasarana gedung/bangunan, melakukan identifikasi kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi dan melakukan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	3 Unit	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	25	0	50	0	75	0	100	3	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator		
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana	
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas				
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Rp7.373.587.114,00	Melakukan Perencanaan kebutuhan operasional, pelaksanaan administrasi keuangan, dukungan operasional, penatausahaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi	2 Orang / Bulan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25	0	50	0	75	0	10	2	0	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang		Melakukan Perencanaan kebutuhan operasional, pelaksanaan administrasi keuangan, dukungan operasional, penatausahaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi	7 Orang	Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25	0	50	0	75	0	10	7	0	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		Melakukan Perencanaan kebutuhan operasional, pelaksanaan administrasi keuangan, dukungan operasional, penatausahaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi	2 Orang /Bulan	Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25	0	50	0	75	0	10	2	0	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	2 Orang/Bulan	Rp4.193.112.914,00	Penyusunan daftar gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penginputan data ke sistem penggajian, pelaporan realisasi pembayaran.	2 Orang / Bulan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25	0	50	0	75	0	10	2	0	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah																
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang	Rp105.000.000,00	Penyusunan rencana pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelaksanaan medical check up, pengarsipan dokumen dan pelaporan kegiatan	7 Orang	Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25	0	50	0	75	0	100	7	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Rp3.075.474.200,00	Penyusunan rencana kebutuhan dana penunjang operasional, penyusunan dan verifikasi dokumen administrasi keuangan dan penyaluran dana penunjang operasional	2 Orang /Bulan	Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25	0	50	0	75	0	100	2	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Daerah yang Disediakan	7 Paket	Rp12.553.146.000,00	Mengidentifikasi kebutuhan kerumahtanggaan, perencanaan dan pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengendalian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	7 Paket	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25	2	50	4	75	6	100	7	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	7 Paket		Mengidentifikasi kebutuhan kerumahtanggaan, perencanaan dan pelaksanaan layanan kerumahtanggaan,	7 Paket	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	25	2	50	4	75	6	100	7	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator		
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana	
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas				
		Daerah yang Disediakan			pengendalian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.														
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		Mengidentifikasi kebutuhan kerumahtanggaan, perencanaan dan pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengendalian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	12 Paket	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	25	3	50	6	75	9	10	12	0	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	Rp3.419.417.000,00	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan rumah tangga kepala daerah, penyusunan perencanaan kebutuhan, distribusi kebutuhan rumah tangga ke unit kerja terkait, pengelolaan dan penggunaan kebutuhan rumah tangga.	7 Paket	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25	2	50	4	75	6	10	7	0	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	Rp2.819.409.000,00	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, penyusunan perencanaan kebutuhan, distribusi kebutuhan rumah tangga ke unit kerja terkait, pengelolaan dan penggunaan kebutuhan rumah tangga.	7 Paket	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	25	2	50	4	75	6	10	7	0	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Umum
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	Rp6.314.320.000,00	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan rumah tangga sekretariat, penyusunan perencanaan kebutuhan, distribusi kebutuhan rumah tangga ke unit kerja terkait,	12 Paket	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	25	3	50	6	75	9	10	12	0	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Umum

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Sekretariat Daerah				pengelolaan dan penggunaan kebutuhan rumah tangga.													
	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Rp112.460.000,00	Menyusun Laporan Anjab/ABK, serta Penataan Kelembagaan	2 Dokumen	Dokumen Anjab ABK dan Dokumen Kelembagaan	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		Menyusun Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Dokumen Pelayanan Publik	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		Menyusun LKJIP Kota Denpasar, Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Dokumen LKJIP Kota Denpasar dan Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi
	Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Rp6.704.000,00	Menyusun Laporan Anjab/ABK, serta Penataan Kelembagaan	2 Dokumen	Dokumen Anjab ABK dan Dokumen Kelembagaan	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi
	Sub kegiatan fasilitas pelayanan publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Rp51.810.000,00	Menyusun Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Dokumen Pelayanan Publik	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Rp53.946.000,00	Menyusun LKJIP Kota Denpasar, Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Dokumen LKJIP Kota Denpasar dan Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25	0	50	0	75	0	100	2	Te rka it	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Rp13.514.062.000,00	Menyusun laporan hasil fasilitasi keprotokolan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	12 Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	25	3	50	6	75	9	100	12	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		Menyusun laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	12 Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	25	3	50	6	75	9	100	12	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan		Menyusun laporan pendokumentasian tugas pimpinan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	4 Laporan	Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	25	1	35	1	50	1	100	4	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Rp7.689.260.000,00	Menyusun laporan hasil fasilitasi keprotokolan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	12 Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	25	3	50	6	75	9	100	12	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komuni

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
																		kasi Pimpinan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Rp5.358.072.000,00	Menyusun laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	12 Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	25	3	50	6	75	9	100	12	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	Rp466.730.000,00	Menyusun laporan pendokumentasian tugas pimpinan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	4 Laporan	Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	25	1	35	1	50	1	100	4	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Rp32.843.851.000,00	Menyesuaikan dengan Bagian pengampu oleh karena anggaran program ada pada masing-masing pengampu kegiatan										Terakit	Sekretaris Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp4.173.121.000,00	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan Apeksi, HUT Kota, HUT Otda, HUT Provinsi, HUT RI, Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan koordinasi dan fasilitasi terkait penyusunan laporan	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan HUT Kota Denpasar, HUT RI, HUT Otda dan HUT Provinsi; Dokumen Pelaksanaan	30	1	60	1	90	1	100	4	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output	Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator		
							TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana	
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%				Kuantitas
					keterangan pertanggungjawaban Walikota Denpasar		Kegiatan Apeksi; Dokumen Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan Dokumen Buku LKPJ											
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen		Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait Pembinaan Kelurahan, PATEN, Tapal Batas Wilayah dan Rupa Bumi.	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan; Dokumen Pelaksanaan PATEN; Dokumen Pelaksanaan Rupa Bumi; dan Dokumen Pelaksanaan Tapal Batas Wilayah	10	0	25	0	75	0	100	4	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen		Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait Peningkatan capaian Penerapan SPM Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui rapat, sosialisasi, Bimtek dan monitoring evaluasi secara berkala; Peningkatan capaian kinerja kunci masing -masing urusan di	5 Dokumen	Dokumen Laporan Penerapan SPM; Dokumen Buku LPPD; Dokumen RLPPD; Dokumen Pelaksanaan kegiatan LPPD; dan Dokumen	50	3	65	3	80	3	100	5	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
					Pemerintah Kota Denpasar melalui Desk data capaian, Bimtek tim penyusun dan reviu dari tim APIP		Pelaksanaan Penerapan SPM											
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp3.809.228.000,00	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan Apeksi, HUT Kota, HUT Otda, HUT Provinsi, HUT RI, Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan koordinasi dan fasilitasi terkait penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Denpasar	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan HUT Kota Denpasar, HUT RI, HUT Otda dan HUT Provinsi; Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Apeksi; Dokumen Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan Dokumen Buku LKPJ	30	1	60	1	90	1	100	4	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Rp8.015.000,00	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait Pembinaan Kelurahan, PATEN, Tapal Batas Wilayah dan Rupa Bumi.	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan; Dokumen Pelaksanaan PATEN; Dokumen Pelaksanaan Rupa Bumi; dan Dokumen Pelaksanaan	10	0	25	0	75	0	100	4	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
							Tapal Batas Wilayah											
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Rp355.878.000,00	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait Peningkatan capaian Penerapan SPM Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui rapat, sosialisasi, Bimtek dan monitoring evaluasi secara berkala; Peningkatan capaian kinerja kunci masing -masing urusan di Pemerintah Kota Denpasar melalui Desk data capaian, Bimtek tim penyusun dan reuiu dari tim APIP	5 Dokumen	Dokumen Laporan Penerapan SPM; Dokumen Buku LPPD; Dokumen RLPPD; Dokumen Pelaksanaan kegiatan LPPD; dan Dokumen Pelaksanaan Penerapan SPM	50	3	65	3	80	3	100	5	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	Rp24.655.493.500,00	Menyusun Dokumen Kegiatan Upakara Piodalan, Dokumen Kegiatan Ngaturang Penganyar, Dokumen Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	4 Dokumen	Dokumen Kegiatan Upakara Piodalan, Dokumen Kegiatan Ngaturang Penganyar, Dokumen Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	25	0	50	0	75	0	100	4	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen		Menyusun Dokumen Kegiatan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar dan Ziarah Peringatan Hari-Hari Bersejarah, Dokumen Kegiatan Peringatan Kebangkitan Nasional, Dokumen Kegiatan Peringatan Kesaktian Pancasila, Dokumen Kegiatan Peringatan Puputan Margarana, dan Dokumen Kegiatan Pemberian Penghargaan Uang kepada Ahli Waris Veteran Republik Indonesia	5 Dokumen	Dokumen Kegiatan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar dan Ziarah Peringatan Hari-Hari Bersejarah, Dokumen Kegiatan Peringatan Kebangkitan Nasional, Dokumen Kegiatan Peringatan Kesaktian Pancasila, Dokumen Kegiatan Peringatan Puputan Margarana, dan Dokumen Kegiatan Pemberian Penghargaan Uang kepada Ahli Waris Veteran Republik Indonesia	25	0	50	0	75	0	100	5	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Dokumen Hasil	5 Dokumen		Menyusun Dokumen Pelaksanaan Pengusulan Proposal Hibah Uang dan	5 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pengusulan	25	0	50	0	75	0	100	5	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
		Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			Hibah Barang Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pencairan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Dokumen Kegiatan Monitoring Penerima Hibah, Dokumen Pertanggungjawaban dari Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Uang, dan Dokumen Kegiatan Sosialisasi Hibah Online E-Monalisa		Proposal Hibah Uang dan Hibah Barang Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pencairan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Dokumen Kegiatan Monitoring Penerima Hibah, Dokumen Pertanggungjawaban dari Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Uang, dan Dokumen Kegiatan Sosialisasi Hibah Online E-Monalisa											teraan Rakyat
	Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil	4 Dokumen	Rp12.982.489.500,00	Menyusun Dokumen Kegiatan Upakara Piodalan, Dokumen Kegiatan	4 Dokumen	Dokumen Kegiatan Upakara	25	0	50	0	75	0	100	4	Terakit	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejah

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Ngaturang Penganyar, Dokumen Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)		Piodalan, Dokumen Kegiatan Ngaturang Penganyar, Dokumen Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)											teraan Rakyat
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan	5 Dokumen	Rp931.489.000,00	Menyusun Dokumen Kegiatan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar dan Ziarah Peringatan Hari-Hari Bersejarah, Dokumen Kegiatan Peringatan Kebangkitan Nasional, Dokumen Kegiatan Peringatan Kesaktian Pancasila, Dokumen Kegiatan Peringatan Puputan Margarana, dan Dokumen Kegiatan Pemberian Penghargaan Uang kepada Ahli Waris Veteran Republik Indonesia	5 Dokumen	Dokumen Kegiatan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar dan Ziarah Peringatan Hari-Hari Bersejarah, Dokumen Kegiatan Peringatan Kebangkitan Nasional, Dokumen Kegiatan Peringatan Kesaktian Pancasila, Dokumen	25	0	50	0	75	0	100	5	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV		Koordinator		Pelaksana	
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas				
		n Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Kegiatan Peringatan Puputan Margarana, dan Dokumen Kegiatan Pemberian Penghargaan Uang kepada Ahli Waris Veteran Republik Indonesia												
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	Rp10.741.515.000,00	Menyusun Dokumen Pelaksanaan Pengusulan Proposal Hibah Uang dan Hibah Barang Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pencairan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Dokumen Kegiatan Monitoring Penerima Hibah, Dokumen Pertanggungjawaban dari Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Uang, dan Dokumen Kegiatan Sosialisasi Hibah Online E-Monalisa	5 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pengusulan Proposal Hibah Uang dan Hibah Barang Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pencairan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Dokumen Kegiatan Monitoring Penerima	25	0	50	0	75	0	100	5	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV		Koordinator		Pelaksana	
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas				
							Hibah, Dokumen Pertanggungjawaban dari Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Uang, dan Dokumen Kegiatan Sosialisasi Hibah Online E-Monalisa												
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	Rp2.568.473.000,00	Menyusun Dokumen Produk Hukum Daerah	3000 Dokumen	Dokumen Produk Hukum Daerah yang terdiri dari Perda, Perwali, Surat Keputusan Walikota	25	0	50	0	75	0	100	3000	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum	
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus		Menyusun Dokumen Kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	20 Kasus	Dokumen Kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	25	0	50	0	75	0	100	20	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum	
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	3000 Dokumen		Menyusun Dokumen Hukum yang telah didokumentasikan	3000 Dokumen	Dokumen Hukum yang telah didokumentasikan	25	0	50	0	75	0	100	3000	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum	

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas						
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	Rp969.899.000,00	Menyusun Dokumen Produk Hukum Daerah	3000 Dokumen	Dokumen Produk Hukum Daerah yang terdiri dari Perda, Perwali, Surat Keputusan Walikota	25	0	50	0	75	0	10	3000	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum
	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus	Rp1.158.832.000,00	Menyusun Dokumen Kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	20 Kasus	Dokumen Kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	25	0	50	0	75	0	10	20	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi yang Didokumentasikan	3000 Dokumen	Rp439.742.000,00	Menyusun Dokumen Hukum yang telah didokumentasikan	3000 Dokumen	Dokumen Hukum yang telah didokumentasikan	25	0	50	0	75	0	10	3000	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	25 dokumen	Rp1.446.763.500,00	Melakukan koordinasi dan Fasilitas pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga (dokumen kesepakatan bersama)	25 dokumen	Dokumen kesepakatan bersama	20	5	28	7	32	8	10	25	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	2 dokumen		Melakukan koordinasi dan Fasilitas pelaksanaan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di Luar Negeri dan kerja sama daerah dengan Lembaga di	2 dokumen	Dokumen hasil fasilitas kerjasama dengan Luar Negeri	0	0	50	1	0	0	10	2	0	Terkait	Sekretaris Daerah

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator		
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana	
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas				
					Luar Negeri (Dokumen MoU dan LoI)														
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan		Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan perangkat daerah dan pihak ketiga (Laporan Pelaksanaan Kerjasama)	1 laporan	Laporan pelaksanaan kerja sama	25	0	50	0	75	0	10	0	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 dokumen	Rp24.142.500,00	Menyusun dokumen hasil fasilitasi (Kesepakatan Bersama)	25 dokumen	Dokumen hasil fasilitasi	20	5	28	7	32	8	10	0	25	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama
	Sub Kegiatan Falisitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 dokumen	Rp1.351.254.000,00	Menyusun dokumen hasil fasilitasi (Dokumen MoU dan LoI)	2 dokumen	Dokumen hasil fasilitasi	0	0	50	1	0	0	10	0	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	Rp71.367.000,00	Menyusun laporan pelaksanaan kerja sama	1 laporan	Laporan pelaksanaan kerja sama	25	0	50	0	75	0	10	0	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Rp1.267.815.150,00	Menyesuaikan dengan Bagian pengampu oleh karena anggaran program ada pada masing-masing pengampu kegiatan											Terkait	Sekretaris Daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen	Rp20.945.000,00	Menyusun resume keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan	2 Dokumen	Dokumen BUMD Kota Denpasar;	25	0	50	0	75	0	10	0	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekon

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			BUMD Kota Denpasar; Menyusun Buku Evaluasi Kinerja BUMD Kota Denpasar; Menyusun resume keuangan bulanan BLUD; Menyusun Buku Evaluasi Kinerja BLUD		Dokumen BLUD Kota Denpasar											omian Sekretaris Daerah Denpasar
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah); Melaksanakan Monitoring TPID; Menyusun Laporan Triwulanan TPID	4 Laporan	Laporan TPID Triwulan I; Laporan TPID Triwulan II; Laporan TPID Triwulan III; Laporan TPID Triwulan IV	25	0	50	0	75	0	100	4	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Denpasar
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Monev KUR (Kredit Usaha Rakyat); Melaksanakan Monitoring KUR; Melaksanakan Rapat Koordinasi TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah); Melaksanakan Rapat Pleno TPAKD; Menyusun Laporan KUR Semester I dan Semester II; Menyusun Laporan Triwulanan TPAKD	1 Dokumen	Dokumen Laporan KUR dan TPAKD	25	0	50	0	75	0	100	1	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Denpasar
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	2 Dokumen	Rp1.250.000,00	Menyusun resume keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan BUMD Kota Denpasar;	2 Dokumen	Dokumen BUMD Kota Denpasar; Dokumen	25	0	50	0	75	0	100	2	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas						
	, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Menyusun Buku Evaluasi Kinerja BUMD Kota Denpasar; Menyusun resume keuangan bulanan BLUD; Menyusun Buku Evaluasi Kinerja BLUD		BLUD Kota Denpasar											Sekretariat Daerah Kota Denpasar
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp13.500.000,00	Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah); Melaksanakan Monitoring TPID; Menyusun Laporan Triwulanan TPID	4 Laporan	Laporan TPID Triwulan I; Laporan TPID Triwulan II; Laporan TPID Triwulan III; Laporan TPID Triwulan IV	25	0	50	0	75	0	100	4	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Rp6.195.000,00	Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Monev KUR (Kredit Usaha Rakyat); Melaksanakan Monitoring KUR; Melaksanakan Rapat Koordinasi TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah); Melaksanakan Rapat Pleno TPAKD; Menyusun Laporan KUR Semester I dan Semester II; Menyusun Laporan Triwulanan TPAKD	1 Dokumen	Dokumen Laporan KUR dan TPAKD	25	0	50	0	75	0	100	1	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	1 Dokumen	Rp181.411.000,00	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) ke Gorontalo; Melaksanakan Rapat	1 Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi terkait	25	0	50	0	75	0	100	1	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
		dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			Persiapan Sarasehan KTNA Kota Denpasar; Melaksanakan Sarasehan KTNA Kota Denpasar		Kegiatan KTNA Kota Denpasar											iat Daerah Kota Denpasar
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Rp181.411.000,00	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) ke Gorontalo; Melaksanakan Rapat Persiapan Sarasehan KTNA Kota Denpasar; Melaksanakan Sarasehan KTNA Kota Denpasar	1 Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi terkait Kegiatan KTNA Kota Denpasar	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	2 Dokumen	Rp605.048.150,00	Menyusun dokumen Renja Induk 2027; Menyusun dokumen Renja Perubahan 2026;	2 Dokumen	Dokumen Renja Perubahan Th 2026 serta	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Pembangunan	Penyusunan Program Pembangunan Daerah			Melaksanakan Monev Evaluasi Renja Triwulan Tahun berjalan		Dokumen Renja Induk Th 2027											Pembangunan
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan		Menyusun Laporan Monev Pembangunan Kota Denpasar; Melaksanakan Monev Pembangunan Fisik ke lapangan	1 Laporan	Dokumen Laporan Monev Pembangunan (Laporan Monev Pembangunan Fisik ke lapangan)	25	0	50	0	75	0	100	1	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		Menyusun Laporan LKjIP Kota Denpasar; Laporan Rapat Evaluasi Pembangunan Kota Denpasar, Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan Kota Denpasar; Melaksanakan Monev melalui koordinasi dan rapat	3 Laporan	Dokumen Laporan LKjIP; Laporan Evaluasi Pembangunan Triwulanan; Laporan Evaluasi Pembangunan Tahunan (Monev IKU dan Serapan Anggaran)	25	0	50	0	75	0	100	3	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Rp13.026.000,00	Menyusun dokumen Renja Induk 2027; Menyusun dokumen Renja Perubahan 2026; Melaksanakan Monev Evaluasi Renja Triwulan Tahun berjalan	2 Dokumen	Dokumen Renja Perubahan Th 2026 serta Dokumen Renja Induk Th 2027	25	0	50	0	75	0	100	2	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Rp2.372.000,00	Menyusun Laporan Monev Pembangunan Kota Denpasar; Melaksanakan Monev Pembangunan Fisik ke lapangan	1 Laporan	Dokumen Laporan Monev Pembangunan (Laporan Monev Pembangunan Fisik ke lapangan)	25	0	50	0	75	0	100	1	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Rp589.650.150,00	Menyusun Laporan LKjIP Kota Denpasar; Laporan Rapat Evaluasi Pembangunan Kota Denpasar, Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan Kota Denpasar; Melaksanakan Monev melalui koordinasi dan rapat	3 Laporan	Dokumen Laporan LKjIP; Laporan Evaluasi Pembangunan Triwulanan; Laporan Evaluasi Pembangunan Tahunan (Monev IKU dan Serapan Anggaran)	25	0	50	0	75	0	100	3	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	Rp460.411.000,00	Menyusun Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	6.000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25	1.500	50	3.000	75	4.500	100	6.000	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen		Menyusun Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	25	11	50	22	75	33	100	44	Te rka it	Sekretar is Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
								TW I		TW II		TW III		TW IV				
					Uraian	Satuan	Indikator	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang		Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	25	150	50	150	75	150	100	150	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	Rp160.110.000,00	Menyusun Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	6.000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25	1.500	50	3.000	75	4.500	100	6.000	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	Rp192.220.000,00	Menyusun Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	25	11	50	22	75	33	100	44	Te rka it	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Sasaran Strategis	Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian								Jenis Kegiatan Aksi	Koordinator	
					Uraian	Satuan	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			Koordinator	Pelaksana
								%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas	%	Kuantitas			
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	Rp108.081.000,00	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	25	150	50	150	75	150	100	150	Terkait	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa



Denpasar, 29 Desember 2025
 B. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

[Handwritten Signature]
 Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680924 199303 1 010

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI
LHE SAKIP TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

No	Rekomendasi	No	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Rencana Waktu Pelaksanaan Aksi Tindak Lanjut	Rencana Target Pelaksanaan Aksi Tindak Lanjut	Pemanggung Jawab	Status Pelaksana	Keterangan Tambahan	Data/Bukti Dukung
1	Melakukan upaya pengendalian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal bersama jajaran unit kerja untuk memastikan target tercapai yang terdokumentasi terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal di lingkungan Sekretariat Daerah terhadap Renja secara berkala	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Sekretaris Daerah Kota Denpasar melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	Dalam proses	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2026 yang diselenggarakan berkala melalui rapat dengan bukti dukung Laporan hasil evaluasi Renja, Notula, Daftar Hadir, Dokumentasi rapat	Kegiatan belum terlaksana (masih dalam proses)
2	Meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah selanjutnya akan dimonev oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Menyesuaikan jadwal Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Menyesuaikan jadwal Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Dalam proses	Laporan Hasil Monev Bappeda serta dokumentasi kegiatan	Kegiatan belum terlaksana (masih dalam proses)
		2	Dengan adanya Indikator Sekretariat Daerah yang baru (sesuai Renstra 2025-2029) adanya perubahan IKU, namun akan tetap melakukan koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah sesuai Tusi di Sekretariat Daerah	Berkala (permasing masing indikator dari 7 IKU)	Berkala (permasing masing indikator dari 7 IKU)	Sekretaris Daerah Kota Denpasar	Dalam proses	Bukti dukung dokumentasi kegiatan koordinasi dan pembinaan sesuai rencana aksi per masing-masing IKU Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Kegiatan belum terlaksana (masih dalam proses)

No	Rekomendasi	No	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Rencana Waktu Pelaksanaan Aksi Tindak Lanjut	Rencana Target Pelaksanaan Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status Pelaksana	Keterangan Tambahan	Data/Bukti Dukung
3	Mempedomani Permien PAN RB No. 53 Tahun 2014 sebagai pedoman penyusunan pelaporan kinerja dengan memperhatikan konten ataupun substansi minimal yang disyaratkan ada pada sistematisa laporan kinerja, serta analisis prestasi/penghargaan sebagai komitmen dari pencapaian kinerja baik secara langsung atau tidak langsung	1	Berkoordinasi bersama dengan Bagian Organisasi terkait sistematisa laporan	Januari Tahun 2026	Januari Tahun 2026	Sekretaris Daerah Kota Denpasar melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Sudah Dilaksanakan	Telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan LKJIP Perangkat Daerah yang diselenggarakan Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Dokumentasi kegiatan pada 21 Januari 2026
		2	Mengumpulkan data serta mencantumkan prestasi/penghargaan pada LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2026 atas Data Tahun 2025	Januari Tahun 2026	Januari Tahun 2026	Sekretaris Daerah Kota Denpasar melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Sudah Dilaksanakan	Telah dilaksanakan rapat bersama terkait penyusunan LKJIP 2026 Sekretariat Daerah atas kinerja Tahun 2025 yang diselenggarakan melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Dokumentasi kegiatan pada 20 Januari 2027
4	Memperhatikan pencapaian evaluasi ini bahkan ditingkatkan pada penilaian maupun evaluasi tahun selanjutnya	1	Lebih intens melakukan koordinasi serta kolaborasi bersama dengan Perangkat Daerah	Berkala	Berkala	Sekretaris Daerah Kota Denpasar	Dalam proses	Bukti dukung berupa dokumentasi kegiatan	Kegiatan belum terlaksana (masih dalam proses)

Catatan:

- Jumlah Rekomendasi : *(Jumlahkan rekomendasi pada kolom B)*
- Jumlah Rencana Aksi Tindak Lanjut : *(Jumlahkan rencana aksi tindak lanjut pada kolom D)*
- Status Belum Dilaksanakan : *(Jumlahkan status "Belum Dilaksanakan" pada kolom D)*
- Status Sudah Dilaksanakan : *(Jumlahkan status "Sudah Dilaksanakan" pada kolom D)*

Yang Menyusun,
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Denpasar

Made Rai Eddy Mulawarn, SSTP, M.E.
Pembina Tk. I (N/V/b)
NIP. 19770314 199601 1 001

Denpasar, 5 Februari 2026
Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Neurah Eddy Mulwa, SE, M.Si
Pembina Ujaha Muda (IV/c)
NIP. 19680924 199303 1 010





WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/ 58 / HK /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap pelayanan Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju perlu adanya pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3464);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan dengan seluruh Bagian di Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
 - b. mengelola hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dari seluruh Bagian di Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
 - c. menyusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025; dan
 - d. melaporkan segala hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor DPA-SKPD:DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/6/HK/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
NOMOR : 100.3.3.3/ 58 /HK/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian
Kota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- Pelaksana : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Denpasar
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat
Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kota Denpasar
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Denpasar
9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kota
Denpasar

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. Walikota Denpasar
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar,




Gusti Ngurah Eddy Mulya

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

- Anggota :
1. Ni Putu Melani Supartini, S.H
 2. Gusti Ketut Tristina Dewi, SST.Par.,M.AP
 3. I Gede Bagus Bayu Kresnapati, S.E.
 4. Made Gede Soehartha, S.E.
 5. Desak Nyoman Utami, S.E.
 6. Agus Supraptha, SE
 7. Maria Evalinda Pujinarwaty, A.Md
 8. Made Dwi Astika Tajem, S.IP
 9. Ida Bagus Putu Jayawiguna, S.Kom.
 10. Anak Agung Gde Agung Aricahya, S.E., M.Si

Staf Administrasi : Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu:

1. Anak Agung Ayusya Prabhandina, S.E, M.Si.
2. Ni Made Aristawati, SE
3. Anak Agung Yuni Ashari, S.E.
4. Ni Kadek Intan Dwi Lestari, S.M
5. I Gede Wahyu Agustiana Putra, S.KOM
6. I Nyoman Wira Dewantara, S.E.
7. I Pande Komang Sugiartawan, S.M.
8. Ida Bagus Ngurah Wilyana
9. Ida Ayu Dwinita Yoga Saraswati

a.n. Walikota Denpasar

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar,



Gusti Ngurah Eddy Mulya

INDIKATOR :
Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah

INDIKATOR :
Jumlah produk hukum dan pengambilan informasi hukum

INDIKATOR :
Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait keajaiberaan masyarakat

INDIKATOR :
Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah

Tertelaksananya
Perencanaan dan
Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil

INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Tertelaksananya
koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan
Usaha Pertanian,
Perikanan, Kehutanan,
Kebudayaan dan
Perikanan,
Perdagangan,
Pendidikan,
KUMH, Penanaman
Modal, Tenaga
Kerja

INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usaha Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kebudayaan dan Perikanan, Perdagangan, Pendidikan, KUMH, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

Tertelaksananya
Pengelolaan Evaluasi
dan Pelaporan
Prestasi
Pembangunan

INDIKATOR :
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Prestasi Pembangunan

Tertelaksananya
Pembinaan dan
Adaptasi Pengadaan
Barang / Jasa
Pemerintah

INDIKATOR :
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Adaptasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Tertelaksananya
Peningkatan
Kinerja dan
Reformasi
Birokrasi

INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Tertelaksananya
Pendokumentasian
Tugas Pimpinan

INDIKATOR :
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Terselengkapnya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

INDIKATOR :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Terselangnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

INDIKATOR :
Jumlah Orang yang Memerine Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tertelaksananya
Penyediaan
Kebutuhan Rumah
Tangga Sekretariat
Daerah

INDIKATOR :
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan

